PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Serta Laporan Auditor Independen

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
As of December 31, 2023 and 2022 and For The Years Then Ended

And Independent Auditor's Report

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES

Daftar Isi

Halaman/
Pages

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut		***Consolidated Financial Statements As of December 31, 2023 and 2022 and For the Years Then Ended***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-2	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6-219	*Notes to Consolidated Financial Statements*

POS IND
Logistik Indonesia

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

Nama / *Name*	:	Faizal Rochmad Djoemadi	:	
Alamat Kantor / *Office Address*	:	Jl. Banda No. 73 Bandung	:	
Alamat Rumah / *Domicile Address*	:	Jl. Terusan Sutami I No. 6 RT/RW 005/003, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat	:	
Nomor Telepon / *Telephone Number*	:	022-4206195	:	
Jabatan / *Position*	:	Direktur Utama/ *President Director*	:	
Nama / *Name*	:	Endy P.R. Abdurrahman	:	
Alamat Kantor / *Office Address*	:	Jl. Banda No. 73 Bandung	:	
Alamat Rumah / *Domicile Address*	:	Jl. Durian Barat III No. 3 RT/RW 006/004, Jagakarsa, Jakarta Selatan	:	
Nomor Telepon / *Telephone Number*	:	022-4206195	:	
Jabatan / *Position*	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/ *Finance and Risk Management Director*	:	

Menyatakan bahwa: / *State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya; / *We are responsible in the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries;*
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information in the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan / *The consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact; and*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pos Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya. / *We are responsible for PT Pos Indonesia (Persero) and its Subsidiaries internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Bandung, 26 Maret 2024 / *26 March 2024*

Faizal Rochmad Djoemadi
Direktur Utama/ *President Director*

Endy P.R. Abdurrahman
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

PT Pos Indonesia (Persero)
Graha Pos Indonesia
Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115
Telp. 022-4213640, 4213641, 4213646
Faks. 022-4267725, 022-4267744
http://www.posindonesia.co.id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No. : 00077/2.1127/AU.1/05/0797-1/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT POS INDONESIA (PERSERO)

To the Shareholders, Boards of Commisioners, and Directors
PT POS INDONESIA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pos Indonesia (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pos Indonesia (Persero) and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statement in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these

Penyisihan untuk Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piutang

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mencatat piutang usaha bersih sebesar Rp607.499.753.460, yang mencakup 4,45% dari total aset Grup, dengan total cadangan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp222.097.356.333.

Sesuai dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan, Grup menentukan kerugian kredit ekspektasian dengan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang menggunakan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dengan basis masa depan. Tingkat kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan pengalaman gagal bayar dari kelompok segmen pelanggan yang memiliki resiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan konsolidasian, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan.

Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha dijelaskan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

Alowance For Expected Credit Losses (ECL) For Receivables

As of December 31, 2023, the Group has net trade receivables amounted to Rp607,499,753,460, which accounted for approximately 4.45% of the Group total assets, with total corresponding allowance for expected credit losses of Rp222,097,356,333

In accordance with SFAS 71 Financial Instruments, the Group determines ECL by applying the simplified approach, which uses a lifetime ECL on a forward looking basis. The expected credit loss rates are based on historical defaults rates for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward looking information. As disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, these assessments involve significant management judgment and estimates.

The Group disclosures on the trade receivables are set out in Note 6 to the consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama	***How our audit addressed the Key Audit Matters***
• Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan penyisihan kredit ekspektasian atas piutang.	• *We performed procedures to understand and evaluate the design and implementation of the Group relevant controls in respect of the allowance for expected credit losses of the receivables.*
• Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model kerugian kredit ekspektasian dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.	• *We evaluated accuracy and completeness of data used in the expected credit loss model and checked mathematical accuracy of the calculation.*
• Kami mengevaluasi kewajaran dari model kerugian kredit ekspektasian yang diadopsi manajemen dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik resiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian kredit ekspektasian.	• *We evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward looking information) used by management to estimate the allowance for expected credit losses.*
Penilaian Properti Investasi Pada Nilai Wajar	***Valuation Of Investment Properties At Fair Value***
Grup mencatat properti investasinya dengan model nilai wajar. Properti investasi yang terdiri dari Tanah dan Bangunan, dilaporkan sebesar Rp6.586.760.726.000 yang mencakup 48,22% dari total aset Grup. Penilaian aset ini memerlukan bantuan penilai eksternal yang perhitungannya dilakukan dengan pendekatan biaya. Hal ini penting bagi audit kami karena melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan.	*The Group accounts for its investment properties using fair value model. Investment properties consist of Land and Building are reported at Rp6,586,760,726,000 which represents 48.22% of the Group's total assets. The valuation of these assets requires assistance of external appraisers whose assessment is carried out using cost approach. This matter is significant to our audit because it involves significant judgment and estimates.*
Pengungkapan yang berkaitan dengan jumlah nilai wajar disajikan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.	*The disclosures relating to fair value amounts are included in Note 11 to the consolidated financial statements.*

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama

Kami menelaah ruang lingkup, dasar, metodologi, dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penilai eksternal yang kualifikasi profesional dan objektivitasnya juga dipertimbangkan. Kami membandingkan informasi relevan yang mendukung harga pasar properti serupa dan penyesuaian yang dilakukan terhadap harga pasar. Kami juga meninjau pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar aset tersebut.

How Our Audit Addressed The Key Audit Matters

We reviewed the scope, bases, methodology, and results of the work done by external appraisers whose professional qualifications and objectivity were also taken into consideration. We compared the relevant information supporting to the market price of similar properties and the adjustments made to the market price. We also reviewed disclosures with respect to the fair value of these assets.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan tersebut pada tanggal 22 Februari 2023.

Other Matters

The consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2022 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on February 22, 2022.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statement and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidak konsitensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materiality inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materiality misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The original report included herein is in the Indonesian language

Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities Of Management And Those Charged With Governance For The Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditor's Responsibilities For The Audit Of The Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities For The Audit Of The Consolidated Financial Statements

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan suatu opini audit atas laporan keuangan konsolidasian . Kami bertanggung jawab atas arah, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an audit opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse concequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

00077

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO Registered Public Accountants

Leknor Joni, CPA
No. Ijin AP. 0797 / *License No. AP. 0797*

26 Maret 2024 / *March 26, 2024*

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ASET				***ASSETS***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	5, 26, 28, 29	2.653.918.421.743	2.301.803.310.923	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha - Bersih	6, 28, 29	385.402.397.127	323.084.646.578	*Trade Receivable - Net*
Persediaan	7	43.640.166.880	49.902.354.344	*Inventories*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	8, 29, 28	930.909.600.985	253.959.319.110	*Accrued Revenues*
Pajak Dibayar di Muka	15.a	592.283.336	1.467.275.200	*Prepaid Taxes*
Aset Lancar Lainnya:				*Other Current Assets:*
Piutang Layanan Jasa Keuangan	9.a, 28, 29	880.739.688.637	407.714.729.112	*Receivable from Financial Services*
Lainnya	9.b, 28	477.506.326.678	285.355.865.077	*Others*
Jumlah Aset Lancar		**5.372.708.885.386**	**3.623.287.500.344**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	15.f	52.552.484.634	42.190.455.674	*Estimated Claim for Tax Refund*
Aset Tetap - Bersih	10	1.035.327.898.488	910.175.874.031	*Fixed Assets - Net*
Properti Investasi	11	6.586.760.726.000	6.033.841.106.700	*Investment Properties*
Aset Takberwujud - Bersih	12	111.965.551.053	60.519.724.998	*Intangible Assets - Net*
Aset Pajak Tangguhan	15.d	388.117.276.057	373.064.909.800	*Deferred Tax Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	13, 28, 29	111.406.425.490	95.235.284.322	*Other Non-Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**8.286.130.361.722**	**7.515.027.355.525**	***Total Non-Current Assets***
JUMLAH ASET		**13.658.839.247.108**	**11.138.314.855.869**	***TOTAL ASSETS***

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang Usaha	14, 28, 29	474.354.916.682	480.980.837.205	*Trade Payables*
Utang Pajak	15.b	60.569.447.017	35.841.316.974	*Taxes Payable*
Utang Lain-lain	16, 28, 29	753.828.360.808	745.827.850.067	*Other Payables*
Pinjaman Bank Jangka Pendek	17, 28, 29	2.285.604.000.000	770.000.000.000	*Short-Term Bank Loans*
Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo				*Current Maturities of*
Dalam Waktu Satu Tahun:				*Long-Term Loans:*
Pinjaman Jangka Menengah	18.c, 28, 29	323.361.458.333	--	*Medium Term Notes*
Pinjaman Bank	17.a, 28, 29	--	34.000.000.000	*Bank Loans*
Liabilitas Sewa	18.b, 28, 29	7.734.098.789	38.048.921.961	*Lease Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**3.905.452.281.629**	**2.104.698.926.207**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Pinjaman Jangka Panjang-Setelah Dikurangi				*Long-Term Loans-Net of*
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:				*Current Maturities:*
Pinjaman Jangka Menengah	18.c, 28, 29	--	321.573.958.333	*Medium Term Notes*
Obligasi	18.c, 28, 29	495.100.000.000	492.650.000.000	*Bonds*
Pinjaman Bank	18.a, 28, 29	--	53.500.000.000	*Bank Loans*
Liabilitas Sewa	18.b, 28, 29	15.194.867.976	6.431.123.909	*Lease Liabilities*
Liabilitas Imbalan Kerja	19	1.108.026.778.901	1.209.887.794.624	*Employee Benefits Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.618.321.646.877**	**2.084.042.876.866**	***Total Non-Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**5.523.773.928.506**	**4.188.741.803.073**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Saham -				*Share Capital -*
Nilai Nominal Rp1.000.000				*Par Value Rp1,000,000*
per Lembar Saham				*per Share*
Modal Dasar 1.500.000 Lembar Saham				*Authorized Capital 1,500,000 Shares*
Modal Ditempatkan dan				*Capital Issued and*
Disetor Penuh Sebesar				*Fully Paid*
455.023 Lembar Saham	20.a	455.023.000.000	455.023.000.000	*455,023 Shares*
Tambahan Modal Disetor	20.b	2.344.427.566	2.344.427.566	*Additional Paid-In Capital*
Saldo Laba:				*Retained Earnings:*
Telah Ditentukan Penggunaannya		3.264.314.544.470	2.613.945.107.772	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya		755.630.126.731	650.369.436.698	*Unappropriated*
Komponen Ekuitas Lainnya	20.c	3.702.780.917.128	3.245.449.288.786	*Other Equity Component*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		**8.180.093.015.895**	**6.967.131.260.822**	***Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity***
Kepentingan Non-Pengendali	20.d	(45.027.697.293)	(17.558.208.026)	*Non-Controlling Interest*
JUMLAH EKUITAS		**8.135.065.318.602**	**6.949.573.052.796**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**13.658.839.247.108**	**11.138.314.855.869**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT POS INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
PENDAPATAN	21	5.479.121.136.675	4.618.390.887.600	***REVENUES***
BEBAN POKOK LAYANAN	22	(3.879.740.711.952)	(3.254.253.831.929)	***COST OF SERVICES***
LABA KOTOR		**1.599.380.424.723**	**1.364.137.055.671**	***GROSS PROFIT***
Beban Pemasaran	23	(70.260.445.072)	(67.963.433.466)	*Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	23	(911.643.322.302)	(906.981.911.771)	*General and Administrative Expenses*
Pendapatan Lainnya	24	628.728.086.809	726.576.499.457	*Other Income*
Beban Lainnya	24	(326.225.776.820)	(342.372.413.111)	*Other Expenses*
LABA USAHA		**919.978.967.338**	**773.395.796.780**	***PROFIT FROM OPERATIONS***
Pendapatan Keuangan	25	43.561.402.355	58.838.224.728	*Finance Income*
Beban Keuangan	25	(261.648.866.909)	(213.515.632.458)	*Finance Costs*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**701.891.502.784**	**618.718.389.050**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)***
Pajak Kini	15.c	(1.395.271.987)	(190.035.340)	*Current Tax*
Pajak Tangguhan	15.d	27.718.412.803	18.517.958.999	*Deferred tax*
LABA TAHUN BERJALAN		**728.214.643.600**	**637.046.312.709**	***PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi				***Item that Will Not be Reclassified***
ke Laba Rugi:				***to Profit or Loss:***
Pengukuran Kembali atas Liabilitas				*Remeasurement of Employee Benefits*
Imbalan Kerja	19, 20.c	57.572.938.850	(347.507.445.240)	*Obligation*
Revaluasi Aset	20.c	412.370.729.903	990.107.642.097	*Asset Revaluation*
Pajak Penghasilan Terkait	15.d, 20.c	(12.666.046.547)	76.451.637.953	*Related Income Tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
TAHUN BERJALAN		**1.185.492.265.806**	**1.356.098.147.519**	***FOR THE YEAR***
LABA TAHUN BERJALAN				***PROFIT FOR THE YEAR***
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		748.699.105.099	650.369.436.698	*Owners of the Parent Entity*
Kepentingan Non-Pengendali		(20.484.461.499)	(13.323.123.989)	*Non-Controlling Interest*
		728.214.643.600	**637.046.312.709**	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT				***FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk		1.205.988.688.940	1.369.421.271.508	*Owners of the Parent Entity*
Kepentingan Non-Pengendali		(20.496.423.134)	(13.323.123.989)	*Non-Controlling Interest*
		1.185.492.265.806	**1.356.098.147.519**	
LABA PER SAHAM DASAR		**1.645.409,36**	**1.429.311,13**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*											
			Saldo Laba/*Retained Earning*									
	Modal Saham/ *Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Sudah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah/*Total*	Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja *Remeasurement of Benefit Obligation*	Revaluasi Aset Tetap/ *Revaluation of Fixed Assets*	Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya/ *Total Other Equity Component*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non-Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	**455.023.000.000**	**2.344.427.566**	**2.024.400.252.322**	**589.544.855.450**	**2.613.945.107.772**	**151.029.186.186**	**2.375.368.267.788**	**2.526.397.453.974**	**5.597.709.989.312**	**(4.235.084.037)**	**5.593.474.905.275**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021***
Saldo Laba Sudah Ditentukan Penggunaannya	--	--	589.544.855.450	(576.221.731.461)	13.323.123.989	--	--	--	13.323.123.989	(13.323.123.989)	--	*Appropriated Retained Earnings*
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	637.046.312.709	637.046.312.709	--	--	--	637.046.312.709	--	637.046.312.709	*Profit for the Year*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	(271.055.807.285)	990.107.642.097	719.051.834.812	719.051.834.812	--	719.051.834.812	*Other Comprehensive Income for the Year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	**455.023.000.000**	**2.344.427.566**	**2.613.945.107.772**	**650.369.436.698**	**3.264.314.544.470**	**(120.026.621.099)**	**3.365.475.909.885**	**3.245.449.288.786**	**6.967.131.260.822**	**(17.558.208.026)**	**6.949.573.052.796**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022***
Saldo Laba Sudah Ditentukan Penggunaannya	--	--	650.369.436.698	(650.369.436.698)	--	--	--	--	--	--	--	*Appropriated Retained Earnings*
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	748.699.105.099	748.699.105.099	--	--	--	748.699.105.099	(20.484.461.499)	728.214.643.600	*Profit for the Year*
Penyesuaian	--	--	--	6.931.021.632	6.931.021.632	65.967.771	--	65.967.771	6.996.989.403	(6.996.989.403)	--	*Adjustment*
Penghasilan Komprehensif Lain Year Berjalan	--	--	--	--	--	44.894.930.668	412.370.729.903	457.265.660.571	457.265.660.571	11.961.635	457.277.622.206	*Other Comprehensive Income for the Year*
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	**455.023.000.000**	**2.344.427.566**	**3.264.314.544.470**	**755.630.126.731**	**4.019.944.671.201**	**(75.065.722.660)**	**3.777.846.639.788**	**3.702.780.917.128**	**8.180.093.015.895**	**(45.027.697.293)**	**8.135.065.318.602**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financal statements taken as a whole.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT POS INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH LOWS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan		5.098.572.466.567	5.229.515.488.021	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Karyawan		(2.443.222.218.208)	(2.522.907.649.365)	*Cash Paid to Employees*
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(2.525.387.089.876)	(2.369.549.544.542)	*Cash Paid to Suppliers*
Pembayaran Biaya Pemasaran		(67.290.010.927)	(1.628.049.163)	*Payment of Marketing Cost*
Pembayaran Pajak		(11.655.877.865)	(7.574.063.092)	*Payment of Tax*
Penerimaan Restitusi Pajak		15.773.122.481	--	*Receipt from Tax Restitution*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**66.790.392.172**	**327.856.181.859**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud		(239.519.595.872)	(82.992.361.373)	*Acquisition of Fixed Assets & Intangible Assets*
Pelepasan Aset Tetap		10.890.179.193	865.666.666	*Disposal of Fixed Assets*
Penempatan Bank Garansi		(95.719.129.156)	--	*Placement Bank Guarantee*
Pencairan Bank Garansi		100.460.056.756	--	*Withdrawal Bank Guarantee*
Aktivitas dan Investasi Lainnya		--	22.953.200	*Other Activities and Investments*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(223.888.489.079)**	**(82.103.741.507)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pencairan Pinjaman Bank Jangka Pendek		10.024.000.000.000	5.878.300.000.000	*Drawdown of Short-Term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek		(8.529.000.000.000)	(5.844.900.000.000)	*Payment of Short-Term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang		(87.500.000.000)	--	*Payment of Long-Term Bank Loans*
Pembayaran Bunga Pinjaman		(251.090.088.514)	(185.966.010.202)	*Payment of Interest*
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan		(26.249.201.993)	(112.768.672.412)	*Payment of Consumer Financing Liabilities*
Layanan Jasa Keuangan		(621.824.422.566)	410.830.735.089	*Financial Services*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		**508.336.286.927**	**145.496.052.475**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**351.238.190.020**	**391.248.492.827**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak dari Perubahan Kurs *Exchange Rates Fluctuation Effects* Terhadap Kas dan Setara Kas		876.920.800	544.753.401	*Exchange Rates Fluctuation Effects on Cash and Cash Equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**2.301.803.310.923**	**1.910.010.064.695**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	**2.653.918.421.743**	**2.301.803.310.923**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financal statements taken as a whole.

1. UMUM

1. a. Pendirian dan Informasi Umum

Kantor pos pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal GW Baron, pada tanggal 26 Agustus 1746 yang pada waktu itu bernama Jawatan PTT. Terjadi pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintah militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961, status Jawatan PTT berubah menjadi Perseroan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1978 mengubah status PN Pos dan Giro menjadi Perseroan Umum (Perum) Pos dan Giro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1984 dialihkan bentuknya menjadi Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Anggaran Dasar disusun sesuai dengan materi yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995, bahwa Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan:

1) Usaha jasa pos dan giro;
2) Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. GENERAL

1. a. Establishment and General Information

The first post office in Indonesia was established in Batavia by Governor General GW Baron on August 26, 1746. Which was then was called Bureau PTT. PTT Headquarter in Bandung was taken over by the Young Generation PTT from the Japanese military government. This date is celebrated as Postel Service Day (Hari Bakti Postel). Based on Government Regulation No. 240 of 1961, the status of PTT Bureau was changed into a State Enterprise (PN) Post and Telecommunications. In 1965, PN Post and Telecommunications was divided into to part, namely PN Post and Giro based on Government Regulation No. 29 of 1965, and PN Telecommunications based on Government Regulation No. 30 of 1995. Government Regulation No. 9 of 1978 changed the status of PN Post and Giro into Perum (Public Company) Post and Giro. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 5 dated February 27, 1995, Perum Post and Giro which was established through Government Regulation No. 24 of 1984 was changed its form to Limited Company as defined in Law No. 9 of 1969 regarding Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 1 of 1969 on State Business Forms. The Articles of Association were prepared in accordance with the material outlined in the Government Regulation No. 5 of 1995, wherein the Company was established with the sole purpose of conducting:

1) .Post and giro services;
2) Other businesses that support the implementation of postal and giro services in accordance with laws and regulations.

1. UMUM (Lanjutan)

1. a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) ("Perusahaan") ditetapkan dengan Akta Notaris Achmad Abid, S.H., sebagai pengganti Notaris Sutjipto, S.H., No. 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8182 HT.01.01 tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 Tambahan No. 7039 tanggal 22 Agustus 1995.

Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilakukan sesuai dengan Akta No. 164 tanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Notaris Sutjipto, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 tanggal 24 Desember 2008.

Perubahan terakhir pada tahun 2023 dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 27 September 2023 oleh Notaris Raisha Kinanti, S.H., M.Kn., di Bogor mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham terkait Perubahan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero). Perubahan tersebut mencakup, antara lain, penyesuaian Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pos Indonesia (Persero). Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU 0201976.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023.

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. a. Establishment and General Information** (Continued)*

The Articles of Association of PT Pos Indonesia (Persero) ("the Company") were established based on Notarial Deed No. 117 of Achmad Abid, S.H., in lieu of Notary Sutjipto, S.H., dated June 20, 1995, which was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia on in his Decree No. C2-8182 HT.01.01 of 1995 dated June 29, 1995 and was published in the State Gazette No. 67 of the Republic of Indonesia Supplement No. 7039 dated August 22, 1995.

The Company Articles's of Association have been amended several times. Amendments to the Company's articles of associations in accordance with law No. 40 of 2007 concern name limited liability Companies have been made in accordance with deed No. 164 dated August, 2008 before notary Sutjipto, S.H., and was approved by Ministry of Justice Human Rights through his degree No. AHU-78035.AH.01.02.TH.2008 dated December 24, 2008.

The latest amendment was in year 2023 by Notarial Deed No. 1 of Notary Raisha Kinanti, S.H., M.Kn., a notary in Bogor, dated September 27, 2023, regarding the Statement of Shareholders Decision related to the Amendment of the Article of Association of PT Pos Indonesia (Persero). The amendments include among others, the amendment Nomenclature of Position, Transfer of Tasks, and Appointment of Members of the Board of Directors of a Limited Liability Company PT Pos Indonesia (Persero). The deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision No. AHU-0201976.AH.01.11. Year 2023 dated October 11, 2023.

1. UMUM (Lanjutan)

1. a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Bandung dengan kantor pusat di Jalan Banda No. 30, Citarum, Bandung Wetan.

1. b. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan antara lain meliputi bidang usaha jasa pos dan giro termasuk jasa keuangan secara tunai maupun berbasis giro (*account*) bidang usaha jasa komunikasi, jasa logistik, jasa retail, jasa keagenan dan jasa-jasa lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bidang usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan.

1. c. Merek dan Logo

Perusahaan telah melakukan perubahan merek dan logo baru yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Nomor Surat: S-532/MBU/10/2023 perihal Persetujuan Perubahan Merek dan Logo PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 23 Oktober 2023

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. a. Establishment and General Information** (Continued)*

The Company is domicilied in Bandung with its headquarter at Jalan Banda No. 30, Citarum, Bandung Wetan.

1. b. Purposes and Objectives of the Company

According to Article 3 of the Articles of Association, the Company's scope of business activities includes postal and giro services which include financial services of cash-based or giro-based accounts, business communications services, logistics services, retail services, agency services and other services that support the execution of postal and giro services in accordance with the existing legislation and utilization and development of its resources to support the Company's business activities.

1. c. Brand and Logo

The Company has made changes to its brand and new company logo which have been approved by the Minister of State-Owned Enterprises with Letter No.: S-532/MBU/10/2023 regarding Approval of Changes to the Brand and Logo of PT Pos Indonesia (Persero) dated October 23, 2023.

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

1) Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perusahaan memiliki wilayah kerja dan lokasi regional sebagai berikut:

i. Regional 1 Medan 20004 meliputi wilayah kerja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung.

ii. Regional 2 Jakarta 10004 meliputi wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta dan Banten, kota Bogor, Bekasi dan Depok.

iii. Regional 3 Bandung 40004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Barat.

iv. Regional 4 Semarang 50004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

***1. GENERAL** (Continued)*

1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees

1) Organization Structure

In conducting its activities, the Company has regional working teritories as follows:

i. Regional 1 in Medan 20004 consists of working area Province of Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Riau Islands, South Sumatera, Jambi, Lampung, Bengkulu and Bangka Belitung Islands.

ii. Regional 2 in Jakarta 10004 consists of working area Province of DKI Jakarta and Banten, City of Serang, Bogor, Bekasi and Depok.

iii. Regional 3 in Bandung 40004 consists of working area Province of West Java.

iv. Regional 4 in Semarang 50004 consists of working area Province of Central Java and Special Province of Yogyakarta.

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

1) Struktur Organisasi (Lanjutan)

v. Regional 5 Surabaya 60004 meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

vi. Regional 6 Makassar 90004 meliputi wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Perubahan struktur organisasi ini didasari oleh kebutuhan strategi perusahaan (*Structure Follows Strategy*) guna memenuhi tuntutan strategis.

1. GENERAL *(Continued)*

1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees *(Continued)*

1) Organization Structure (Continued)

v. Regional 5 in Surabaya 60004 consists of working area Province of East Java, Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara.

vi. Regional 6 in Makassar 90004 consists of working area Province of West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, Maluku, North Maluku, Papua dan West Papua.

The change in organizational structure is based on the company's strategic needs (Structure Follows Strategy) to meet strategic demands.

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

2) Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-230/MBU/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan yang terakhir SK-261/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

2) Board of Commissioners and Director

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.: SK-230/MBU/10/2022 dated October 19, 2022 and most recently SK-261/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Rhenald Kasali	Rhenald Kasali	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Condro Kirono	Condro Kirono	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	-	M. Dayan Situmorang	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	-	Addin Jauharudin	*Independent Commissioner*
Komisaris	Robben Rico	Chalimah Pujihastuti	*Commissioner*
Komisaris	Guntur Iman Nefianto	Guntur Iman Nefianto	*Commissioner*
Komisaris	Gunawan Hutagalung	Gunawan Hutagalung	*Commissioner*

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-154/MBU/07/2022 dan yang terakhir SK-260/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.: SK-154/MBU/07/2022 and most recently SK-260/MBU/09/2023 dated September 21, 2023, the composition of the Board of Directors as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	21 September - 31 Desember/ *21 September - 31 December/* 2023	1 Januari - 21 September/ *1 January - 21 September* 2023	2022	
Dewan Direksi				***Board of Directors***
Direktur Utama	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi	Faizal Rochmad Djoemadi	*President Director*
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Endy P.R. Abdurrahman	Endy P.R. Abdurrahman	Endy P.R. Abdurrahman	*Director of Finance Risk Management*
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik	Tonggo Marbun	Siti Choiriana	Siti Choiriana	*Director of Courier and Logistic Business*
Direktur Bisnis Jasa Keuangan	Haris	Haris	Haris	*Director of Business Finance Services Business*
Direktur *Human Capital Management*	Asih Kurniasari Komar	Tonggo Marbun	Tonggo Marbun	*Director of Human Capital Management*
Direktur *Business Development* dan *Portfolio Management*	Prasabri Pesti	Prasabri Pesti	Prasabri Pesti	*Director of Business Development and Portofolio Management*
Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Hariadi	Hariadi	Hariadi	*Director of Operations and Information Technology*

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 84/DEKOM/0420 tanggal 20 Maret 2023 tentang pengangkatan kembali anggota komite audit PT Pos Indonesia (Persero), dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero) No. 233/DEKOM/0923 tanggal 27 September 2023, memberhentikan dengan hormat Maniaga Dayan Situmorang dan mengangkat Guntur Iman Negianto sebagai ketua merangkap anggota Komite Audit PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

3) *Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee*

Audit Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners Number 84/DEKOM/0420 dated 20 March 2023 concerning the re-appointment of PT Pos Indonesia (Persero) audit committee members and most recently based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal and Appointment of PT Pos Indonesia (Persero) Audit Committee Chairnan No. 233/DEKOM/0923 dated September 27, 2023, honorably dismissed Maniaga Dayan Situmorang and appointed Guntur Iman Negianto as chairman and member of PT Pos Indonesia (Persero) audit committee.

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Guntur Iman Nefianto	M. Dayan Situmorang	*Chairman*
Anggota	Prasojo	Prasojo	*Member*
Anggota	Venoneta Monetera	Venoneta Monetera	*Member*
Anggota	-	Guntur Iman Nefianto	*Member*

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 267/DEKOM/1022 tanggal 25 Oktober 2022 memberhentikan dengan hormat Ikhsan Baidirus dan mengangkat Gunawan Hutagalung sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 183/DEKOM/0623 tanggal 30 Juni 2023 memberhentikan dengan hormat Chalimah Pujihastuti dan mengangkat Gunawan Hutagalung sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi PT Pos Indonesia (Persero).

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

3) Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee (Continued)

Business and Investment Risk Management Monitoring Committee

Based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal and Appointment of Members of the Business and Investment Risk Management Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 267/DEKOM/1022 dated October 25, 2022 honorably dismissed Ikhsan Baidirus and appointed Gunawan Hutagalung as a member of PT Pos Indonesia (Persero) Business and Investment Risk Management Monitoring Committee.

Based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal and Appointment of Chairman of the Business and Investment Risk Management Monitoring Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 183/DEKOM/0623 dated June 30, 2023 honorably dismissed Chalimah Pujihastuti and appointed Gunawan Hutagalung as chairman and member of PT Pos Indonesia (Persero) Business and Investment Risk Management Monitoring Committee.

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees** (Continued)*

3) Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee (Continued)

Business and Investment Risk Management Monitoring Committee

The composition of the Business and Investment Risk Management Monitoring Committee (KPMRUI) as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Komite KPMRUI			***KPMRUI Committee***
Ketua	Gunawan Hutagalung	Chalimah Pujihastuti	*Chairman*
Anggota	Syaiful Siliganda	Ikhsan Baidirus	*Member*
Anggota	-	Gunawan Hutagalung	*Member*
Anggota	-	Dedit Satriyo Utomo	*Member*
Anggota	-	Ahmad Syarif Munawi	*Member*

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 141/DEKOM/0423 tanggal 18 April 2023 memberhentikan dengan hormat Dwi Winarno sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero).

Nomination and Remuneration Committee

Based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 141/DEKOM/0423 dated April 18, 2023 honorably dismissed Dwi Winarno as a member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pos Indonesia (Persero).

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

3) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi, Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

Komite Nominasi dan Remunerasi (Lanjutan)

Perubahan terakhir Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero) No. 266/DEKOM/1123 tanggal 20 November 2023 memberhentikan dengan hormat Condro Kirono dan mengangkat Robben Rico sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pos Indonesia (Persero).

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

1. GENERAL *(Continued)*

1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees *(Continued)*

3) *Audit Committee, Business and Investment Risk Management Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee (Continued)*

Nomination and Remuneration Committee *(Continued)*

The last amendment most recently based on Board of Commissioners Decree PT Pos Indonesia (Persero) regarding Dismissal and Appointment of Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pos Indonesia (Persero) No. 266/DEKOM/1123 dated November 20, 2023, Condro Kirono was honorably dismissed and Robben Rico was appointed as Chairman and Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pos Indonesia (Persero).

The composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Komite Nominasi dan Remunerasi			***Nomination and Muneration Committee***
Ketua	Robben Rico	Condro Kirono	*Chairman*
Anggota	Boy Bayu Idisondjaya	Addin Jauharudin	*Member*
Anggota	Oerip Soebagyo	Oerip Soebagyo	*Member*
Anggota	-	Dwi Winarno	*Member*

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)

4) Karyawan & Manajemen Kunci

Karyawan

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mempunyai karyawan masing-masing 15.783 dan 17.067 dengan rincian sebagai berikut:

1. GENERAL *(Continued)*

1. d. Organization Structure, Board of Commissioners, Directors and Employees *(Continued)*

4) *Employees & Key Personel*

Employees

As of December 31, 2023, the Group have 15,783 and 17,067 employees, respectively with the following details:

	2023	2022	
PT Pos Indonesia (Persero)	15.648	17.000	*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Pos Logistik Indonesia	58	15	*PT Pos Logistik Indonesia*
PT Pos Finansial Indonesia	22	12	*PT Pos Finansial Indonesia*
PT Pos Properti Indonesia	55	40	*PT Pos Properti Indonesia*
Jumlah	**15.783**	**17.067**	***Total***

Manajemen Kunci

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No SK-214Pada Tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mempunyai *key personel* dengan rincian sebagai berikut:

Key Personel

Based on the Decree of the Board of Directors No SK-214 as of December 31, 2023, the Company has key personnel with the following details:

Manajemen Kunci	2023	2022	***Key Personel***
Risk Management and Financial Policy	Endang Wahyudin	Endang Wahyudin	*Risk Management and Financial Policy*
Retail Business	Wilhelmina Lily Selanno	Wilhelmina Lily Selanno	*Retail Business*
Enterprise Business	Arifin Muchlis	Arifin Muchlis	*Enterprise Business*
Strategic Planning and Business Development	Ir. Wikandaru Mudjadi	Ir. Wikandaru Mudjadi	*Strategic Planning and Business Development*
International Post Service	Yanto Parulian Hutajulu	Yanto Parulian Hutajulu	*International Post Service*
Human Capital Policy and Strategy	Ika Wijayanti	Ika Wijayanti	*Human Capital Policy and Strategy*
Portfolio Management	Riharsono Prastyantoro	Riharsono Prastyantoro	*Portfolio Management*
Human Capital Services and Business Partner	Chandra Dewi	Chandra Dewi	*Human Capital Services and Business Partner*
Government and Corporate Business	Hendra Sari	Hendra Sari	*Government and Corporate Business*
Courier and Logistic Operation	Imam Pujono	Imam Pujono	*Courier and Logistic Operation*
Financial Operations and Business Partner	Vivi Sofiati	Asih Kurniasari Komar	*Financial Operations and Business Partner*
Information Technology	A. Winahyo Pratomo	A. Winahyo Pratomo	*Information Technology*
Fronting Management and Financial Transaction Service	Felix Heru Wibowo	Felix Heru Wibowo	*Fronting Management and Financial Transaction Service*
Consumer Business	Zuhed Nur	Zuhed Nur	*Consumer Business*
Wholesale and International Business	Arlia Irishtiana	Arlia Irishtiana	*Wholesale and International Business*
Internal Audit	Agus Trisyuwanto	Agus Trisyuwanto	*Internal Audit*

1. UMUM (Lanjutan)

1. d. Struktur Organisasi serta Susunan Direksi dan Dewan Komisaris (Lanjutan)

4) Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada bulan Desember 2022, Perusahaan menawarkan obligasi pada masyarakat (Catatan 18) yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor S-271/D.04/2022 atas Penawaran umum penerbitan Obligasi I PT Pos Indonesia (Persero) dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah utang obligasi yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp500.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. d. Organization Structure and Board of Directors and Commissioners** (Continued)*

5) *The Company's Bonds Public Offering*

On December 2022, the Company offered its bonds to the public (Note 18), which became effective by financial Services Authority (OJK) on December 20, 2022 based on Letter from OJK Number S-271/D.04/2022 for the public offering of the issuance of Bond I of PT Pos Indonesia (Persero) with a principal amount of Rp500,000,000,000 and has been listed on the Indonesia Stock Exchange on December 28, 2022.

On December 31, 2023, the amount of outstanding bond was Rp500,000,000,000 with the following details:

Obligasi/ *Bonds*	Jumlah/ *Amount*	Bunga per Tahun/ *Interest per Annum*	Tahun/ *Years*	Tanggal Penerbitan/ *Date of Issuance*	Jatuh Tempo/ *Due Date*
Obligasi I PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023					
Seri/Serie A (POST01A)	100.000.000.000	10,90%	3	28 Desember/ *December* 2022	28 Desember/ *December* 2025
Seri/Serie B (POST01B)	400.000.000.000	11,75%	5	28 Desember/ *December* 2022	28 Desember/ *December* 2027

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 persentase kepemilikan Perusahaan dan jumlah aset Entitas Anak adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (Continued)*

1. e. Subsidiaries Information

As of December 31, 2023 and 2022 the percentage of ownership of the Company and total asset of the Subsidiaries are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis Usaha/ *Nature of Business*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Tahun Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination* 2023	2022
Dimiliki langsung oleh Perseroan/*Held directly by the Company*						
PT Pos Finansial Indonesia ("PFI")	Indonesia	Bisnis jaringan, bisnis akses chaNnel dan *switching* dan bisnis *IT solution/ Network business, access channel and system switching business and IT solution business.*	54,76%	2019 D/h PT Bakti Wahana Net	123.766.890.726	95.590.279.061
PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")	Indonesia	Jasa transportasi, jasa pergudangan. Jasa pengiriman kargo dan *regulated agent* atau agen inspeksi/ *Transportation services, warehousing services, cargo delivery, regulated agent or inspection agent.*	99,80%	2012	459.483.236.297	351.063.544.570
PT Pos Properti Indonesia ("PPI")	Indonesia	Bidang properti / *Property business*	99,00%	2013	259.254.093.301	195.683.951.764
Dimiliki oleh PT Pos Logistik Indonesia ("PLI") / *Held through PT Pos Logistik Indonesia ("PLI")*						
PT Pos Properti Indonesia ("PPI")	Indonesia	Bidang properti / *Property business*	1,00%	2013	259.254.093.301	195.683.951.764

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred as "the Group".

PT Pos Finansial Indonesia (D/h PT Bhakti Wasantara Net) (PFI)

PT Pos Finansial Indonesia (D/h PT Bhakti Wasantara Net) ("PFI") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 dari notaris Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 2 April 2001. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-02567.HT.01.01.Th. 2001 tanggal 28 Juni 2001 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11 dan No. 1320 tanggal 5 Februari 2002 dan 24 April 2019.

PT Pos Finansial Indonesia (Formerly PT Bhakti Wasantara Net) (PFI)

PT Pos Finansial Indonesia (D/h PT Bhakti Wasantara Net) ("PFIy") was established based on Notarial Deed No. 7 of notary Ivonne Barnetha Sinyal, SH, Notary in Jakarta dated April 2, 2001. Deed of estabilishment was approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-02567.HT.01.01.Th.2001 dated June 28, 2001 and published in Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 11 and No. 1320 dated February 5, 2002. and April 24, 2019, respectively.

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 69 dari Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. Perusahaan mengubah nama PT Bhakti Wasantara Net menjadi PT Pos Finansial Indonesia. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PFI sebesar 54,76% dari modal ditempatkan dan disetor PFI dengan jumlah investasi sebesar Rp38.578.000.000 atau 38.578 lembar saham. Perubahan tersebut telah mendapat persetujan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0022339.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 24 April 2019.

PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 12 Januari 2012 dari Notaris Etic Srimartini, S.H., M.Kn, Notaris di Bandung. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PLI sebesar 99,80% dari modal ditempatkan dan disetor PLI, dengan jumlah investasi sebesar Rp174.000.000.000 atau 174.000 lembar saham. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-08351.AH.0101 TAHUN 2012, tanggal 17 Februari 2012 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 17 Februari 2012, tambahan No. 15392.

***1. GENERAL** (Continued)*

***1. e. Subsidiaries Information** (Continued)*

Based on Notarial Deed No. 69 of Notary Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn. the Company changed the name of PT Bhakti Wasantara Net to PT Pos Finansial Indonesia. The Company established and has an investment in PFI for 54.76% of the issued and paid-up capital of PFI, with a total investment of Rp38,578,000,000 or 38,578 shares. The Articles of Association was approved by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter Number AHU-0022339.AH.01.02 TAHUN 2019 dated April 24, 2019.

PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Based on Notarial Deed No. 9 dated January 12, 2012 from Notary Etic Srimartini, S.H., M.Kn, Notary in Bandung. The Company established and has an investment in PLI for 99.80% of the issued and paid-up capital of PLI, with a total investment of Rp174,000,000,000 or 174.000 shares. The deed of establishment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-08351.AH.0101 TAHUN 2012, dated February 17, 2012 and has been published in the State Gazette of Republic of Indonesia supplementary No. 34 dated February 17, 2012, addition No. 15392.

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan (Lanjutan)

Anggaran dasar PLI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris No. 05 tanggal 30 November 2023 dari Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notaris di Bandung mengenai perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PLI sesuai kesepakatan bersama, PLI melakukan *Debt to Equity Swap* atau konversi hutang pokok (*shareholder loan*) untuk menambah saham milik Perusahaan sebanyak 69.500 lembar saham atau setara dengan Rp69.500.000.000. Dengan adanya penambahan saham tersebut, maka yang semula saham milik Perusahaan sebanyak 174.000 lembar saham naik menjadi sebanyak 243.500 lembar saham atau setara dengan Rp243.500.000.000. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0153289 tanggal 10 Desember 2023.

PT Pos Properti Indonesia (PPI)

Berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 31 Desember 2013 dari Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notaris di Bandung. Perusahaan mendirikan dan memiliki penyertaan saham pada PPI sebesar 99,00% dari modal ditempatkan dan disetor PPI dengan jumlah investasi sebesar Rp99.000.000000 atau 99.000 lembar saham. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-14137.AH.01.01 TAHUN 2014 tanggal 25 April 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, tambahan No. 22310.

1. GENERAL *(Continued)*

1. e. Subsidiaries Information *(Continued)*

PLI's article of association has been amended several times, most recently by Notarial deed No. 05 dated November 30, 2023 by Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notary in Bandung, concerning in change of Article 4 in accordance with mutual agreement, PLI carried out a Debt to Equity Swap or conversion of principal debt (shareholder loan) to increase the shares owned by the Company by 69,500 shares or equivalent to Rp69,500,000,000. With the addition of these shares, the original shares are owned by the Company increased from 174,000 shares to 243,500 shares or equivalent of Rp243,500,000,000. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Law Administration in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0153289 dated December 10, 2023.

PT Pos Properti Indonesia (PPI)

Based on Notarial Deed No. 35 dated December 31, 2013 by Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Notary in Bandung. The Company established and has an investment in PPI for 99.00% of the issued and paid-up capital of PPI with a total investment of Rp99,000,000,000 or 99,000 shares. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-14137.AH.01.01 TAHUN 2014 dated April 25, 2014 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 47 dated June 13, 2014, addition No. 22310.

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Informasi tentang Entitas Anak Perusahaan (Lanjutan)

Anggaran dasar PPI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris No. 01 tanggal 13 Desember 2021 dari Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Bandung, mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PPI. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0485410 TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021.

1. GENERAL *(Continued)*

1. e. Subsidiaries Information *(Continued)*

PPI's article of association has been amended several times, most recently by Notarial deed No. 01 dated December 13, 2021 by Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Bandung, regarding changes in the composition of Commissioner and Directors of the PPI. This change was received and recorded in the legal entity administration system of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Directorate General of General Law Administration in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0485410 TAHUN 2021 dated December 14, 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

2. a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK–IAI"), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Publik.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

2. a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant ("FASB-IIA"), and regulations in the Capital Market No. VIII G.7 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies and in conformity with Financial Accounting Standard established by the Indonesian Institute of Accountants. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.

The accounting policies applied are consistent with those of the annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023 which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan Manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2023, Group menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Group telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and asumptions. It also requires Management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards

Effective January 1, 2023, the Group adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Penerapan standar baru dan Amendemen yang relevan dengan operasi Grup adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 – Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Penyesuaian PSAK 16 - Aset tetap: tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25 - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46 - Pajak penghasilan tentang Pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal.

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

  DSAK-IAI mengubah PSAK 1, 'Penyajian Laporan Keuangan', untuk mengharuskan Grup mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang material daripada kebijakan akuntansi yang signifikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Group's operations are as follows:

- *Amendment to SFAS 1 - Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Annual Improvement to SFAS 16- Fixed assets regarding proceeds before intended use;*
- *Amendment to SFAS 25 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: regarding Definition of Accounting Estimates; and*
- *Amendment to SFAS 46 - Income tax regarding Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction.*

Impact of adoption to these new accounting standards are follows:

- *Amendment to SFAS 1: Presentation of Financial Statements*

  The FASB-IAI amended SFAS 1, 'Presentation of Financial Statements', to require Group to disclose their material accounting policy information rather than their significant accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan)

"Informasi kebijakan akuntansi adalah material, jika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang termuat dalam laporan keuangan entitas, dapat diperkirakan secara wajar dapat mempengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum yang diambil atas dasar laporan keuangan tersebut."

Amendemen ini juga mengklarifikasi bahwa informasi kebijakan akuntansi dianggap material jika, tanpa informasi tersebut, pengguna laporan keuangan tidak dapat memahami informasi material lainnya dalam laporan keuangan.

` Lebih lanjut, amandemen PSAK 1 mengklarifikasi bahwa informasi kebijakan akuntansi yang tidak material tidak perlu diungkapkan. Namun, jika diungkapkan, informasi tersebut tidak boleh mengaburkan informasi kebijakan akuntansi yang material.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

Impact of adoption to these new accounting standards are follows: (Continued)

- *Amendment to SFAS 1: Presentation of Financial Statements (Continued)*

"Accounting policy information is material if, when considered together with other information included in an entity's financial statements, it can reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general-purpose financial statements make on the basis of those financial statements."

The amendment also clarifies that accounting policy information is expected to be material if, without it, the users of the financial statements would be unable to understand other material information in the financial statements.

Further, the amendment to SFAS 1 clarifies that immaterial accounting policy information need not be disclosed. However, if it is disclosed, it should not obscure material accounting policy information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

  Amendemen PSAK 25, 'Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan', mengklarifikasi bagaimana Grup harus membedakan perubahan kebijakan akuntansi dari perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi didefinisikan sebagai jumlah moneter dalam laporan keuangan yang tunduk pada ketidakpastian pengukuran. Pembedaan ini penting, karena perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif untuk transaksi masa depan dan peristiwa masa depan lainnya, sedangkan perubahan kebijakan akuntansi umumnya diterapkan secara retrospektif untuk transaksi masa lalu dan peristiwa masa lalu lainnya serta periode berjalan.

- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan

  PSAK 16, 'Aset Tetap', mensyaratkan bahwa hasil yang diterima dari penjualan hasil produksi yang dihasilkan sebelum aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya, diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi. Biaya produksi yang terkait diukur dengan menggunakan panduan dalam PSAK 14, 'Persediaan', dan diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat penjualan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

- *Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates*

  The amendment to SFAS 25, 'Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors', clarifies how Group should distinguish changes in accounting policies from changes in accounting estimates. Accounting estimates are defined as monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty. The distinction is important, because changes in accounting estimates are applied prospectively to future transactions and other future events but changes in accounting policies are generally applied retrospectively to past transactions and other past events as well as the current period.

- *Amendment to SFAS 16: Fixed Assets – Regarding Proceeds before Intended Use*

  SFAS 16, 'Fixed Assets', requires the proceeds received from selling output produced before the asset is ready for its intended use to be recognized as income in profit or loss. The related cost of producing the output is measured using the guidance in SFAS 14, 'Inventories', and it is recognised as an expense in profit or loss when sold.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan (Lanjutan)

  Jika barang yang dijual merupakan hasil dari aktivitas normal entitas, maka pendapatan dan biaya diungkapkan sesuai dengan persyaratan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dan PSAK 14. Jika barang yang dijual bukan merupakan bagian dari aktivitas normal entitas, maka amendemen PSAK 16 mensyaratkan pengungkapan jumlah dan pos dalam laporan laba rugi komprehensif dimana pendapatan dan biaya tersebut dimasukkan.

  Amendemen PSAK 16 juga mengklarifikasi bahwa entitas 'menguji apakah aset berfungsi dengan baik' ketika entitas menilai kinerja teknis dan fisik aset. Kinerja keuangan aset tidak relevan dengan penilaian ini. Oleh karena itu, suatu aset mungkin dapat beroperasi sesuai dengan tujuan Manajemen dan dikenakan penyusutan sebelum mencapai tingkat kinerja operasi yang diharapkan oleh Manajemen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

- *Amendment to SFAS 16: Fixed Assets – Regarding Proceeds before Intended Use (Continued)*

  If the items sold are the output of an entity's ordinary activities, the income and cost are disclosed in accordance with the requirements of SFAS 72, 'Revenue from Contracts with Customers', and SFAS 14. If the items sold are not part of an entity's ordinary activities, the amendment to SFAS 16 requires the disclosure of the amount and line item(s) in the statement of comprehensive income in which such proceeds and cost have been included.

  The amendment to SFAS 16 also clarifies that an entity is 'testing whether the asset is functioning properly' when it assesses the technical and physical performance of the asset. The financial performance of the asset is not relevant to this assessment. Therefore an asset might be capable of operating as intended by Management and subject to depreciation before it has achieved the level of operating performance expected by Management.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Atas Transaksi Tunggal

  DSAK-IAI telah mengamendemen PSAK 46, 'Pajak Penghasilan', untuk mengharuskan Grup mengakui pajak tangguhan atas transaksi tertentu yang pada saat pengakuan awal menimbulkan jumlah yang sama antara perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Amendemen ini biasanya akan diterapkan pada transaksi seperti sewa untuk penyewa dan kewajiban penghentian operasi.

  Paragraf 15 dan 24 dari PSAK 46 telah diamendemen untuk memasukkan kondisi tambahan di mana pengecualian pengakuan awal tidak diterapkan. Menurut pedoman yang diamandemen, perbedaan temporer yang timbul pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas tidak tunduk pada pengecualian pengakuan awal jika transaksi tersebut menimbulkan jumlah yang sama antara jumlah kena pajak dan jumlah yang dapat dikurangkan dari perbedaan temporer.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup, didiskusikan di Catatan 37.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements *(Continued)*

- *Amendment of PSAK 46: Income Taxes regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*

  The FASB-IAI has amended SFAS 46, 'Income Taxes', to require Group to recognize deferred tax on particular transactions that, on initial recognition, give rise to equal amounts of taxable and deductible temporary differences. The amendments will typically apply to transactions such as leases for the lessee and decommissioning obligations.

  Paragraphs 15 and 24 of SFAS 46 were amended to include an additional condition where the initial recognition exemption is not applied. According to the amended guidance, a temporary difference that arises on initial recognition of an asset or liability is not subject to the initial recognition exemption if that transaction gave rise to equal amounts of taxable and deductible temporary differences.

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2023 and have not been early adopted by the Group, are discussed in Note 37.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas

a. Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting

a. Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas (Lanjutan)

a. Entitas Anak (Lanjutan)

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui dalam laporan laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dalam laporan laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting *(Continued)*

a. Subsidiaries (Continued)

The Group recognizes any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly in the income statement.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or liability are recognized in accordance with SFAS 55 (revised 2014) "Financial Instrument: Recognition and Measurement" in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas (Lanjutan)

a. Entitas Anak (Lanjutan)

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi. Pihak pengakusisi mungkin telah mengakui perubahan nilai wajar atas kepentingan ekuitasnya dalam penghasilan komprehensif lain. Jika demikian, jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakusisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Jika diperlukan, nilai yang dilaporkan oleh entitas anak telah diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting *(Continued)*

a. Subsidiaries (Continued)

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss. The acquirer may have recognized changes in the value of its equity interest in other comprehensive income. If so, the amount that was recognized in other comprehensive income shall be recognized on the same basis as would be required if the acquirer has disposed directly of the previously held equity interest.

Intercompany transactions, balances and unrealized gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealized losses are also eliminated. If necessary, amounts reported by subsidiaries have been adjusted to conform to the Group's accounting policies.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas (Lanjutan)

b. Perubahan Kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan non-pengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting *(Continued)*

b. Changes in Ownership Interests

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognized in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognized in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Prinsip atas Akuntansi Konsolidasi dan Ekuitas (Lanjutan)

b. Perubahan Kepemilikan (Lanjutan)

Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Jika kepemilikan saham pada ventura bersama atau perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba atau rugi jika diperlukan.

2. d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. c. Principles of Consolidation and Equity Accounting *(Continued)*

b. Changes in Ownership Interests (Continued)

In addition, any amounts previously recognized in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

If the ownership interest in a joint venture or an associate is reduced but joint control or significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate.

2. d. Business Combinations

Business combination is a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the periods in which the costs are incurred and the services are received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. d. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila pada periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. d. Business Combinations *(Continued)*

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Component of non-controlling interests are measured either at fair value or at the present ownership instruments' proportionate share in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieve in stages, the Group's previously held equity interest in the acquire is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. When in prior periods, a changes in the value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income date, the amount shall be recognized on the same basis as would be required if the Group had desposed directly of the previously held equity interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. d. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berakibat terhadap pengakuan aset dan liabilitas dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap kepentingan non-pengendali, atas (b) jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi entitas anak setelah sebelumnya Manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. d. Business Combinations *(Continued)*

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. In its financial statements, during the measurement period the acquirer adjust, recognized additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, goodwill is measured at its cost being the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred and the amount of any non-controlling interest, over (b) the net of identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the Management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. d. Kombinasi Bisnis (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugiaan dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

2. e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan konsolidasian diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. d. Business Combinations *(Continued)*

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, be allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill has been allocated to Cash Generating Units and certain operations on the Cash Generating Units is disposed, the goodwill associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the operation disposed of and the portion of the Cash Generating Units retained.

2. e. Foreign Currency Transaction and Balances

The consolidated financial statements is measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group and the presentation currency for the consolidated financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut;
- Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali; dan
- Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. e. Foreign Currency Transaction and Balances *(Continued)*

In preparing the consolidated financial statements, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each the reports:

- *Monetary items in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date;*
- *Non-monetary items measured at historical cost in foreign currencies are not retranslated; and*
- *Non-monetary item in foreign currencies measured at fair value are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined.*

At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current year profit or loss. The exchange rates used were as follows:

	2023	2022	
Mata Uang Asing			***Foreign Currency***
1 Poundsterling Inggris (GBP)	19.760,25	18.925,98	*GB Poundsterling 1 (GBP)*
1 Euro (EUR)	17.139,52	16.712,63	*Euro 1 (EUR)*
1 Franc Swiss (CHF)	18.374,28	16.967,98	*Swiss Franc 1 (CHF)*
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15.416,00	15.731,00	*US Dollar 1 (USD)*
1 Dolar Singapura (SGD)	11.711,64	11.659,08	*Singapore Dollar 1 (SGD)*
1 Yen Jepang (JPY)	109,55	117,57	*Japan Yen1 (JPY)*

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah, dan dicatat sesuai dengan "kurs pajak mingguan" yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

Furthermore, for the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) denominated in foreign currency will be paid in Rupiah and are recorded using "weekly tax rate" prevailing at the date of issuance of respected tax invoice.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan dan Entitas Anak yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. f. Transaction with Related Parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
   a) Has control or joint control over the reporting entity;
   b) Has significant influence over the reporting entity; or
   c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applied:
   a) The entity and the reporting entity are members of the Company and Subsidiaries (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).
   b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of the Group of which the other entity is a member).
   c) Both entities are joint ventures of the same third party.
   d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
   g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. f. Transaction with Related Parties *(Continued)*

2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applied: (Continued)
   e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
   g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity)
   h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham Entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan (Catatan 26).

2. g. Aset Keuangan

a) Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. f. Transaction with Related Parties *(Continued)*

Government related entity can be an entity which controlled or significanty influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the financial statements (Note 26).

2. g. Financial Assets

a) Classification

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- *those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. g. Aset Keuangan (Lanjutan)

a) Klasifikasi (Lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

b) Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. g. Financial Assets *(Continued)*

a) Classification *(Continued)*

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

b) Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. g. Aset Keuangan (Lanjutan)

b) Pengukuran (Lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran dimana grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. g. Financial Assets *(Continued)*

b) Measurement *(Continued)*

Debt instrument

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari kas ditangan, kas di bank (rekening giro) dan deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

2. i. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the consolidated statements of financial position consists of cash on hand, cash in banks and short-term deposits with a maturity of three months or less at the time of placements and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

2. i. Trade and Other Receivables

Trade receivables are amounts due from customers for merchandise sold or services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. j. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

2. k. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. j. Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankcrupty of the Group or the counterparty.

2. k. Impairment of Financial Assets

The Group applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECL") which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies general model to ensure ECL.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Definisi Gagal Bayar

Grup menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- Ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Grup, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Grup).

Terlepas dari analisis di atas, Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Grup menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. k. Impairment of Financial Assets *(Continued)*

Definition of Default

The Group considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- *When there is a breach of financial covenants by the debtor; or*
- *Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Group, in full (without taking into account any collateral held by the Group).*

Irrespective of the above analysis, the Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan Penghapusan

Grup menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau untuk hal piutang usaha, ketika jumlahnya sudah lebih dari 120 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas penagihan dalam prosedur pemulihan Grup, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

2. l. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. k. Impairment of Financial Assets *(Continued)*

Write-off Policy

The Group writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, or in the case of trade accounts receivable, when the amounts are over 120 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Group's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

2. l. Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. l. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (Lanjutan)

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai *FVTOCI*, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, direklasifikasi ke laba rugi.

Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih Grup pada pengakuan awal untuk diukur di *FVTOCI*, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

2. m. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*). Penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. l. Derecognition of Financial Assets *(Continued)*

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of an investment in a debt instrument classified as at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is reclassified to profit or loss.

In contrast, on derecognition of an investment in an equity instrument which the Group has elected on initial recognition to measure at FVTOCI, the cumulative gain or loss previously accumulated in the investment revaluation reserve is not reclassified to profit or loss, but is transferred to retained earnings.

2. m. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Acquisition cost is determined by the first-in first-out method. Allowance for obsolescence and/or impairment of inventory is determined to reduce the carrying value of inventories to net realizable value.

Net realizable value is the estimated sales price in the normal course of business less estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. n. Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada beban usaha sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan.

Uang muka adalah bagian dari kontrak yang dibayarkan atau diterima di muka untuk barang atau jasa. Uang muka dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan.

2. o. Aset Tetap

Grup menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika kriteria pengakuan. Sebaliknya pada saat inspeksi utama dilakukan, biaya itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. n. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are amortized and charged to operating expenses over the periods benefited.

Advances is the portion of a contract paid or received in advance for goods or services. Advances are recorded as asset on the consolidated statements of financial position.

2. o. Fixed Assets

The Group use the cost model for fixed assets measurement.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment value, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred if the recognition criteria are met. On the other hand when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as replacement if the recognition criteria are satisfied.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operation, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. o. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda (*double declining method*) untuk inventaris dan kendaraan bermotor selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. o. Fixed Assets *(Continued)*

Depreciation is calculated based on the straight-line method for buildings and the double declining method for inventory and vehicles during the useful life of fixed assets as follows:

Jenis aset tetap	**Tahun/*Years***	***Type of fixed assets***
Gedung	20 Tahun/*Years*	*Buildings*
Inventaris Kelompok 1	4 Tahun/*Years*	*Office Equipment Group 1*
Inventaris Kelompok 2	8 Tahun/*Years*	*Office Equipment Group 2*
Inventaris Kelompok 3	16 Tahun/*Years*	*Office Equipment Group 3*
Kendaraan Bermotor Kelompok 1	4 Tahun/*Years*	*Vehicles Group 1*
Kendaraan Bermotor Kelompok 2	8 Tahun/*Years*	*Vehicles Group 2*

Di dalam pencatatan Grup, tidak terdapat masa manfaat ekonomis di inventaris yang lebih dari 16 tahun.

In the Group's records, there is no economic useful life of office equipment that is more than 16 years.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan sebagai bagian dari akun "Aset takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hak dan umur ekonomis tanah.

Land is stated at cost and is not depreciated. The legal cost of land rights when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and is not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights are recognized as deferred charges as part of "Intangible Assets" account in the consolidated statement of financial position and are amortized over the shorter of the right's life and land's economic life.

Gedung dinyatakan berdasarkan biaya perolehan awal aset tersebut ditambahkan dengan biaya perbaikan selama aset tersebut dipergunakan. Grup tidak mengkapitalisasikan biaya pengecatan atas gedung ke dalam nilai perolehan aset. Umur ekonomis gedung adalah 20 tahun, terhitung pada saat gedung tersebut dan perbaikannya mulai digunakan.

Buildings are stated based on the initial cost of the asset plus the cost of repairs if the asset is in use. The Group does not capitalize the cost of painting the buildings into the acquisition value of assets. The economic life of the building is 20 years, from the time the building and its repairs to the building are used.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. o. Aset Tetap (Lanjutan)

Inventaris dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok dengan batas minimal kapitalisasi aset minimal sebesar Rp1.000.000. Masa manfaat ekonomis untuk kategori inventaris kelompok 1 adalah 4 tahun, inventaris kelompok 2 adalah 8 tahun dan inventaris kelompok 3 adalah 16 tahun. Grup tidak memiliki barang inventaris yang memiliki umur manfaat ekonomis lebih dari 16 tahun.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan. Jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap dan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu secara prospektif, jika sesuai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. o. Fixed Assets *(Continued)*

Office equipment is grouped into 3 types of group with a minimum asset capitalization limit of at least Rp1,000,000. The economic useful life for office equipment category group 1 is 4 years, office equipment group 2 is 8 years and office equipment group 3 is 16 years. The Group does not have any office equipment that has an economic useful life of more than 16 years.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of property and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the consolidated statement of comprehensive income in the year the item is derecognized.

At the end of each financial period, the assets' residual values, useful life and method of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate.

Assets in progress are stated at cost and disclosed as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa

Suatu sewa di mana porsi yang signifikan atas risiko dan manfaat kepemilikan aset masih tetap berada di tangan *lessor*, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi dengan insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset tetap di mana entitas memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum, jika nilai kini jumlahnya lebih dari nilai wajar.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Apabila perjanjian mengandung sewa, entitas akan menilai apakah perjanjian sewa tersebut adalah sewa pembiayaan atau sewa operasi. Jika suatu perjanjian mengandung sewa, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, sebaliknya akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the consolidated statement of comprehensive income on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases of fixed assets where the entity substantially has all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments.

The determination whether an agreement is, or contains, a lease is based on the substance of the agreement at the lease commencement date and whether the fulfilment of the agreement is dependent on the use of a specific asset and the agreement conveys a right to use the asset. If an agreement contains a lease, the entity will assess whether such a lease is finance or operating lease. If an agreement contains a lease, a lease that transfers substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item is classified as a finance lease, otherwise it is classified as an operating lease.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara bagian yang merupakan pelunasan liabilitas dan bagian yang merupakan beban keuangan sedemikian rupa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo pembiayaan. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas setiap periode.

Laba (rugi) penjualan akibat transaksi *sales and leaseback* atas aset sewa guna usaha dengan metode *capital lease* ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional sepanjang umur manfaat aset sewa guna usaha yang bersangkutan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset sewa diakui pada dalam laporan dari sewa pembiayaan dimana sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset.

Kebijakan penyusutan aset sewa guna menggunakan metode garis lurus selama masa kontrak aset tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease *(Continued)*

Each lease payment is allocated between the liability and finance costs to achieve a constant rate of interest on the outstanding finance balance. The interest element of the finance cost is charged to the consolidated statements of comprehensive income over the lease period to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Gain (loss) on sales and leaseback transaction of leased asset by capital lease method is deferred and amortized proportionally during the useful life of leased assets and is calculated using straight-line method.

Leased assets are recognized in a report from a finance lease where the lease transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset.

Depreciation policy for leased assets uses the straight-line method during the contract period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Perusahaan menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk jangka waktu tetap 3 hingga 5 tahun tetapi mungkin memiliki perpanjangan.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease *(Continued)*

The Company as a Lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

The Company leases certain fixed asset. Rental contracts are typically made for fixed periods of 3 to 5 years but may have extension.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

Bunga pinjaman inkremental bergantung pada jangka waktu, mata uang dan tanggal mulai sewa, dan ditentukan berdasarkan serangkaian input, termasuk: tingkat bebas risiko berdasarkan suku bunga obligasi pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; penyesuaian risiko kredit berdasarkan imbal hasil obligasi; dan penyesuaian khusus entitas ketika profil risiko entitas yang melakukan perjanjian sewa berbeda dengan Perusahaan dan sewa tersebut tidak memperoleh manfaat atas jaminan dari Perusahaan.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya mencerminkan pelaksanaan pembelian opsi, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak pakai juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi di bagian Penurunan Nilai aset non-keuangan.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, awalnya diukur menggunakan indeks atau tarif pada tanggal dimulainya;
- jumlah yang diharapkan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease *(Continued)*

The Company as a Lessee (Continued)

The incremental borrowing rate depends on the term, currency and start date of the lease and is determined based on a series of inputs including: the risk-free rate based on government bond rates; a country-specific risk adjustment; a credit risk adjustment based on bond yields; and an entity-specific adjustment when the risk profile of the entity that enters into the lease is different to that of the Company and the lease does not benefit from a guarantee from the Company.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Impairment of non-financial assets section.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk melaksanakannya opsi, dan
- pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk mereflesikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease *(Continued)*

The Company as a Lessee (Continued)

- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under SFAS 57. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Perusahaan menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga tidak diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa dan aset hak-guna. Pembayaran terkait diakui sebagai beban dalam periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi dan dicatat dalam pos "Beban umum dan administrasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease *(Continued)*

The Company as a Lessee (Continued)

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The Company applies SFAS 48 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

Variable rents that do not depend on an index or rate are not included in the measurements of the lease liability and the right-of-use asset. The related payments are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers those payments occur and are included in the line "General and administrative expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. p. Sewa (Lanjutan)

Perusahaan sebagai Penyewa (Lanjutan)

Opsi Perpanjangan dan Penghentian

Opsi perpanjangan dan penghentian termasuk dalam sejumlah properti dan peralatan sewa Perusahaan. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan penghentian yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan dan bukan oleh *lessor* yang bersangkutan.

2. q. Properti Investasi

Properti investasi diukur dengan model biaya (*cost model*) dan selanjutnya model revaluasi (*revaluation model*). Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administrasi atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Grup merevaluasi atas aset properti investasi. Revaluasi aset properti investasi bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk pelaporan komersial.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. p. Lease *(Continued)*

The Company as a Lessee (Continued)

Extension and Termination Options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases of the Company. These terms are used to maximize operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Company and not by the respective lessor.

2. q. Investment Properties

Investment properties are measured on cost model and then fair value model. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties if the recognition criteria are met and excludes the daily costs on their usage.

Investment properties consist of land and building controlled by the Group which are held to earn rentals or for capital appreciation or both, and not to be used in the production or supply of goods or services for administrative purposes or sale in the daily business activities.

The Group have revalued its investment property. Revaluation of investment property is not for tax purposes but only for commercial reporting.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. q. Properti Investasi (Lanjutan)

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Setelah pengakuan awal, properti investasi dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi yang sedang dalam pengembangan ulang untuk penggunaan lebih lanjut sebagai properti investasi atau ketika pasar menjadi kurang aktif tetap dicatat sebesar nilai wajarnya. Properti investasi dalam konstruksi diukur menggunakan nilai wajar jika nilai wajar dianggap dapat diukur secara andal. Properti investasi dalam konstruksi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tetapi Grup mengharapkan nilai wajarnya dapat diukur secara andal ketika konstruksi selesai, diukur senilai biaya dikurangi penurunan nilai sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal atau konstruksi diselesaikan – yang mana yang lebih awal.

Terkadang sulit untuk mengukur secara andal nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi. Untuk mengevaluasi apakah nilai wajar dari properti investasi dalam konstruksi dapat diukur secara andal, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, provisi dari kontrak konstruksi, tahap penyelesaian, apabila properti standar (umum di pasaran) atau tidak standar, tingkat keandalan arus kas masuk setelah penyelesaian, risiko pengembangan spesifik atas properti, pengalaman terdahulu dengan konstruksi serupa dan status izin konstruksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. q. Investment Properties *(Continued)*

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

After initial recognition, investment property is carried at fair value. Investment properties that is being redeveloped for continuing use as investment property or for which the market has become less active continues to be measured at fair value. Investment properties under construction is measured at fair value if the fair value is considered to be reliably determinable. Investment properties under construction for which the fair value cannot be determined reliably, but for which the Group expects that the fair value of the property will be reliably determinable when construction is completed, are measured at cost less impairment until the fair value becomes reliably determinable or construction is completed - whichever is earlier.

Reliably measuring the fair value of investment properties under construction can be challenging at times. To evaluate the feasibility of accurately assessing the fair value of these properties, the Management considers several factors. These factors include provisions outlined in construction contracts, the stage of completion, whether the property is considered standard (commonly found in the market) or non-standard, the reliability of incoming cash flows after completion, specific development risks associated with the property, experience with similar construction projects and the status of construction permits.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. q. Properti Investasi (Lanjutan)

Nilai wajar ditetapkan berdasarkan harga pasar aktif, dan dapat disesuaikan jika terdapat perbedaan dalam karakteristik, lokasi, atau kondisi aset. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan. Penilaian dilakukan pada tanggal neraca oleh penilai ahli dengan kualifikasi yang diakui dan relevan dan memiliki pengalaman terbaru atas lokasi dan kategori dari properti investasi dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

Penambahan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai tercatat aset hanya ketika ada keuntungan ekonomi di masa yang akan datang dapat dinikmati oleh Grup dari penambahan tersebut dan hal tersebut dapat diukur secara andal. Biaya perbaikan dan perawatan lainnya akan menjadi biaya saat terjadi. Ketika bagian dari properti investasi digantikan, nilai tercatat dari bagian yang digantikan tersebut akan dihapus.

Perubahan nilai wajar diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Properti investasi berhenti diakui ketika dilepas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. q. Investment Properties *(Continued)*

The fair value is determined based on active market prices, and being adjusted with differences in the characteristics, location, or condition of the asset, if any. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections. Valuations are performed as of the financial position date by professional appraiser who hold recognized and relevant professional qualifications and have recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Subsequent expenditure is capitalized to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

Changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Investment properties are derecognized when they have been disposed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. q. Properti Investasi (Lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Perpindahan ke properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Perpindahan dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Jika properti yang digunakan pemilik berubah menjadi properti investasi yang akan dicatat dengan menggunakan nilai wajar, maka entitas menerapkan PSAK 16: Aset Tetap untuk properti yang dimiliki dan PSAK 73: Sewa untuk properti yang dikuasai oleh penyewa sebagai aset hak guna sampai dengan tanggal perubahan penggunaannya. Entitas memperlakukan selisih pada tanggal tersebut antara jumlah tercatat properti berdasarkan PSAK 16 atau PSAK 73 dan nilai wajarnya dengan cara yang sama sebagaimana revaluasi sesuai dengan PSAK 16.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. q. Investment Properties *(Continued)*

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.

Transfer to investment properties is carried out if and only if there is a change of use as indicated by the end of use by the owner, the commencement of operating leases to other parties or the completion of construction or development. Transfer from investment properties are carried out if and only if there is a change of use as indicated by the commencement of owner-use or commencement of development for sale.

If an owner-occupied from investment property becomes an investment property that will carried at fair value an entity shall apply SFAS 16 for owned property and SFAS 73 for property held by a lease as a right-of-use asset up to the date of change in use. The entity shall treat any difference at that date between the carrying amount of the property in accordance with SFAS 16 or SFAS 73 and its fair value in the same way as a revaluation in accoordance with SFAS 16.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. r. Aset Takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada saat pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya aset takberwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai jika ada. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi tidak dikapitalisasi dan pengeluarannya tercermin dalam laporan laba rugi pada tahun di mana pengeluaran tersebut terjadi.

Masa manfaat dari aset takberwujud dapat dianggap memiliki masa manfaat terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset takberwujud. Aset takberwujud Grup memiliki taksiran masa umur manfaat ekonomis selama 5 tahun.

Perubahan masa manfaat yang diharapkan atau pola yang diharapkan dari konsumsi manfaat ekonomi masa depan aset takberwujud tersebut dicatat dengan mengubah periode amortisasi atau metode yang sesuai dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam kategori biaya sesuai dengan fungsi dari aset takberwujud.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. r. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets including capitalized development cost are not capitalized and expenditure is reflected in profit or loss in the year in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed either restricted or unrestricted. Intangible assets with restricted lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that intangible assets may be impaired. The Group intangible assets have estimated useful live of 5 years.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are recorded by changing the amortization period or method as appropriate and are treated as changes in accounting estimates. The amortization of intangible assets with definite lives is recognized in consolidated profit or loss in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. r. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya baik secara individual maupun pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa manfaat tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat tidak terbatas terus mendukung. Jika tidak ada perubahan, masa manfaat dari tak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Ketika dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi, aset perusahaan juga dialokasikan ke masing masing kelompok unit penghasil kas, atau sebaliknya mereka dialokasikan ke kelompok terkecil dari kelompok unit penghasil kas di mana dasar alokasi yang wajar dan konsisten dapat diidentifikasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. r. Intangible Assets *(Continued)*

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized but are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to definite is made on a prospective basis. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss when the asset is derecognized.

2. s. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where the asset does not generate cash flows that are independent from other assets, the Group estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. When a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation basis can be identified.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Lanjutan)

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dan aset tak berwujud yang belum tersedia untuk digunakan diuji penurunan nilainya setiap tahun dan ketika terdapat indikasi penurunan nilai.

Jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dengan estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut disajikan pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. s. Impairment of Non-Financial Assets *(Continued)*

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment annually, and whenever there is an indication that the asset maybe impaired.

Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. t. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai *FVTPL* atau pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai *FVTPL*, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. t. Financial Liabilities

Financial liabilities are classified as either financial liabilities "at FVTPL" or "at amortized cost" using the effective interest method.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. u. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

2. v. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. u. Trade Payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

2. v. Borrowings

Borrowings are recognized initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. v. Pinjaman (Lanjutan)

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. v. Borrowings *(Continued)*

Borrowing cost are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognized in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. w. Biaya Pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

2. x. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. w. Borrowing Cost

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying assets, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying assets.

2. x. Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. x. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Ketika Grup bertukar dengan pemberi pinjaman, satu instrumen utang menjadi instrumen lain dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup memperhitungkan modifikasi substansial dari ketentuan liabilitas yang ada atau bagian dari liabilitas tersebut sebagai pelepasan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas baru. Diasumsikan bahwa persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi setiap *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika modifikasi tidak substansial, maka perbedaan antara: (1) jumlah tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini dari arus kas setelah modifikasi, diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

2. y. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. x. Derecognition of Financial Liabilities *(Continued)*

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with the substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10% different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognized in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

2. y. Provision

Provisions are recognized when the Group have a present obligation (legal or constructive) as a result if because of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits can be made to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. y. Provisi (Lanjutan)

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

2. z. Imbalan Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“UU 13/2003”) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 11/2020”), Grup disyaratkan untuk memberikan imbalan pensiun sekurang-kurangnya seperti imbalan pensiun yang diatur dalam UU 11/2020, yang pada dasarnya adalah program imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai UU lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. y. Provision *(Continued)*

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

2. z. Employee Benefits

In accordance with the Manpower Act No. 13/2003 ("Law 13/2003") as amended through Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation ("Law 11/2020"), the Group is required to provide pension benefits at least as regulated in Law 11 /2020, which is basically a defined benefit plan. If the pension benefit under the Law is greater than the existing pension plan, the difference is recognized as part of the pension benefit liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. z. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers mengenai "Pengatribusian imbalan pada periode jasa" dan oleh karena itu Grup mengubah kebijakan terkait dengan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 24 "Imbalan Kerja" mengikuti pola fakta umum program pensiun berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021.

Program Iuran Pasti

Iuran pasti untuk program pensiun dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana iuran tersebut terkait.

Program Imbalan Pasti

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada:

- Nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan; dikurangi

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. z. Employee Benefits *(Continued)*

In April 2022, Financial Accounting Standard Boards – Indonesian Institute of Accountant ("FASB-IIA") published a press release regarding "Attributing benefit to periods of service" and accordingly the Group changed the policy related to attributing benefit to periods of service in accordance with the provisions in SFAS No. 24 "Employee Benefit" following the general fact pattern of pension programs based on the Labor Law No. 11/2020 and Government Regulation No. 35/2021.

Defined Contribution Program

Defined contributions for pension plans are charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the contributions are related.

Defined Benefit Plan

Defined benefit plan surpluses and deficits are measured at:

- *The fair value of plan assets at the reporting date; less*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. z. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti (Lanjutan)

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada: (Lanjutan)

- Liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* yang didiskonto ke nilai kini dengan menggunakan imbal hasil obligasi Pemerintah yang berkualitas tinggi yang tersedia yang memiliki tanggal jatuh tempo yang mendekati persyaratan liabilitas; ditambah
- Biaya servis masa lalu yang tidak diakui; dikurangi
- Dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema wali amanat.

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti neto diakui langsung dalam ekuitas. Pengukuran kembali tersebut termasuk:

- Keuntungan dan kerugian aktuaris;
- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga); dan
- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga).

Biaya jasa diakui dalam laporan laba rugi dan termasuk biaya jasa kini dan masa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. z. Employee Benefits *(Continued)*

Defined Benefit Plan *(Continued)*

Defined benefit plan surpluses and deficits are measured at: (Continued)

- *Plan liabilities calculated using the projected unit credit method discounted to its present value using yields available on high quality Government bonds that have maturity dates approximating to the terms of the liabilities; plus*
- *Unrecognized past service costs; less*
- *The effect of minimum funding requirements agreed with scheme trustees.*

Remeasurements of the net defined benefit obligation are recognized directly within equity. The remeasurements include:

- *Actuarial gains and losses;*
- *Return on plan assets (interest excluded); and*
- *Any asset ceiling effects (interest excluded).*

Service costs are recognized in profit or loss and include current and past service costs as well as gains and losses on curtailments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. z. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti (Lanjutan)

Beban bunga neto (pendapatan) diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti (aset) pada awal periode tahunan hingga pembayaran manfaat selama periode.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau kurtailmen diakui secara langsung dalam laba rugi.

Penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam periode dimana penyelesaian tersebut terjadi.

Manfaat Jasa Jangka Panjang Lain

Imbalan kerja lain yang diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Imbalan kerja lain yang tidak diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dan dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan kemudian didiskonto dengan menggunakan imbal hasil obligasi Pemerintah berkualitas tinggi yang tersedia dengan tanggal jatuh tempo mendekati sisa periode yang diharapkan untuk diselesaikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. z. Employee Benefits *(Continued)*

Defined Benefit Plan *(Continued)*

Net interest expense (income) is recognized in the income statement and is calculated by applying a discount rate to measure the defined liability (asset) at the beginning of the annual period to the payment of benefits during the period.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment are recognized immediately in profit or loss.

Settlements of defined benefit schemes are recognized in the period in which the settlement occurs.

Other Long-term Service Benefits

Other employee benefits that are expected to be settled within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as current liabilities.

Other employee benefits that are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the end of the reporting period are presented as non-current liabilities and calculated using the projected unit credit method and then discounted using yields available on high quality Government bonds that have maturity dates approximating to the expected remaining period to settlement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. aa. Distribusi Laba

Sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan No. 117 tanggal 20 Juni 1995, pembagian laba bersih setelah pajak dipergunakan untuk cadangan dan dividen, (persentasenya ditetapkan tiap tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)).

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Sejak 1 Januari 2020, Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. aa. Profit Distribution

According to the Articles of Association through Deed No. 117 dated June 20, 1995, share of net profit after tax is used for reserves and dividends (the percentage is set each year in the General Meeting of Shareholders (GMS)).

2. ab. Revenue and Expenses Recognition

Revenue Recognition

From January 1, 2020, the Group has applied SFAS 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1) Identify contract(s) with a customer.
2) Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3) Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (Lanjutan)

4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah marjin.
5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:
a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ab. Revenue and Expenses Recognition *(Continued)*

Revenue Recognition *(Continued)*

4) Allocate the transaction price to each performance obligation based on the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin.

5) Recognize revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to the customer (which is when the customer obtains control of the goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:
a) A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or

b) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Grup menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup berkesimpulan bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Pendapatan Surat Pos dan Paket Pos

Pendapatan dari surat pos dan paket pos yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan surat pos dan paket pos yang merupakan aktivitas normal Grup.

Pendapatan diakui pada suatu waktu pada saat surat atau paket diserahkan di *front end* untuk dilakukan pemrosesan dan pengiriman.

Pendapatan Ritel dan Properti

Pendapatan ritel dan properti yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa penjualan ritel dan jasa sewa properti yang merupakan aktivitas normal Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ab. Revenue and Expenses Recognition *(Continued)*

Revenue Recognition *(Continued)*

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT"). The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements.

Revenue from Post Mail and Parcel

Revenue from post mail and parcel is gross inflow from economic benefits which arise from post mail and parcel services which are the Group normal operation activity.

Revenue is recognized at point in time when mail and parcel is handed over to the front end for processing and delivery.

Revenue from Retail & Property

Revenue from retail and property is gross inflow from economic benefit which arise from retail sales and property lease which is the Group's, normal operation activity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan Logistik

Pendapatan logistik yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan kiriman jumbo dan pergudangan.

Pendapatan logistik diakui ketika Grup telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pendapatan Jasa Keuangan

Pendapatan jasa keuangan yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari jasa layanan pospay dan jasa keuangan lainnya yang merupakan aktivitas normal Perseroan.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

2. ac. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui di dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak tersebut terkait dengan unsur-unsur yang terkait di dalam penghasilan komprehensif lain atau terkait langsung di dalam ekuitas. Dalam hal ini, pajak juga diakui masing-masing di dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ab. Revenue and Expenses Recognition *(Continued)*

Revenue from Logistic

Revenue from logistic is gross inflow from economic benefit which arises from jumbo shipping services and warehousing.

Revenue from logistic recognized when the Group has fulfilled its performance obligations by transferring goods promised to customers.

Revenue from Financial Services

Revenue from financial services is gross inflow from economic benefit which arise from pospay and other financial services which is the Company's normal operation activity.

Expenses Recognition

Expenses are recognized as incurred on an accrual basis.

2. ac. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognise in other comprehensive income or directly in equity. In this case the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ab. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan dasar peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan/atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada maupun tagihan dari fiskus terkait dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya yang belum dibayar pada akhir setiap periode pelaporan. Aset dan/atau liabilitas pajak penghasilan kini tersebut dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal terkait berdasarkan laba kena pajak periode tersebut. Seluruh beban aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai unsur beban pajak penghasilan di dalam laba rugi.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Penghasilan Badan diakui sebagai bagian dari Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - periode berjalan, sedangkan untuk SKP selain PPh Badan diakui dalam beban lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ab. Revenue and Expenses Recognition *(Continued)*

Current Tax

The current income tax charge is calculated based on the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to or claims from tax authorities relating to the current or prior reporting period that are unpaid at the end of each reporting period date. Assets and/or liabilities are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in profit or loss.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a Tax Assessment Letter (SKP) of Corporate Income Tax are recognized as part of Income Tax Benefit (Expense) – current, while other SKP is recognized as part of other expenses of the current period in the consolidated statement of comprehensive income unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through an SKP are deferred as long as they meet the asset recognition criteria.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ac. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode laporan posisi keuangan pada perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya didalam laporan keuangan konsolidasian. Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang terdapat kemungkinan laba kena pajak di masa depan akan timbul dimana perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan. Liabilitas kena pajak diakui bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak. Manfaat pajak di masa depan seperti akumulasi kerugian pajak yang belum dikompensasi juga diakui selama realisasi manfaat tersebut kemungkinan terjadi.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari:

1. Pengakuan awal *goodwill*; atau
2. Pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang: (1) bukan transaksi kombinasi bisnis; dan (2) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba/rugi pajak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ac. Taxation *(Continued)*

Deferred Tax

Deferred income tax assets and liabilities are recognized using the balance sheet method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Future tax benefits such as the carry-forward of unused tax losses are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except for the deferred tax liability arising from:

1. *The initial recognition of goodwill; or*
2. *The initial recognitiob of an asset or liability in a transaction that is: (1) not a business combination; and (2) at the time of the transaction affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ac. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Nilai tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang setiap periode pelaporan dan dikurangkan selama tidak terdapat kemungkinan laba kena pajak yang cukup akan timbul untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui dinilai ulang setiap periode pelaporan dan diakui sepanjang terdapat kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan akan memulihkan aset pajak tangguhan.

Jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset/liabilitas pajak tangguhan diselesaikan/dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset dan liabilitas pajak penghasilan ditangguhkan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan maupun entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda dimana terdapat intensi untuk menyelesaikan saldo pada basis yang sama.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ac. Taxation *(Continued)*

Deferred Tax *(Continued)*

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed each reporting period and reduced to the extent that it is not probable that sufficient taxable profit will arise to utilize part or all of the deferred tax assets. Unrecognized deferred tax assets are reassessed each reporting period and recognized to the extent that it is probable that future taxable income will recover the deferred tax assets.

The amount of the deferred tax asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax assets/liabilities are settled/recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Group have a legally enforceable right to offset current tax assets against liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes charged by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ac. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

1. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari unsur beban-beban yang diterapkan; dan
2. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

2. ad. Persediaan Aset Real Estat

Aset real estat terdiri dari ruko yang siap dijual dan tanah yang sedang dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dalam proses konstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas, pengembangan real estat dan biaya pinjaman serta dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah:

- Biaya pra-perolehan tanah;
- Biaya perolehan tanah;
- Biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ac. Taxation *(Continued)*

Value Added Tax

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT except:

1. *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
2. *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

2. ad. Real Estate Assets Inventories

Real estate assets consisting of shophouse available for sale and land under development are stated at cost or net realizable values, whichever is lower.

The cost of buildings under construction includes the cost of land that has been completed plus construction costs, other costs attributable to activities, real estate development and borrowing costs as well as being transferred to buildings ready for sale when they are completed and ready for sale.

The real estate development costs which are capitalized to the real estate development project are:

- *Land pre-acquisition costs;*
- *Land acquisition cost;*
- *Costs directly related to the project;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ad. Persediaan Aset Real Estat (Lanjutan)

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat adalah: (Lanjutan)

- Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat;
- Biaya pra-perolehan tanah atas tanah yang tidak berhasil diperoleh; dan
- Kelebihan biaya dari hasil yang diperoleh atas pembangunan sarana umum yang dikomersialkan yang dijual atau dialihkan sehubungan dengan penjualan unit.

Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan metode identifikasi khusus.

Beban yang diakui pada saat terjadinya adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.

2. ae. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ad. Real Estate Assets Inventories *(Continued)*

The real estate development costs which are capitalized to the real estate development project are: (Continued)

- *Cost that are attributable to real estate development activities;*
- *Pre-acquisition costs of land which is not successfully acquired; and*
- *Excess of costs over anticipated proceeds on the sale or transfer of commercialized public utilities in connecteon with the sale of units.*

Costs capitalized to real estate project development are allocated to each real estate unit using the specific identification method.

Expenses which are not related to the development of real estate are charged to expense when incurred.

2. ae. Operating Segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the key operating decision-maker. The key operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ae. Segmen Operasi (Lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja terfokus pada kategori pada setiap produk, yang menyerupai informasi segmen yang dilaporkan di periode sebelumnya. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ae. Operating Segment *(Continued)*

An operating segment is a component of entity which:

- *that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);*
- *whose operating results are reviewed regularly by key operating decision-maker to make decisions regarding the resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
- *for which discrete financial information is available.*

The information used by the key operating decision-maker for the purpose of resource allocation and performance assessment is more specifically focused on the category of each product, which is similar to the business segment reported in the prior period. All transactions between segments have been eliminated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. af. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Namun pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika adanya kemungkinan arus masuk dari manfaat ekonomi.

2. ag. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Ketika Grup membeli modal saham ekuitas entitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. af. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements. However, disclosure is not required if an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when there is possibility for inflow of economic benefits.

2. ag. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Where the Group purchases the Company's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the Company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary share are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Company's equity holders.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2. ah. Laba per Lembar Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba selama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode berjalan.

2. ai. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

2. aj. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Grup setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

2. ah. Earning per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing net income for the year attributable to the owners of the parent company with the weighted average number of the outstanding issued and fully paid shares during the period.

2. ai. Bonds Issuance Costs

Bonds issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

2. aj. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Group at the reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

a. Penggunaan Asumsi Kelangsungan Usaha

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi Grup, selain yang melibatkan estimasi, manajemen telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan asumsi bahwa Grup akan dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam operasinya di tahun mendatang, yang merupakan pertimbangan penting yang berdampak paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Penilaian asumsi kelangsungan usaha melibatkan pengambilan keputusan oleh manajemen, pada titik waktu tertentu, tentang hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi yang secara inheren tidak pasti. Manajemen Grup mempertimbangkan bahwa Grup memiliki kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan peristiwa atau kondisi utama, yang dapat menimbulkan risiko bisnis, yang secara individual atau kolektif dapat menimbulkan keraguan signifikan atas asumsi kelangsungan usaha.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Critical Accounting Estimates and Assumptions

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

a. The Use of Going Concern Assumption

In the process of applying the Group's accounting policies, apart from those involving estimations, management has prepared the consolidated financial statements on the assumption that the Group will be able to operate as a going concern in the coming years, which is a critical judgement that has the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements. The assessment of the going concern assumption involves making a judgement by the management, at a particular point of time, about the future outcome of events or conditions which are inherently uncertain. The Group's management considers that the Group has the capability to continue as a going concern and the major events or conditions, which may give rise to business risks, that individually or collectively may cast significant doubt upon the going concern.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

b. Ketidakpastian Eksposur Perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Grup membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak yang belum diakui harus diakui.

c. Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa mendatang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

b. Uncertain Tax Exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assessed whether the amounts recorded underestimated claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, the management also assessed the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized taxes should be recognized.

c. Employee Benefits

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

c. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 19.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

c. Employee Benefits (Continued)

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 19.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Non-Keuangan

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset non-keuangan berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset non-keuangan adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset non-keuangan antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

d. Estimating Useful Lives of Non-Financial Assets

The Group estimates the useful lives of its non-financial assets based on expected asset utilisation as supported by business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of non-financial assets are based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial period-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates caused by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of its non-financial assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

e. Sewa

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah Grup memiliki hak untuk mengendalikan aset sewaan berdasarkan PSAK 73: Sewa, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari hak untuk mengendalikan aset sewaan.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, Manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

e. Leases

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether the Group has the right to control the use of leased asset based on SFAS 73: Lease, which requires the Group to make judgements and estimates of right to control the leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, Management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are some number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

e. Sewa (Lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, opsi pembelian atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup.

g. Pengakuan Pendapatan Penjualan Properti

Penerapan PSAK 72 menyebabkan perubahan terhadap metode pengakuan pendapatan Grup atas penjualan properti. Sejak 1 Januari 2021, Grup mengakui pendapatan atas penjualan properti seperti rumah, ruko, kondominium, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenisnya diakui pada waktu tertentu saat pengendalian atas unit tersebut telah dialihkan kepada pelanggan. Pengalihan pengendalian dari Grup kepada pelanggan ditunjukkan melalui PPJB dan BAST unit properti kepada pelanggan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Accounting Estimates and Assumptions *(Continued)*

e. Leases (Continued)

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, purchase option or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group.

g. Revenue Recognition on Sales of Properties

The adoption of SFAS 72 resulted in changes in the Group's revenue recognition method from sales of property such as houses, shop houses, condominiums, apartments, offices, shopping centers and other similar properties. Since January 1, 2021, the Group recognized revenue from sales of property at a point in time when customers obtained control of the property unit. The transfer of control is substantiated through PPJB and BAST which have been approved and signed by both parties.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Grup mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

b. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang

Saat mengukur KKE, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements In Applying The Entity's Accounting Policies

a. Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Group considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Group operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

b. Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables

When measuring ECL, the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

b. Estimasi Penyisihan atas Penurunan Nilai dari Piutang (Lanjutan)

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur KKE. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penyisihan penurunan nilai piutang usaha Grup adalah masing-masing sebesar Rp222.097.356.333 dan Rp154.742.738.246 (Catatan 6).

c. Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup.

Tidak terdapat penurunan nilai tercatat cadangan nilai persediaan Grup pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar (Catatan 7).

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements In Applying The Entity's Accounting Policies *(Continued)*

b. Estimating Allowance for Impairment Losses on Receivables (Continued)

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

As of December 31, 2023 and 2022, allowance for impairment on the Group's receivables and is amounting to Rp222,097,356,333 dan Rp154,742,738,246 (Note 6).

c. Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on future estimated inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations.

There were no allowance for impairment inventory as of December 31, 2023 (Note 7).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

d. Penurunan Nilai atas Aset Tetap dan Properti Investasi

Masa manfaat setiap aset tetap, dan properti investasi Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak ada penurunan nilai yang diakui dalam aset tetap dan properti investasi Grup (Catatan 10 dan 11)

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements in Applying The Entity's Accounting Policies *(Continued)*

d. Impairment of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment, and investment properties are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, fixed assets would affect the recorded depreciation and amortization expense, respectively, and decrease in the carrying values of these assets.

As of December 31, 2023, there was no allowance for impairment losses recognized on the Group fixed assets and investment properties (Notes 10 and 11).

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

e. Penentuan Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Manajemen menggunakan teknik penilaian, termasuk model diskonto arus kas dalam mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan dimana penawaran pasar aktif tidak tersedia.

Dalam menerapkan teknik penilaian, manajemen memanfaatkan input pasar semaksimal mungkin, dan menggunakan estimasi dan asumsi, yang sejauh mungkin, sesuai dengan data yang dapat diobservasi oleh pelaku pasar akan digunakan di dalam penentuan harga instrumen. Dalam hal data yang berlaku tidak dapat dicermati, maka manajemen akan menggunakan estimasi terbaik dimana asumsi akan digunakan oleh pelaku pasar. Perkiraan ini mungkin berbeda dengan harga sebenarnya yang akan dicapai dalam transaksi wajar pada tanggal pelaporan.

f. Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements In Applying The Entity's Accounting Policies *(Continued)*

e. Determining Fair Value of Financial Instruments

Management uses valuation techniques, including the discounted cash flow model in measuring the fair value of financial instruments where active market quotes are not available.

In applying the valuation techniques, management makes maximum use of market inputs, and uses estimates and assumptions that are, as far as possible, consistent with observable data that market participants would use in pricing the instrument. Where applicable data is not observable, management uses its best estimate about the assumptions that market participants would make. These estimates may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

f. Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Grup mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai aset tersebut sebesar mungkin yang tidak dapat direalisasikan, dimana ketersediaan penghasilan kena pajak memungkinkan untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan berdasarkan tingkat dan waktu dari taksiran penghasilan kena pajak untuk periode pelaporan berikutnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements in Applying The Entity's Accounting Policies *(Continued)*

f. Income Tax (Continued)

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters are different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

g. Realization of Deferred Tax Assets

The Group conducted a review of the carrying amount of deferred tax assets at each end of reporting period and reduce the value of such assets by as much as possible which cannot be realized, where the availability of taxable income allow to use all or part of the deferred tax assets. The Group's review on the recognition of deferred tax assets for deductible temporary difference can be deductible based on the level and timing from the estimated taxable income for the next reporting period.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Pertimbangan Penting Dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi Entitas (Lanjutan)

g. Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Estimasi tersebut didasarkan pada pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta dengan strategi perencanaan pajak di masa depan. Namun tidak ada kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

h. Provisi dan Kontinjensi

Grup, dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

Grup tidak mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(Continued)*

Critical Judgements In Applying The Entity's Accounting Policies *(Continued)*

g. Realization of Deferred Tax Assets (Continued)

The estimation is based on the achievement of the Group in the past and future expectation toward income and expenses, as well as with the tax planning strategies in the future. But there is no certainty that the Group can generate sufficient taxable income to allow to use part or all of these deferred tax assets.

h. Provisions and Contingencies

The Group, in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties into account.

The Group has not recognized any provision as of December 31, 2023 and 2022.

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU)

Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan pos atas penugasan dari pemerintah yang disebut Bantuan Operasional LPU (Layanan Pos Universal) yang sebelumnya pada tahun 2016 disebut kompensasi (subsidi) atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Pos. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), besarnya dana LPU Pos untuk tahun anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

4. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT

In connection with the implementation of postal services on assignments from the government called UPS Operational Assistance (Universal Postal Service) which previously in 2016 was called compensation (subsidies) for the Implementation of Postal General Service Obligations (KPU). Based on the Letter of Ratification of the Budget Implementation List (DIPA), the amount of Postal UPS funds for the 2023 and 2022 fiscal years is as follows:

Tahun/*Year*	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/*The Handover of Budget Execution Document*	Tanggal/*Date*	Jumlah/*Total*
2023	SP DIPA-999.08.1.984526/2023	30 Desember / *December* 30, 2022	378.269.521.000
2022	SP DIPA-999.08.1.984526/2022	27 Desember / December 27, 2021	384.739.880.000

Merujuk Perjanjian kerja antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 1401/DJPPI.2/HK.04.02/05/2023 dan PKS103/DIRUT/0523 besaran Subsidi Operasional Penyelenggaraan LPU Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp378.269.521.000 yang akan dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan batas maksimal ketersediaan Pagu Subsidi Operasional Penyelenggaraan LPU tersebut.

Based on the work agreement between the Directorate General of Post and Informatics Implementation and PT Pos Indonesia (Persero) Number: 1401/DJPPI.2/HK.04.02/05/2023 and PKS103/DIRUT/0523 the amount of Operational Subsidy for the Implementation of UPS for fiscal year 2023 of Rp378,269,521,000 which will be paid based on the results of verification in accordance with the maximum limit of availability of the UPS Operational Subsidy Ceiling.

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU)

Pembayaran atas penggantian Bantuan Operasional (BO) LPU dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi secara bertahap per triwulan pada awal tahun 2023. Namun berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, diubah menjadi per bulan sejak periode April 2023. Rincian penerimaan dana LPU periode 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

4. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT

Payment for the replacement of UPS Operational Assistance (OA) was made by the Ministry of Communication and Information in quarterly installments at the beginning of 2023. However, based on an agreement with the Ministry of Communication and Information, it was changed to monthly from the period of April 2023. Details of UPS fund receipts on December 31, 2023 and 2022, are as follows:

2023

Uraian	Tanggal Penerimaan/ *Date of Receipt*	Jumlah/ *Total*	*Description*
Triwulan I/2023	31 Mei/*May 2023*	73.764.318.244	*Quarter I/2023*
Periode April 2023	27 Juni/*June 2023*	31.072.527.610	*Period April 2023*
Periode Mei 2023	27 Juni/*June 2023*	20.382.793.802	*Period May 2023*
Periode Juni 2023	11 Agustus/*August 2023*	38.588.625.318	*Period June 2023*
Periode Juli 2023	29 Agustus/August 2023	20.883.437.302	*Period July 2023*
Periode Agustus 2023	11 September/September 2023	24.711.633.474	*Period August 2023*
Periode September 2023	16 November/*November 2023*	47.396.169.464	*Period September 2023*
Periode Oktober 2023	8 Desember/*December* 2023	27.155.485.722	*Period October 2023*
Periode November dan Desember 2023	19 Desember/*December* 2023	82.165.593.988	*Period November and December 2023*
Jumlah		**366.120.584.924**	***Total***

2022

Uraian	Tanggal Penerimaan/ *Date of Receipt*	Jumlah/ *Total*	*Description*
Triwulan I/2022	13 Juni/*June 2022*	65.091.802.710	*Quarter I/2022*
Triwulan II/2022	16 Agustus/*August 2022*	95.909.406.850	*Quarter II/2022*
Triwulan III/2022	9 November/*November 2022*	81.057.084.223	*Quarter III/2022*
Triwulan IV/2022	8 Desember/*December 2022*	87.872.680.624	*Quarter IV/2022*
Jumlah		**329.930.974.407**	***Total***

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU) (Lanjutan)

Dasar perhitungan untuk pengajuan atas penerimaan dana LPU tersebut adalah dengan menghitung dan menghimpun seluruh kerugian dari kantor-kantor pos terpencil/kantor pos cabang luar kota (KPCLK).

Dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal belum semua beban terakomodir dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 tahun 2013 yang disesuaikan dengan Kepmen Nomor 216 tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan dan Pengawasan Serta Pembayaran Subsidi Operasional Layanan Pos Universal tanggal 15 Mei 2023.

Dalam perhitungan penggantian penugasan BO–LPU tahun 2023 formula perhitungan yaitu dengan menyelisihkan biaya operasional dengan pendapatan. Adapun komponen biaya operasional meliputi biaya sumber daya manusia, biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penyusutan sedangkan pendapatan meliputi pendapatan Layanan Pos Universal, pos komersial dan layanan transaksi keuangan.

4. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT *(Continued)*

The basis calculation for the proposal of the UPS funds receipt is by calculating and accumulating all the losses from the out-of-town branch post offices (KPCLK).

In the implementation of the Universal Postal Service, not all expenses have been accommodated in the Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology No. 22 of 2013 which is adjusted to Decree Number 216 of 2023 concerning Guidelines for Calculation and Supervision and Payment of Operational Subsidies for Universal Postal Services dated May 15, 2023.

In the calculation of the replacement of OA–UPS assignments in 2023, the calculation formula is by sorting operational cost with revenue. The components of operating costs include human resource cost, operating cost, maintenance cost, administrative and general cost, and depreciation cost while revenue includes Universal Postal Service revenue, commercial post and financial transaction services.

4. DANA PENGGANTIAN PENUGASAN BANTUAN OPERASIONAL (BO) – LAYANAN POS UNIVERSAL (LPU) (Lanjutan)

Terkait dengan penggatian biaya pegawai untuk pegawai di kantor LPU hanya dihitung maksimal 2 orang, sedangkan untuk biaya operasional atas beban *switching*, beban sewa atas *software* dikeluarkan dalam perhitungan penggantian biaya operasional. Selanjutnya untuk biaya pengadaan prangko dan biaya alat tulis kantor yang sebelumnya diperhitungkan dengan biaya *joint cost* diubah menjadi biaya *at cost* berdasarkan penggunaan pemakaian di Kantor Pos LPU.

Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor 3490/DJPPI.2/HK.04.02/12/2023 dan PKS352/DIRUT/1223, atas Penyelenggaraan LPU untuk tahun 2024. Nilai DIPA yang dianggarkan untuk penyelenggaraan LPU tahun 2024 sebesar Rp369.802.535.000.

4. OPERATIONAL AID FOR UNIVERSAL POST SERVICE (UPS) ASSIGNMENT *(Continued)*

Regarding the replacement of employee costs for employees at the UPS office, only a maximum of 2 persons is considered, while the operational expenses related to switching and software rental costs are included in the calculation of operational cost replacement. Furthermore, the expenses for stamp procurement and office stationery previously calculated as joint costs are now changed to cost-at based on their usage at the UPS Post Office.

The Company entered into a cooperation agreement with the Directorate General of Post and Informatics Implementation on December 29, 2023 with Number: 3490/DJPPI.2/HK.04.02/12/2023 and PKS352/DIRUT/1223, on the implementation of the UPS for 2024. The DIPA value budgeted for the implementation of the UPS in 2024 is Rp369,802,535,000.

5. KAS DAN SETARA KAS / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2023	2022	
Kas - Rupiah	**1.713.766.049.361**	**977.836.534.142**	***Cash - Rupiah***
Bank - Rupiah			***Bank - Rupiah***
Pihak Berelasi (Catatan 26)			***Related Parties (Note 26)***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	525.044.625.494	690.421.666.492	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45.028.912.392	149.312.884.267	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.259.405.362	85.326.074.144	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia	23.196.151.363	19.689.808.610	*PT Bank Syariah Indonesia*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8.437.571.702	92.884.451.081	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen Pos	1.296.789.387	1.303.342.143	*PT Bank Mandiri Taspen Pos*
Sub Jumlah	**639.263.455.700**	**1.038.938.226.737**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank Pembangunan Daerah	29.610.135.092	90.758.079.596	*PT Bank Pembangunan Daerah*
PT Bank Bukopin Tbk	3.124.817.010	8.893.698	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	4.949.670.531	20.624.442.542	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Panin Dubai Syariah	4.050.820.081	849.652.667	*PT Bank Panin Dubai Syariah*
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	3.036.983.840	--	*PT Bank Maspion Indonesia Tbk*
PT Bank Woori Saudara Tbk	2.228.278.072	426.352.281	*PT Bank Woori Saudara Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2.018.026.489	--	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank DKI	412.110.165	--	*PT Bank DKI*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	382.313.143	439.839.914	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	236.383.625	302.139.653	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT CIMB Niaga Syariah	209.427.688	201.460.815	*PT CIMB Niaga Syariah*
PT Bank Permata Tbk	183.875.100	204.978.300	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	120.811.389	--	*PT Bank Artha Graha Internasional Tbk*
Bank Lainnya	128.285.525	285.183.393	*Others Banks*
Sub Jumlah	**50.691.937.750**	**114.101.022.859**	***Sub Total***
Jumlah Kas dan Bank Rupiah	**2.403.721.442.811**	**2.130.875.783.738**	***Total Cash and Banks Rupiah***
Bank - Valuta Asing			***Bank - Foreign Currencies***
Pihak Berelasi (Catatan 26)			***Related Parties (Note 26)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - JPY (2023: JPY1.107.563.000,00	121.333.526.650	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - JPY (2023: JPY1,107,563,000.00*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - EUR (2023: EUR205.190,03 dan 2022: EUR3.343.034,69)	3.516.858.623	55.870.901.851	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - EUR (2023: EUR205,190.03 and 2022: EUR3,343,034.69)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - USD (2023: USD550.605,07dan 2022: USD1.698.316,89)	8.488.127.760	29.875.174.949	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - USD (2023: USD550,605.07 and 2022: USD1,698,316.89)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - CHF Swiss (2023: CHF61.740,06 dan 2022: CHF57.913,88)	1.134.429.150	982.681.559	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - CHF Swiss (2023: CHF61,740.06 and 2022: CHF57,913.88)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SGD (2023: SGD56.351,73 dan 2022: SGD56.299,07)	659.971.175	656.395.361	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SGD (2023: SGD56,351.73 and 2022: SGD56,299.07)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - GBP (2023: GBP28.531,33 dan 2022: GBP28.568,48)	563.785.928	540.686.481	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - GBP (2023: GBP28,531.33 and 2022: GBP28,568.48)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - USD (2023: USD18,14 dan 2022: USD107,00)	279.646	1.686.984	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - USD (2023: USD18.14 and 2022: USD107.00)*
Sub Jumlah	**135.696.978.932**	**87.927.527.185**	***Sub Total***
Sub Jumlah Bank	**825.652.372.382**	**1.240.966.776.781**	***Sub Total Banks***

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan) / 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

	2023	2022	
Sub Jumlah Kas - Rupiah	**1.713.766.049.361**	**977.836.534.142**	***Sub Total Cash - Rupiah***
Sub Jumlah Bank	**825.652.372.382**	**1.240.966.776.781**	***Sub Total Banks***
Deposito			***Time Deposits***
Pihak Berelasi (Catatan 26)			***Related Parties (Note 26)***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.500.000.000	48.500.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.000.000.000	22.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.000.000.000	12.500.000.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.500.000.000	--	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Sub Jumlah	**108.000.000.000**	**83.000.000.000**	***Sub Total Time Deposit***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank BJB Syariah	6.500.000.000	--	*PT Bank BJB Syariah*
Sub Jumlah	**6.500.000.000**	**--**	***Sub Total Time Deposit***
Sub Jumlah Deposito	**114.500.000.000**	**83.000.000.000**	***Sub Total Time Deposit***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**2.653.918.421.743**	**2.301.803.310.923**	***Total Cash and Cash Equivalents***

Tingkat suku bunga efektif deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The effective interest rate for time deposits are as follows:

	2023	2022	
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun			*Interest Rates per Annum of Time Deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4%	3% - 3,5%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4% - 4,60%	2,5% - 3%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,5% - 5,75%	2,75% - 3,5%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank BJB Syariah	5,25% - 6%	-	*PT Bank BJB Syariah*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5,25% - 5,45%	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*

Deposito yang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas memiliki jatuh tempo kurang dari 3 bulan.

Time deposits classified as cash and cash equivalents have maturities of less than 3 months.

Kas dan setara kas Grup terdiri dari:

The Group's cash and cash equivalent funds consist of:

	2023	2022	
Dana Internal Grup	**1.619.652.583.480**	**1.421.025.697.881**	***The Group's Internal Fund***
Dana Pihak Ketiga			***Third Parties Funds***
Giropos	927.364.642.260	787.131.044.619	*Giropos Services*
Deposit	36.042.228.624	30.998.758.755	*Deposits*
Jasa Pospay	52.084.422.720	47.937.555.294	*Pospay Services*
Wesel Pos	12.550.456.902	12.952.254.580	*Wesel Pos*
Jaminan Proyek	6.224.087.757	1.757.999.794	*Project Guarantee*
Sub Jumlah	**1.034.265.838.263**	**880.777.613.042**	***Sub Total***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**2.653.918.421.743**	**2.301.803.310.923**	***Total Cash and Cash Equivalents***

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kerjasama nomor: PKS.238/SVP Finance Operation/1222 dan WHS/052/01122022 tanggal 1 Desember 2022 Grup bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam pengelolaan kas Grup yang meliputi layanan pengantaran dan penjemputan uang tunai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Grup menggunakan rekening bank dalam mata uang asing untuk memenuhi kebutuhan atas likuiditas untuk transaksi penerimaan dan *settlement* utang atas layanan pos internasional dengan negara-negara anggota UPU. Kebutuhan likuiditas Grup berasal dari pemenuhan kas masuk atas penerimaan pelunasan piutang yang dapat meng-*cover* besarnya *settlement* utang dalam bentuk mata uang asing.

Grup menandatangani perjanjian kerja sama tentang jasa asuransi gedung dan barang inventaris serta asuransi kas (*Cash in Transit*, *Cash in Safe* dan *Cash in Cashier Box*) tahun 2023 dengan PT Asuransi Tri Pakarta nomor perjanjian kerjasama: PKS292/DIR-1/1222 dan 082/PKS/DIR/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Dalam perjanjian tersebut terdapat *Fidelity Guarantee* pada jaminan CIT, CIS, dan CICB yaitu perluasan jaminan atas kerugian atau kehilangan keuangan yang merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kelalaian, penipuan, ketidakjujuran, kesalahan, kecurangan dan penggelapan yang dilakukan oleh pihak Grup atau orang yang bekerja dibawah kekuasaan Grup dengan limit jaminan Rp60.000.000.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS *(Continued)*

Based on the cooperation agreement number: PKS.238/SVP Finance Operation/1222 and WHS/052/01122022 dated December 1, 2022, the Group collaborates with PT Bank Negara Indonesia (Persero) in managing the Group's cash which includes cash delivery services and pick-up services from January 1, 2023 to December 31, 2024.

The use of bank accounts in foreign currencies by the Group to meet the needs for liquidity for receipt transactions and debt settlement for international postal services with UPU member countries. The fulfillment of the Group's liquidity needs comes from cash inflows from the receipt of receivables repayment which can cover the amount of debt settlement in the form of foreign currencies.

The Group signed a cooperation agreement on building and inventories insurance services and cash insurance (Cash in Transit, Cash in Safe and Cash in Cashier Box) in 2023 with PT Asuransi Tri Pakarta cooperation agreement number: PKS292/DIR-1/1222 and 082/PKS/DIR/2022 dated December 30, 2022 which is valid from December 31, 2022 to December 31, 2023. In the agreement, there is a Fidelity Guarantee on CIT, CIS, and CICB guarantees, namely the expansion of guarantees for financial losses or losses that are a direct or indirect result of negligence, fraud, dishonesty, error, fraud and embezzlement committed by the Group or persons working under the Group's authority with a guarantee limit of Rp60,000,000.

5. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kendaraan bermotor (minimum beroda empat) maksimal sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) maksimal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan kapal motor maksimal sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan pesawat terbang regular maksimal sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per pengiriman. Nilai pertanggungan Asuransi *Cash in Transit* dengan menggunakan pesawat terbang sewa/*charter* maksimal sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) per pengiriman kepada PT Asuransi Tri Pakarta.

Jika nilai uang yang dikirim melebihi limit diatas maka Grup wajib memberitahukan kepada PT Asuransi Tri Pakarta melalui sarana tercepat.

Nilai premi yang dibayarkan Grup untuk asuransi gedung dan kas ini adalah sebesar Rp3.550.000.000 dengan pembayaran dibagi menjadi 2 kali termin pembayaran/per semester.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 28.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS *(Continued)*

Total sum insured Cash in Transit Insurance using a motorized vehicle (four-wheeled minimum) up to Rp30,000,000,000 (thirty billion rupiah) per shipment. Total sum insured Cash in Transit Insurance using two-wheeled vehicles (motorcycle) up to Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) per shipment. Total sum insured Cash in Transit Insurance using a motorboat up to Rp3,000,000,000 (three billion rupiah) per shipment. Total sum insured Cash in Transit Insurance using a regular flight up to of Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) per shipment. Total sum insured Cash in Transit Insurance using a charter flight is up to Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah) per shipment to PT Asuransi Tri Pakarta.

If the value of money sent exceeds the above limit, then the Group must notify PT Asuransi Tri Pakarta through the fastest means.

The premium value paid by the Group for building insurance and cash is Rp3,550,000,000 with the payment divided into 2 times the payment term/per semester.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents is disclosed in Note 28.

6. PIUTANG USAHA – BERSIH / *6. TRADE RECEIVABLES – NET*

	2023	2022	
Piutang Dalam Negeri	484.170.183.340	314.483.542.686	*Domestic Trade Reveceivables*
Piutang Luar Negeri	123.329.570.120	163.343.842.138	*Foreign Trade Receivables*
Sub Jumlah	**607.499.753.460**	**477.827.384.824**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(222.097.356.333)	(154.742.738.246)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	**385.402.397.127**	**323.084.646.578**	***Total Trade Receivables - Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses are as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	(154.742.738.246)	(124.028.492.474)	*Beginning Balance*
Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai Tahun Berjalan	11.594.071.777	61.469.630.078	*Recovery of Impairment Losses for the Year*
Pencadangan Piutang Usaha	(78.948.689.864)	(92.183.875.850)	*Allowance for Trade Receivables*
Saldo Akhir	**(222.097.356.333)**	**(154.742.738.246)**	***Ending Balance***

Umur piutang usaha dalam negeri per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Aging of domestic trade receivables as of December 31, 2023 and 2022, are as follows

	2023	2022	
Piutang Surat Paket, Ritel Properti dan Jasa Keuangan			***Trade Receivables from Mail & Parcel Retail, Property and Financial Service***
Sampai dengan 30 hari	69.227.704.379	83.662.627.031	*Up to 30 days*
31-60 hari	25.499.906.922	23.412.301.685	*31-60 days*
61-180 hari	12.737.608.014	10.393.092.037	*61-180 days*
181-270 hari	13.938.373.851	12.075.834.053	*181-270 days*
271-360 hari	4.305.826.125	5.394.671.423	*271-360 days*
Diatas 1 tahun	79.462.758.089	70.272.179.837	*More than 1 year*
Sub Jumlah	**205.172.177.380**	**205.210.706.066**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(112.404.300.528)	(49.018.049.108)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**92.767.876.852**	**156.192.656.958**	***Total***
Piutang Logistik			***Trade Receivable from Logistics***
Sampai dengan 90 hari	100.680.647.802	58.599.590.225	*Up to 90 days*
91-120 hari	83.119.254.453	16.363.034.989	*91-120 days*
121-150 hari	27.795.146.443	5.937.361.813	*121-150 days*
151-180 hari	7.302.675.091	8.054.857.642	*151-180 days*
181-220 hari	13.872.812.204	10.053.033.221	*181-220 days*
Diatas 220 hari	46.227.469.967	10.264.958.730	*More than 220 days*
Sub Jumlah	**278.998.005.960**	**109.272.836.620**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(50.641.553.722)	(10.514.673.475)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**228.356.452.238**	**98.758.163.145**	***Total***

Grup membedakan umur piutang usaha logistik dan non-logistik (ritel) dikarenakan jatuh tempo pelunasan yang berbeda. Jatuh tempo piutang logistik adalah 3 bulan, dan untuk piutang usaha non-logistik jatuh tempo tagihan adalah 1 bulan.

The Group differentiates the age of logistics and non-logistics (retail) trade receivables due to different repayment maturities. The maturity of logistics trade receivables is 3 months, and for non-logistics trade receivable the maturity is 1 month.

6. PIUTANG USAHA – BERSIH / *6. TRADE RECEIVABLES – NET*

Kenaikan piutang logistik pada tahun 2023 dikarenakan adanya penagihan atas proyek logistik dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia yang belum diterima pelunasannya sampai tanggal 31 Desember 2023.

The increase in trade receivables from logistics in 2023 is due to the collection of logistics projects with PT Rajawali Nusantara Indonesia which has not been received until December 31, 2023.

Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The aging of international trade receivables as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Telah Jatuh Tempo:			*Over due:*
Sampai dengan 2 tahun	43.417.781.956	85.055.846.368	*Up to 2 years*
2-3 tahun	8.174.071.928	31.644.086.325	*2-3 years*
3-4 tahun	14.690.230.136	24.574.071.533	*3-4 years*
Diatas 4 tahun	57.047.486.100	22.069.837.912	*More than 4 years*
Sub Jumlah	**123.329.570.120**	**163.343.842.138**	***Sub Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(59.051.502.083)	(25.179.554.089)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah	**64.278.068.037**	**138.164.288.049**	***Total***

Umur piutang usaha luar negeri per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

Aging of overseas trade receivable as of December 31, 2023 and 2022 is based on USD currency are as follows:

	2023	2022	
Sampai dengan 2 tahun	2.816.410,35	5.406.893,80	*Up to 2 years*
2-3 tahun	530.233,00	2.011.575,00	*2-3 years*
3-4 tahun	952.921,00	1.562.143,00	*3-4 years*
Diatas 4 tahun	3.700.537,50	1.402.952,00	*More than 4 years*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.830.533,35)	(1.600.632,77)	*Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	**4.169.568,50**	**8.782.931,03**	***Total Trade Receivable - Net***

Piutang usaha luar negeri merupakan piutang yang timbul dari tambahan biaya penerusan kiriman barang antar negara, dimana atas kiriman barang tersebut diatur dibawah regulasi UPU.

Receivables from foreign trade represent receivables arising from additional fees for forwarding goods between countries, where the delivery of goods is regulated under UPU regulations.

Lamanya umur piutang usaha luar negeri dikarena proses persetujuan (*accepted*) atas piutang yang diklaim memerlukan waktu maksimal 12 bulan.

The longevity of foreign trade receivables is due to the approval process (accepted) of the claimed receivables to take a maximum of 12 months.

6. PIUTANG USAHA – BERSIH / *6. TRADE RECEIVABLES – NET*

Saldo bersih transaksi pos internasional per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Net balance of international transaction postal as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Piutang Luar Negeri	123.329.570.120	163.343.842.138	*Domestic Trade Reveceivables*
Utang Luar Negeri	(137.458.761.366)	(192.006.152.021)	*Foreign Trade Receivables*
Jumlah	**(14.129.191.246)**	**(28.662.309.883)**	***Total***

Pada 31 Desember 2023 dan 2022 Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi (Pemerintah) dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Dimana Grup telah melakukan telaah terkait dengan kolektibilitas piutang Pemerintah tersebut.

On December 31, 2023 and 2022 the Group has established a provision for impairment of trade receivables based on the level of historical decline collectively and the credit history of individual customers. The Group does not distinguish trade receivables from related parties (Government) and trade receivables from third parties in assessing the amounts due. Where the Group has examined the collection of Government receivables.

Dalam melakukan perhitungan penyisihan piutang usaha khususnya untuk piutang luar negeri, Grup melakukan *offsetting* antara saldo piutang dan utang untuk negara yang sama, kemudian hasil piutang bersih tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan penyisihan atas piutang usaha. Sedangkan untuk perhitungan penyisihan piutang usaha dalam negeri, Grup menggunakan data histori (*roll rate*) dengan menambahkan beberapa indikator makro ekonomi yaitu tingkat inflasi, REPO, *Credit Growth* dan GDP pada periode berjalan dengan mempertimbangkan industri sejenis.

In calculating the allowance of business receivables, especially for foreign trade receivables, Group offsets between the balance of trade receivables and trade payables for the same country, then the net trade receivables are used as a basis for calculation of allowance for impairment losses of trade receivables. Meanwhile, the calculation of the allowance for the Group's domestic trade receivables uses historical data (roll rate) by adding several macroeconomic indicators, namely inflation rate, REPO, Credit Growth and GDP in the current period by considering similar industries.

Berdasarkan penelaahan terhadap kolektabilitas akun piutang usaha pada akhir periode pelaporan, manajemen Grup berpendapat bahwa pencadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian jika terdapat piutang yang tidak dapat tertagih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Based on a review of the collectability of trade receivable at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment for receivable of Groups is adequate to cover possible losses from non-collection of receivables as of December 31, 2023 and 2022.

Piutang usaha Grup tidak digunakan sebagai jaminan utang bank.

Trade receivables of the Group was not used as collateral bank loan.

6. PIUTANG USAHA – BERSIH (Lanjutan)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas piutang usaha sebagaimana yang disajikan pada Catatan 28.

6. TRADE RECEIVABLES – NET (Continued)

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of trade receivable is disclosed in Note 28.

7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

	2023	2022	
Persediaan Barang Dagangan			***Merchandise Inventories***
Barang Dagangan	22.376.665.011	22.509.689.754	*Merchandise for Sale*
Tanah	8.205.056.500	9.839.129.494	*Land*
Pengembangan Tanah	7.901.082.329	8.298.307.866	*Land Development*
Persediaan Bahan Produksi	2.035.752.822	2.774.639.031	*Materials Inventory*
Rumah	--	2.751.541.428	*House*
Sub Jumlah	**40.518.556.662**	**46.173.307.573**	***Sub Total***
Perlengkapan			***Supplies***
Formulir Serbaguna	2.570.460.031	3.155.073.516	*Multi Usage Forms*
Prangko	551.150.187	573.973.255	*Stamps*
Sub Jumlah	**3.121.610.218**	**3.729.046.771**	***Sub Total***
Jumlah	**43.640.166.880**	**49.902.354.344**	***Total***

Barang dagangan merupakan persediaan atas prangko definitif/tera yang dicetak sebagai pengganti biaya kiriman surat. Jumlah tercatat berdasarkan nilai intrinsik atas keping prangko yang dicetak.

Merchandise is a stock of definitive stamps/marks that are printed as a substitute for the cost of sending letters. The carrying amount is based on the intrinsic value of the stamps printed.

Tanah merupakan tanah milik PT Pos Properti Indonesia untuk keperluan proyek pengembangan kawasan hunian di daerah Muktiwari sebesar Rp8.205.056.500 dan Karang Bahagia sebesar Rp7.901.082.329. Dalam persediaan tanah terdapat material tanah yang dipergunakan untuk pengembangan hunian Karang Bahagia.

The land is owned by PT Pos Properti Indonesia for the purposes of residential area development projects in the Muktiwari area amounting to Rp8,205,056,500 and Karang Bahagia amounting to Rp7,901,082,329. In the land inventory, there is material which is used for the development of the Karang Bahagia residence.

7. PERSEDIAAN (Lanjutan)

Pada tahun 2023, terdapat penanganan perkara perdata dengan nomor 80/PDT.G/2023/PN.CKR sehubungan dengan pembayaran ganti rugi kerugian materiil dalam pengembalian uang atas sisa lahan seluas ±5.232m^2 yang belum diserahkan oleh pihak tergugat yakni PT Berkah Aslin Mandiri dan Marta Jaya. Pada tanggal laporan keuangan ini, penanganan perkara masih dalam proses persidangan, dengan agenda persidangan adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak secara *E-litigasi*.

Pengembangan tanah merupakan barang produksi dalam proses untuk proyek perumahaan karang bahagia yang terdiri dari Sertifikat, perijinan dan advis, raw material, biaya pengurusan perijinan.

Tanah Hunian Karang Bahagia yang masih dalam tahap pengembangan terletak di Kp. Pulo Pisang, Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

Persediaan bahan produksi merupakan persedian atas perlengkapan pos seperti kantung pos, *straping band*, helm dan jas pengantar.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, persediaan rumah siap jual di Point Residence Karang Bahagia masing-masing sebesar Nihil dan Rp2.751.541.428. Selama tahun 2023 terdapat penjualan rumah sebanyak 65 unit dengan nilai jual sebesar Rp11.425.000.000.

Prangko filateli merupakan stok persediaan atas prangko filateli, benda filateli dan prangko prisma. Sedangkan perlengkapan prangko definitif merupakan stok persediaan atas prangko tera yang disetarakan sebagai penggantian biaya kirim.

Manajemen berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat indikasi penurunan nilai persediaan.

7. INVENTORIES *(Continued)*

In 2023, there was a civil case with number 80/PDT.G/2023/PN.CKR in connection with the payment of compensation for material losses in return for the remaining land area of ± 5,232m^2 that had not been submitted by the defendants, namely PT Berkah Aslin Mandiri and Marta Jaya. As of the reporting period, the case is still in the process of trial, with the agenda of the trial is submission of conclusions from the parties in E-litigation.

Land development is a production item in the process for the Karang Selamat housing project which consists of certificates, permits and advice, raw materials, licensing processing costs.

The Karang Bahagia Residential Land which is still under development is located at Kp. Pulo Pisang, Karanganyar Village, Karang Bahagia District, Bekasi Regency.

Materials inventory is a supply of postal equipment such as post bags, straping bands, helmets and introductory suits.

As of December 31, 2023 and 2022, available-for-sell house supply at Point Residence Karang Bahagia amounting to Nil and Rp2,751,541,428, respectively. During the year 2023, there are 65 house sales amounted to Rp11,245,000,000.

Definitive stamp is a stock of philatelic stamps, philatelic objects and prism stamps. While definitive stamp equipment is a stock of stamps equivalent to tera stamps as reimbursement of shipping costs.

Management believes that as of December 31, 2023 and 2022 there were no indications of impairment of inventories.

8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA / *8. ACCRUED REVENUES*

	2023	2022	
Pendistribusian Bantuan Logistik	493.626.448.174	--	*Distribution of Logistics Assistance*
Penyaluran Bantuan Sosial	175.623.282.020	--	*Distribution of Social Assistance*
Paket dan Surat Pos Domestik	172.975.502.098	106.242.837.211	*Domestic Mail and Parcels*
Paket dan Surat Pos Internasional	33.975.728.086	97.510.744.777	*International Mail and Parcels*
Materai	24.601.648.074	24.653.438.418	*Stamps*
Layanan Pos Persepsi	15.199.822.410	6.563.189.213	*Postal Service Perception*
Properti	14.325.109.120	6.680.869.616	*Properties*
Bunga Deposito Berjangka	582.061.003	366.679.452	*Time Deposit Interest*
Managed Service Sarana IT	--	8.499.997.279	*Manage Service of IT Facilities*
Pendapatan Bantuan QSF	--	3.441.563.144	*QSF Aid Revenue*
Jumlah	**930.909.600.985**	**253.959.319.110**	***Total***

Pada tahun 2023, Perusahaan bekerjasama dengan Perum Bulog untuk pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah yang terbagi dalam 3 tahapan pendistribusian dengan nilai kontrak untuk tahap 1-3 masing-masing sebesar Rp618.369.547.980, Rp280.310.209.950, dan Rp93.421.418.190. Total realisasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 73.072.355 Penerima Bantuan Pangan (100%).

In 2023, the Company collaborated with Perum Bulog for the distribution of Government Rice Reserve Food Assistance which was divided into 3 stages of distribution with contract values for stages 1-3 amounting to Rp618,369,547,980, Rp280,310,209,950, and Rp93,421,418,190, respectively. Total work realization up to December 31, 2023 is 73,072,355 Food Aid Recipients (100%).

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan penagihan termin 1 – 2 atau 95% dari nilai kontrak untuk tahap 1 dan termin 1 atau 40% dari nilai kontrak untuk tahap 2 dengan total tagihan sebesar Rp692.586.149.477.

As of December 31, 2023, the Company has invoiced termin 1 - 2 or 95% of the contract value for phase 1 and termin 1 or 40% of the contract value for phase 2 with a total invoice of Rp692,586,149,477.

Pada tahun 2023, Perusahaan bekerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia untuk Pendistribusian bantuan pangan program stunting pemerintah yang terbagi menjadi 2 tahap pendistribusian dengan nilai kontrak untuk tahap 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp99.780.141.000. Total realisasi pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 8.678.443 atau 100%.

In 2023, the Company collaborated with PT Rajawali Nusantara Indonesia for the distribution of food aid for the government's stunting program which was divided into 2 stages of distribution with a contract value for stages 1 and 2 of Rp99,780,141,000 each. Total work realization up to December 31, 2023 is 8,678,443 or 100%.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah melakukan penagihan termin 1 – 2 atau 95% dari nilai kontrak untuk tahap 1 dengan total tagihan sebesar Rp94.791.133.950.

As of December 31, 2023, the Company has invoiced termin 1 - 2 or 95% of the contract value for phase 1 with a total invoice of Rp94,791,133,950.

8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan telah melakukan penagihan ke PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Arkan Global Utama, dan PT Yasa Artha Trimanunggal pada bulan Februari 2023.

Pada tahun 2023 Perusahaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Jaminan Sosial untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk masyarakat penerima bantuan. Selama tahun 2023 seluruh pekerjaan sudah terselesaikan 100% dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp281.238.850.371.

Akrual atas penyaluran bantuan sosial merupakan akrual atas fee penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk masyarakat penerima. Bantuan sosial ini berbentuk uang tunai dengan nilai dana berkisar antara Rp300.000 sampai dengan Rp1.500.000 per penerima manfaat.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang pekerjaan distribusi dan penjualan materai tempel Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor PKS: PRIN-86/2023/PJ.0134/PPK/MTR/2022. Nilai kontrak yang disepakati adalah sebesar Rp299.777.700.000 (termasuk pajak). Akrual atas pendapatan materai merupakan akrual untuk transaksi penjualan materai selama bulan Desember 2023.

Penurunan akrual atas pendapatan kiriman luar negeri dikarenakan adanya penurunan produktifitas kiriman luar negeri.

***8. ACCRUED REVENUES** (Continued)*

As of the reporting period, the Company has made a collection to PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Arkan Global Utama, and PT Yasa Artha Trimanunggal in February 2023.

In 2023 the Company cooperated with the Directorate General of Social Security for the distribution of social assistance from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia for beneficiaries. During 2023 all work has been completed 100% with the total value of work amounting to Rp281,238,850,371.

The accrual for the distribution of social assistance is an accrual of the fee for the distribution of social assistance from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia to the recipient community. This social assistance is in the form of cash with a fund value ranging from Rp300,000 to Rp1,500,000 per beneficiary.

On December 30, 2022, the Company collaborated with the Directorate General of Taxes regarding the work of distributing and selling sticky stamps for the Directorate General of Taxes for the 2023 Fiscal Year with PKS Number: PRIN 86/2023/PJ.0134/PPK/MTR/2022. The agreed contract value is Rp299,777,700,000 (including tax). Accrued revenue of stamp represents accrued revenue of stamp for sales transactions during December 2023.

The decrease in accruals for foreign shipment income due to decrease in overseas remittance productivity.

8. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kelas pendapatan yang masih harus diterima sebagaimana yang dijabarkan pada Catatan 28.

8. ACCRUED REVENUES (Continued)

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of accrued revenues is disclosed in Note 28.

9. ASET LANCAR LAINNYA

9. OTHER CURRENT ASSETS

a. Piutang Layanan Jasa Keuangan

a. Receivables from Financial Services

	2023	2022	
Prefund	467.708.900.284	--	*Prefund*
Layanan Western Union	407.308.757.028	328.177.892.962	*Western Union Services*
Pembayaran PPOB	4.474.667.805	36.823.647.522	*PPOB Services*
Deposit Agen Pos	667.401.089	--	*Postal Agent Deposit*
Settlement Layanan Transaksi QRIS	274.456.009	38.879.462.137	*Settlement of QRIS Services*
Program Pembinaan Pelanggan *Point Reward*	305.506.422	--	*Customer Program Point Reward*
Layanan Jasa Pengiriman Uang Luar Negeri	--	3.816.320.127	*Foreign Remittance Services*
Layanan Tabungan	--	17.406.364	*Savings Services*
Jumlah	**880.739.688.637**	**407.714.729.112**	***Total***

Piutang layanan jasa keuangan merupakan tagihan Grup terkait dengan layanan pembayaran jasa pihak ketiga yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan. Piutang layanan jasa keuangan ini akan selesai dalam waktu 2-3 hari kerja setelah proses rekonsiliasi harian.

Receivables from financial services represent the Group bills related to third party payment services that have not been billed at the end of the reporting period. Receivables from financial services will be settled within 2-3 working days after the daily reconciliation process.

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

a. Piutang Layanan Jasa Keuangan (Lanjutan)

Layanan western union merupakan layanan pembayaran wesel kemitraan luar negeri dimana Perusahaan memberikan layanan pembayaran kiriman uang dari luar negeri ke penerima di Indonesia. Kenaikan jumlah piutang layanan jasa keuangan atas western union disebabkan karena tingginya produksi transaksi pembayaran wesel western union.

Perusahaan telah menerima penggantian pembayaran layanan western union ini pada awal Januari 2024.

Deposit agenpos merupakan penerimaan dari agenpos yang belum diterima dan disetorkan pada akhir periode ke loket-loket kantor pos atas transaksi pada akhir bulan. Setoran agenpos diterima Grup pada H+1.

Settlement QRIS merupakan transaksi pembayaran non-kas atas transaksi loket yang dilakukan pelanggan melalui kode QR perbankan yang bekerjasama dengan Grup, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BNI. Penggantian atas transaksi QRIS adalah H+1 sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing *provider* QRIS.

9. OTHER CURRENT ASSETS *(Continued)*

a. Receivables from Financial Services *(Continued)*

The western union service is an overseas partnership remittance payment service where the Company provides remittance payment services from overseas to recipients in Indonesia. The increase in financial services receivable from western union was due to the high production of western union money order payment transactions.

The company has received reimbursement for this western union service in early January 2024.

Agenpos deposit is a receipt from the postal agent that has not been received and deposited at the end of the period to the post office counters for transactions at the end of the month. The postal agent deposit was received by the Group at D+1.

Settlement QRIS is a non-cash payment transaction for counter transactions by customers through banking QR codes in collaboration with the Group, including between Bank Mandiri and Bank BNI. Reimbursement of QRIS transactions is D+1 in accordance with the agreement of each QRIS provider.

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan) / *9. OTHER CURRENT ASSETS (Continued)*

b. Lainnya / *b. Others*

	2023	2022	
Piutang Karyawan			***Employee Receivables***
Kelalaian	5.492.158.226	20.917.534.113	*Negligence*
Kecurangan	11.244.728.213	12.319.845.920	*Fraud*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.682.028.882)	(26.485.417.800)	*Allowance for Impairment Losses*
Sub Jumlah	**7.054.857.557**	**6.751.962.233**	***Sub Total***
Biaya Dibayar di Muka			***Prepaid Expenses***
Kompensasi Cuti Besar	234.806.998.514	53.047.975.929	*Pension Payment*
Uang Muka Operasi	124.849.151.990	121.939.153.332	*Operating Advances*
Sewa Rumah Pegawai	17.345.085.509	20.166.907.499	*Employee Houses Rental*
Sewa Gedung	9.973.735.415	13.438.230.766	*Building Rental*
Premi Asuransi	2.583.384.449	1.057.158.627	*Insurance Premium*
Beasiswa Pendidikan	2.447.700.002	--	*Education Scholarship*
Sewa Sarana Produksi Operasi Layanan Keuangan	286.581.938	220.000.000	*Lease of Production Facilities of the Financial Services Operation*
Pemasaran	166.370.500	2.401.559.145	*Marketing*
Biaya Retensi karyawan	916.190.475	--	*Employee Retention Cost*
Lainnya	66.600.000	13.632.300	*Others*
Sub Jumlah	**393.441.798.792**	**212.284.617.598**	***Sub Total***
Bank Garansi	77.002.299.152	66.237.302.353	*Bank Guarantee*
Persediaan Rusak	6.668.000	78.850.000	*Damaged Inventory*
Tanah Siap Dijual	703.177	3.132.893	*Land Available for Sale*
Sub Jumlah	**77.009.670.329**	**66.319.285.246**	***Sub Total***
Jumlah	**477.506.326.678**	**285.355.865.077**	***Total***

Piutang karyawan merupakan hak tagih kepada karyawan dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab yang terjadi akibat berkurangnya aset atau kekayaan Grup yang menjadi tanggung jawab karyawan, terdiri dari:

- Piutang kecurangan/kelalaian karyawan merupakan piutang akibat kecurangan/kelalaian karyawan berdasarkan pemeriksaan internal.
- Piutang karyawan lainnya yang berasal dari kas kecil operasional yang tidak terselesaikan oleh penanggung jawab kas kecil sampai dengan akhir periode pelaporan.

Employee receivable are amounts rightfully collectible from employees based on the statement of employee responsibility which consists of:

- *Fraud/negligence receivables which are determined based on internal examination.*
- *Other employee receivables from operating petty cash which are not resolved by the petty cash accountant staff until the end of the reporting period.*

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Lainnya (Lanjutan)

Piutang karyawan tidak digunakan sebagai jaminan utang Bank, tetapi Grup telah melakukan pencadangan penurunan nilai piutang pegawai atas dampak penerapan PSAK 71.

Perusahaan bekerjasama dengan PT BRI Life dengan nomor PKS: Addendum 1 PKS.273/DIR JARTEL DAN SDM/1117-B.4197/DIR/OBAK/KPS/XI/2017 tanggal 24 November 2017 untuk penyediaan asuransi jiwa beserta nilai investasi. Asuransi tersebut ditujukan untuk karyawan dan akan diterima manfaat setelah karyawan memasuki usia pensiun (maksimal di usia 54 tahun). Kompensasi cuti besar merupakan premi asuransi yang telah dibayarkan Grup kepada PT BRI Life yang belum jatuh tempo karena karyawan Grup belum memasuki usia pensiun.

Kenaikan biaya dibayar di muka kompensasi cuti besar karena adanya kenaikan komponen gaji dan perubahan mekanisme pola angsuran.

9. OTHER CURRENT ASSETS *(Continued)*

b. Others *(Continued)*

The employee receivables are not used as collateral for the Bank loan, but the Group has reserved a allowance for impairment for employee receivables on the impact of the implementation of SFAS 71.

The Company collaborates with PT BRI Life with PKS number: Addendum I PKS.273/DIR JARTEL DAN SDM/1117-B.4197/DIR/OBAK/KPS/XI/2017 dated November 24, 2017 for the provision of life insurance along with investment value. The insurance is intended for employees and benefits will be received after employees enter retirement age (maximum at the age of 54 years). Large leave compensation is an insurance premium that has been paid by the Group to PT BRI Life which has not yet matured because the Group's employees have not entered retirement age.

The increase in prepaid expenses for major leave compensation was due to an increase in salary components and changes in the installment pattern mechanism.

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Lainnya (Lanjutan)

Uang muka operasi terdiri dari uang muka untuk talangan pembiayaan atas proyek dan talangan atas *settlement* layanan untuk transaksi *payment point*. Talangan pembiayaan atas proyek merupakan panjar kerja untuk mendanai proyek-proyek Grup seperti proyek penyaluran bantuan sosial dan proyek logistik. Sedangkan talangan atas *settlement* merupakan talangan diberikan kepada PT Arthajasa untuk melakukan *settlement* atas layanan jasa keuangan (*Payment Point*) kepada mitra *biller*. Nilai uang muka operasi tercatat merupakan nilai net setelah dikurangi dengan estimasi cadangan penurunan nilai.

Selain itu pada tahun 2023 Grup menempatkan dana deposit atas kerjasama pengiriman dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia untuk keperluan pengiriman kiriman barang melalui moda transportasi udara.

Sewa rumah karyawan merupakan pembayaran atas tunjangan bantuan perumahan karyawan yang diamortisasi selama masa manfaat yang diberikan.

Sewa gedung merupakan biaya sewa kantor operasional (kantor pos) di lokasi-lokasi yang tidak terdapat bangunan milik Grup dengan nilai sewa dibawah Rp100.000.000. Atas biaya tersebut dilakukan amortisasi sesuai dengan masa sewa.

Premi asuransi merupakan premi asuransi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

9. OTHER CURRENT ASSETS *(Continued)*

b. Others *(Continued)*

Operating advance consists of an advance for the bailout of financing for the project and a bailout for the settlement of services for payment point transactions. The bailout of financing for the project is a working force to fund the Group's projects such as social assistance distribution project and logistics project. Meanwhile, the bailout for settlement is a bailout given to PT Arthajasa to settlement financial services (Payment Point) to biller partners. The amount of operating advances is the net value after deduction with impairment reserves.

In addition, in the year 2023 the Group raised funds deposit for the cooperation with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia for the purpose of shipment of goods delivery through air transport mode.

Employee housing rent is a payment for employee housing assistance benefits that are amortized over the life of the benefit provided.

Building rent represents rental cost of operational offices (post offices) in locations where there are no buildings owned by the Group with rental value below Rp100,000,000. These costs are amortized in accordance with the lease period.

Insurance premium is an insurance premium for the Board of Directors and Board of Commissioners.

9. ASET LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

b. Lainnya (Lanjutan)

Bank garansi merupakan kas dan atau bank yang dijaminkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun untuk keperluan proyek seperti proyek pengiriman surat kedinasan dengan PT Bukit Asam Tbk, pengiriman tagihan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan atas proyek pendistribusian bantuan pangan dengan Perum Bulog.

Aset lancar siap dijual merupakan aset untuk dihapusbukukan dalam periode pelaporan akuntansi melalui proses lelang dan ruislag dengan Pemerintah. Jumlah aset lancar siap jual yang tidak laku terjual pada akhir periode pelaporan direklasifikasi ke dalam aset tidak lancar lainnya.

Persediaan rusak merupakan persediaan atas formulir dan barang cetak yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan produksi Grup. Nilai tersebut merupakan nilai intrinsik dari persediaan. Berdasarkam berita Nomor 181/Supplies dan Peralatan/GS/2023 telah dilakukan pemusnahan persediaan atas formulir dan barang cetak tersebut. Adapun pemusnahan tersebut dikarenakan persediaan yang ada tidak dapat dipergunakan lagi karena *idle*, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan disebabkan karena adanya perubahan sistem dan prosedur bisnis, juga perubahan teknologi data *processing*.

9. OTHER CURRENT ASSETS *(Continued)*

b. Others *(Continued)*

Bank guarantee is cash and/or bank guaranteed to third parties within one year for project purposes such as the official letter delivery project with PT Bukit Asam Tbk, sending bills with the BPJS Ketenagakerjaan, and guarantees on food aid distribution projects with Perum Bulog.

Current assets available for sale are assets for write-off in the financial reporting period through auction process and swap with the Government. The amount of assets available for sale that remained unsold at the end of period is reclassified to other non-current asset.

Damaged inventories are inventories of forms and printed goods that are no longer used for the Group's production activities. The value is the intrinsic value of the inventory. Where through news Number 181/Supplies and Equipment/GS/2023 has been destroyed the inventory of form and printed goods. The destruction is because the existing inventory can no longer be used because it is idle, no longer in accordance with needs, and is caused by changes in business systems and procedures, as well as changes in data processing technology.

10. ASET TETAP – BERSIH / *10. FIXED ASSETS – NET*

	2023					
	Saldo Awal/ ***Beginning Balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Pengurangan/** ***Deduction***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo Akhir/** ***Ending Balance***	
Harga Perolehan Kepemilikan Langsung:						***Acquisition Cost Direct Ownership:***
Tanah	170.940.562.403	--	(412.290)	(2.923.296.796)	168.016.853.317	*Land*
Gedung	1.168.648.396.492	725.835.939	--	77.697.849.687	1.247.072.082.118	*Buildings*
Kendaraan	13.604.870.808	--	(462.667.136)	--	13.142.203.672	*Vehicles*
Inventaris	1.193.873.511.338	24.976.412.730	(34.207.181)	24.098.466.790	1.242.914.183.677	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**2.547.067.341.041**	**25.702.248.669**	**(497.286.607)**	**98.873.019.681**	**2.671.145.322.784**	***Sub Total***
Aset Hak Guna						***Right of Use Assets:***
Bangunan	9.311.386.898	16.916.501.366	--	--	26.227.888.264	*Buildings*
Kendaraan	206.644.824.014	4.698.122.888	(150.000.000)	--	211.192.946.902	*Vehicles*
Inventaris	81.804.618.773	--	--	--	81.804.618.773	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**297.760.829.685**	**21.614.624.254**	**(150.000.000)**	**--**	**319.225.453.939**	***Sub Total***
Aset dalam Penyelesaian:						***Construction in Progress:***
Gedung	20.656.672.058	123.811.792.405	(511.236.200)	(37.526.579.163)	106.430.649.100	*Buildings*
Inventaris	16.234.446.599	34.285.932.553	(406.269.199)	(24.835.413.834)	25.278.696.119	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**36.891.118.657**	**158.097.724.958**	**(917.505.399)**	**(62.361.992.997)**	**131.709.345.219**	***Sub Total***
Jumlah	**2.881.719.289.383**	**205.414.597.881**	**(1.564.792.006)**	**36.511.026.684**	**3.122.080.121.942**	***Total***
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung:						***Accumulated Depreciation Direct Ownership:***
Gedung	(591.097.631.395)	(45.256.092.593)	--	3.105.918.043	(633.247.805.945)	*Buildings*
Kendaraan	(12.936.590.845)	(519.639.895)	462.667.135	--	(12.993.563.605)	*Vehicles*
Inventaris	(1.113.951.704.728)	(49.617.307.428)	30.107.776	--	(1.163.538.904.380)	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**(1.717.985.926.968)**	**(95.393.039.916)**	**492.774.911**	**3.105.918.043**	**(1.809.780.273.930)**	***Sub Total***
Aset Hak Guna:						***Right of Use Asset***
Bangunan	(9.311.386.898)	(2.734.696.262)	--	--	(12.046.083.160)	*Buildings*
Kendaraan	(162.441.482.713)	(20.764.764.878)	85.000.000	--	(183.121.247.591)	*Vehicles*
Inventaris	(81.804.618.773)	--	--	--	(81.804.618.773)	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**(253.557.488.384)**	**(23.499.461.140)**	**85.000.000**	**--**	**(276.971.949.524)**	***Sub Total***
Jumlah	**(1.971.543.415.352)**	**(118.892.501.056)**	**577.774.911**	**3.105.918.043**	**(2.086.752.223.454)**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**910.175.874.031**				**1.035.327.898.488**	***Net Book Value***

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan) / *10. FIXED ASSETS – NET (Continued)*

	2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan Kepemilikan Langsung:						***Acquisition Cost Direct Ownership:***
Tanah	171.849.473.116	--	(3.132.893)	(905.777.820)	170.940.562.403	*Land*
Gedung	1.159.166.666.481	20.841.821.835	--	(11.360.091.824)	1.168.648.396.492	*Buildings*
Kendaraan	13.873.145.962	--	(553.987.700)	285.712.546	13.604.870.808	*Vehicles*
Inventaris	1.161.877.635.695	23.368.168.546	(6.522.292.903)	15.150.000.000	1.193.873.511.338	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**2.506.766.921.254**	**44.209.990.381**	**(7.079.413.496)**	**3.169.842.902**	**2.547.067.341.041**	***Sub Total***
Aset Hak Guna						***Right of Use Assets:***
Bangunan	9.311.386.898	--	--	--	9.311.386.898	*Buildings*
Kendaraan	207.969.540.654	349.995.141	(1.388.999.235)	(285.712.546)	206.644.824.014	*Vehicles*
Inventaris	81.804.618.773	--	--	--	81.804.618.773	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**299.085.546.325**	**349.995.141**	**(1.388.999.235)**	**(285.712.546)**	**297.760.829.685**	***Sub Total***
Aset dalam Penyelesaian:						***Construction in Progress:***
Gedung	10.200.606.323	36.612.114.863	(3.795.165.411)	(22.360.883.717)	20.656.672.058	*Buildings*
Inventaris	29.029.909.974	4.184.638.913	(1.830.102.288)	(15.150.000.000)	16.234.446.599	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**39.230.516.297**	**40.796.753.776**	**(5.625.267.699)**	**(37.510.883.717)**	**36.891.118.657**	***Sub Total***
Jumlah	**2.845.082.983.876**	**85.356.739.298**	**(14.093.680.430)**	**(34.626.753.361)**	**2.881.719.289.383**	***Total***
Akumulasi Penyusutan Kepemilikan Langsung:						***Accumulated Depreciation Direct Ownership:***
Gedung	(546.689.986.799)	(52.039.090.125)	--	7.631.445.529	(591.097.631.395)	*Buildings*
Kendaraan	(12.727.125.614)	(333.550.774)	409.798.089	(285.712.546)	(12.936.590.845)	*Vehicles*
Inventaris	(1.080.044.653.465)	(40.332.240.944)	6.425.189.681	--	(1.113.951.704.728)	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**(1.639.461.765.878)**	**(92.704.881.843)**	**6.834.987.770**	**7.345.732.983**	**(1.717.985.926.968)**	***Sub Total***
Aset Hak Guna						***Right of Use Assets:***
Bangunan	(9.311.386.898)	--	--	--	(9.311.386.898)	*Buildings*
Kendaraan	(119.911.845.652)	(43.743.682.148)	(928.332.541)	2.142.377.628	(162.441.482.713)	*Vehicles*
Inventaris	(78.396.092.991)	(3.408.525.782)	--	--	(81.804.618.773)	*Office Equipments*
Sub Jumlah	**(207.619.325.541)**	**(47.152.207.930)**	**(928.332.541)**	**2.142.377.628**	**(253.557.488.384)**	***Sub Total***
Jumlah	**(1.847.081.091.419)**	**(139.857.089.773)**	**5.906.655.229**	**9.488.110.611**	**(1.971.543.415.352)**	***Total***
Nilai Buku Bersih	**998.001.892.457**				**910.175.874.031**	***Net Book Value***

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan)

10. FIXED ASSETS – NET *(Continued)*

Alokasi pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2023	2022	
Pemilikan Langsung:			***Direct Acquisitions:***
Beban Pokok Layanan (Catatan 22)	69.699.661.603	59.300.186.067	*Cost of Services (Note 22)*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 23)	29.292.801.959	36.501.403.572	*General and Administrative Expense (Note 23)*
Aset Hak Guna:			***Right of Use Assets:***
Beban Pokok Layanan (Catatan 22)	14.851.117.769	31.632.201.277	*Cost of Services (Note 22)*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 23)	5.048.919.725	12.423.298.857	*General and Administrative Expense (Note 23)*
Jumlah	**118.892.501.056**	**139.857.089.773**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 aset tetap bangunan, inventaris dan kendaraan Grup telah diasuransikan kepada PT Asuransi Tri Pakarta berupa asuransi *property all risk* yang memberikan perlindungan atas risiko kerusakan/kerugian gedung dan barang inventaris milik Grup akibat kebakaran, banjir, huru hara, tanah longsor dan risiko lainnya. Nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.528.570.619.626 dan Rp1.526.570.619.625. Nilai premi yang dibayarkan untuk asuransi aset tetap adalah sebesar Rp3.550.000.000 dengan metode pembayaran secara termin setiap semesternya.

As of December 31, 2023, the Group's buildings, office equipments and vehicles were insured to PT Asuransi Tri Pakarta in the form of property all risk insurance which provides protection against risks of damage/loss to buildings and office equipments belonging to the Group due to fire, flood, civil commotion, land landslides and other risks. As of December 31, 2023 and 2022, the insurance coverage amounted to Rp1,528,570,619,626 and Rp1,526,570,619,625, respectively. The value of the premium paid for fixed asset insurance is Rp3,550,000,000 with the payment method on a semi-annual basis.

Perusahaan Asuransi yang digunakan Grup dalam mengasuransikan asetnya merupakan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Grup.

The insurance used by the Group are third parties and are not affiliated with the Group.

Jenis pemilikan hak atas tanah milik Perusahaan seluruhnya berupa “Hak Guna Bangunan (HGB)”. Hak atas tanah tersebut akan berakhir dalam berbagai tanggal dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2030. Manajemen berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

The Company owned its land through land rights known as “Right to Build” (HGB). The land rights will expire on various dates from 2028 until 2030. The Management believes that the land rights can be renewed or extended when they expire.

Berdasarkan hasil penelaahan Manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap.

Based on Management review, there are no indications of impairment of fixed assets.

10. ASET TETAP – BERSIH (Lanjutan) / *10. FIXED ASSETS – NET (Continued)*

Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

The deduction in fixed assets is due to the sale of fixed assets with the following details:

	2023	2022	
Hasil Penjualan Aset	10.890.179.193	865.666.666	*Proceeds from Sales Fixed Assets*
Jumlah Tercatat Aset Tetap yang Dilepas	(65.412.290)	(144.189.611)	*Net Book Value of Fixed Asset Disposed*
Keuntungan Pelepasan Aset Tetap	**10.824.766.903**	**721.477.055**	***Gain on Disposal of Fixed Asset***

Selain yang diungkapkan diatas, terdapat pelepasan aset tetap yang disebabkan karena disposal dan penyesuaian pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp921.604.805 dan Rp8.042.835.590.

In addition to those disclosed above, there were disposals of fixed assets due to disposal and adjustments in 2023 and 2022 amounting to Rp921,604,805 and Rp8,042,835,590, respectively.

Aset Tetap Grup tidak digunakan sebagai jaminan atas utang bank ataupun utang lainnya.

The Group's Fixed assets are not used as collateral for bank or other debts.

11. PROPERTI INVESTASI / *11. INVESTMENT PROPERTIES*

Properti investasi merupakan aset tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (*lessee*) melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional.

Investment properties consist of lands or buildings or parts of a building or both which are controlled by the owner or tenant (lessee) through financial lease used to generate rental income or increasing its value or both and not used for operational activities.

Rincian saldo dan mutasi properti investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Balances and movements of investment properties for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Fair Value*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset							***Assets***
Tanah	5.496.220.390.000	--	--	2.904.593.619	601.865.326.381	6.100.990.310.000	*Land*
Bangunan	537.620.716.700	--	--	(43.271.491.522)	(8.578.809.178)	485.770.416.000	*Buildings*
Jumlah	**6.033.841.106.700**	**--**	**--**	**(40.366.897.903)**	**593.286.517.203**	**6.586.760.726.000**	***Total***

	2022						
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Fair Value*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset							***Assets***
Tanah	4.308.650.600.000	--	--	908.376.271	1.186.661.413.729	5.496.220.390.000	*Land*
Bangunan	434.035.621.493	--	(34.000.000)	11.360.091.824	92.259.003.383	537.620.716.700	*Buildings*
Jumlah	**4.742.686.221.493**	**--**	**(34.000.000)**	**12.268.468.095**	**1.278.920.417.112**	**6.033.841.106.700**	***Total***

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Aset properti investasi dicatat menggunakan metode revaluasi atau berdasarkan nilai pasar dimana pada saat penetapan awal terdapat perubahan metode pencatatan dari metode biaya menjadi metode revaluasi, kenaikan/penurunan nilai dicatat sebagai bagian dari laba/rugi komprehensif lainnya.

Skema kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengelola aset properti terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan *cluster* luasan aset yaitu sewa murni (*tenant* sekolah/kampus dan perkantoran), kerja sama (*Creatice Hub* dan *Shopping Center*), swakelola (*Co-living, Co-working* dan *Hotel/Guest House*).

Pada 31 Desember 2023 aset properti Grup telah dinilai oleh KJPP Asmawi dan Rekan, laporan hasil KJPP yang telah diterbitkan Nomor 00027/2.0119-00/PI/11/0222/1/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.

Tujuan penilaian aset properti investasi Grup adalah untuk penyusunan laporan keuangan bukan untuk tujuan perpajakan. Metode yang digunakan dalam penilaian aset properti menggunakan pendekatan biaya dan sesuai dengan tujuan aset tersebut untuk didayagunakan dan komersialisasi aset dalam pelaporan keuangan.

11. INVESTMENT PROPERTIES *(Continued)*

Investment property assets are recorded using the revaluation method or based on market value where at the time of initial determination there is a change in the recording method from the cost method to the revaluation method, the increase/decrease in value is recorded as part of other comprehensive profit/loss.

The cooperation scheme carried out by the Company in managing property assets is divided into 3 types based on asset area clusters, namely pure rent (school/campus tenants and offices), cooperation (Creatice Hub and Shopping Center), self-management (Co-living, Co-working and Hotel/Guest House).

As of December 31, 2023, the Group's property assets has been assessed by KJPP Asmawi and Partners, the KJPP results report that has been issued Number 00027/2.0119-00/PI/11/0222/1/I/2024 dated January 5, 2024.

The purpose of valuation of the Groups investment property assets is for the preparation of financial statements, not for taxation purposes. The methods used in the appraisal of property assets that have been carried out using a cost approach and in accordance with the objectives of those assets to be utilized and commercialized assets in financial reporting.

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.103/DIR-1/1223 tanggal 10 Desember 2023, Perusahaan menetapkan kembali 16 titik aset baru sebagai aset properti investasi mengingat pemanfaatan aset tersebut telah dapat dikategorikan sebagai properti investasi.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD.03/DIR-1/0122 tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan menetapkan kembali 23 titik aset baru sebagai aset properti investasi mengingat pemanfaatan aset tersebut telah dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Adapun bentuk pemanfaatan atas 23 titik aset tersebut didayagunakan sebagai komersialisasi aset dalam bentuk *building management* (Pos Bloc), bekerjasama dengan PT Indomarco Prismatama, PT Antam Tbk dan kerjasama lainnya dalam bentuk persewaan.

Per 31 Desember 2023 terdapat kenaikan properti investasi sebesar Rp593.286.517.203 yang dicatat dalam pendapatan lainnya setelah eliminasi sebesar Rp168.004.840.966 (Catatan 24) dan pendapatan komprehensif lain sebesar Rp412.370.729.903 (Catatan 20.c). Jumlah aset properti investasi Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 99 titik aset dan 84 titik aset, sampai dengan saat ini belum ada penambahan lokasi properti investasi yang ditetapkan oleh Grup.

Pengukuran Nilai Wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 13 (Revisi 2011) “Properti Investasi”, Grup telah memilih model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 ditentukan dengan menggunakan taksiran atas nilai wajar yang telah dihitung oleh KJPP Asmawi dan Rekan.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas di masa depan dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

11. INVESTMENT PROPERTIES *(Continued)*

Based on the Decree of the Board of Directors Number KD.103/DIR-1/1223 dated December 10, 2023, the Company re-designated 16 new asset points as investment property assets considering that the utilization of these assets can be categorized as investment property.

Based on the Decree of the Board of Directors Number KD.03/DIR-1/0122 dated January 3, 2022, the Company re-designated 23 new asset points as investment property assets considering that the utilization of these assets can be categorized as investment property. The form of utilization of the 23 asset points is utilized as asset commercialization in the form of builiding management (Pos Bloc), collaboration with PT Indomarco Prismatama, PT Antam Tbk and other cooperation in the form of rentals.

As of December 31, 2023, there was an increase in investment property of Rp593,286,517,203 which after elimination was recorded in other income of Rp168,004,840,966 (Note 24) and other comprehensive income of Rp412,370,729,903 (Note 20.c). The total number of investment property of the Group as of December 31, 2023 and 2022 are 99 asset points and 84 asset points, until now there has been no additional investment property locations determined by the Group.

Fair Value Measurement

Regarding implementation of SFAS 13 (Revised 2011) "Investment Property", the Group have chosen a fair value model for measurement after initial recognition. The fair value of the investment property on December 31, 2023 and 2022 is determined using an estimate of the fair value calculated by KJPP Asmawi and Rekan.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method which are the income approach which discounts future cash flows and the cost approach which is based on current replacement cost.

11. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Input utama yang tidak dapat diobservasi adalah tingkat diskonto yang digunakan dan sewa properti investasi diharapkan per tahun.

Kebijakan pengakuan aset properti investasi yang diterapkan Grup bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk tujuan komersial. Tujuan penilaian kembali tanah dan bangunan milik Grup adalah untuk mendapatkan nilai komersial atas aset tetap sebelum dipinjam-pakaikan dan didayagunakan oleh Entitas Anak.

Implementasi revaluasi aset bukan tujuan perpajakan, sebagai berikut :
- Keuntungan revaluasi terutama untuk memperbaiki neraca;
- Representasi nilai wajar aset dan ekuitas;
- Representasi nilai wajar aset untuk *service* liabilitas;
- Revaluasi mencegah terjadinya *moral hazard* saat bekerjasama operasi dengan pihak lain; dan
- Menaikkan *leverage capacity* yang dilakukan oleh anak perusahaan.

11. INVESTMENT PROPERTIES *(Continued)*

The key unobservable inputs are the discount rate used and the expected rental income of investment properties per annum.

The policy of recognition of investment property assets applied by the Group is not for taxation purposes but only for commercial purposes. The purpose of revaluation of the Group's land and buildings is to obtain commercial value for the fixed assets before being injected and used by the Subsidiaries.

Implementation of asset revaluation for tax purposes is:
- *Benefit revaluations for improving the balance sheet;*
- *Representation of fair value of asset and equity;*
- *Representation of fair value for servicing liabilities;*
- *Revaluation for preventing the occurrence of mora hazard when conducting joint operation with other parties; and*
- *Increase leverage capacity performed by the subsidiaries.*

12. ASET TAKBERWUJUD

Aset takberwujud Grup sepenuhnya dipergunakan untuk menunjang proses operasional Grup, adapun batasan kapitalisasi aset takberwujud Grup adalah pembiayaan minimal Rp1.000.000 untuk aset takberwujud dan Rp10.000.000 untuk biaya yang ditangguhkan. Aset tak berwujud yang dimiliki Grup berupa aplikasi *software*, jasa konsultan bisnis, dan jasa riset.

12. INTANGIBLE ASSETS

The Group's intangible assets are fully used to support the Group's operational process, while the limitation of the Group's intangible asset capitalization is a minimum financing of Rp1,000,000 of intangible assets and Rp10,000,000 of deferred costs. Intangible assets owned by the Group in the form of software applications, business consulting services, and research services.

12. ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan) / *12. INTANGIBLE ASSETS (Continued)*

	2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis dalam Penyelesaian	14.668.796.428	46.046.024.955	--	(17.971.763.443)	42.743.057.940	*Business Transformation Software in Process*
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis	201.802.389.287	16.481.921.388	--	18.721.013.443	237.005.324.118	*Business Transformation Software*
Biaya yang Ditangguhkan	27.318.103.458	10.464.143.741	--	--	37.782.247.199	*Deferred Charge*
Sub Jumlah	**243.789.289.173**	**72.992.090.084**	**--**	**749.250.000**	**317.530.629.257**	***Sub Total***
Akumulasi Amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis	(156.252.603.921)	(20.443.760.474)	--	--	(176.696.364.395)	*Business Transformation Software in Process*
Biaya yang Ditangguhkan	(27.016.960.254)	(1.851.753.555)	--	--	(28.868.713.809)	*Deferred Charge*
Sub Jumlah	**(183.269.564.175)**	**(22.295.514.029)**	**--**	**--**	**(205.565.078.204)**	***Sub Total***
Jumlah	**60.519.724.998**				**111.965.551.053**	***Total***

	2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis dalam Penyelesaian	12.638.980.946	7.365.163.757	--	(5.335.348.275)	14.668.796.428	*Business Transformation Software in Process*
Perangkat Lunak Transformasi Bisnis	173.149.973.129	23.317.067.883	--	5.335.348.275	201.802.389.287	*Business Transformation Software*
Biaya yang Ditangguhkan	27.318.103.458	--	--	--	27.318.103.458	*Deferred Charge*
Sub Jumlah	**213.107.057.533**	**30.682.231.640**	**--**	**--**	**243.789.289.173**	***Sub Total***
Akumulasi Amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak Transformasi bisnis	(138.822.799.715)	(17.429.804.206)	--	--	(156.252.603.921)	*Business Transformation Software in Process*
Biaya yang Ditangguhkan	(24.145.690.304)	(2.871.269.950)	--	--	(27.016.960.254)	*Deferred Charge*
Sub Jumlah	**(162.968.490.019)**	**(20.301.074.156)**	**--**	**--**	**(183.269.564.175)**	***Sub Total***
Jumlah	**50.138.567.514**				**60.519.724.998**	***Total***

Aset takberwujud berupa perangkat lunak termasuk pelatihan dan implementasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha Grup, seperti sistem operasi, layanan jasa keuangan, dan pengolahan data akuntansi dalam pelaporan keuangan.

Intangible assets represent software including training and implementation that are used to support business activities the Group such as operating systems, financial services, and accounting system used in financial reporting.

Biaya yang ditangguhkan merupakan pengurusan sertifikat bukan hak milik (Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha) yang diamortisasi selama 4 tahun dengan metode garis lurus.

Deferred costs represent deferred maintenance of the certificates which are not property rights (Building Use Rights/Operating Use Rights) which are amortized over 4 years using the straight-line method.

12. ASET TAKBERWUJUD (Lanjutan) / *12. INTANGIBLE ASSETS (Continued)*

Pembebanan penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2023	2022	
Pemilikan Langsung:			*Direct Acquisitions:*
Beban Pokok Layanan (Catatan 22)	15.386.201.985	13.494.381.364	*Cost of Services (Note 22)*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 23)	6.909.312.044	6.806.692.792	*General and Administrative Expense (Note 23)*
Jumlah	**22.295.514.029**	**20.301.074.156**	***Total***

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *13. OTHER NON – CURRENT ASSETS*

	2023	2022	
Piutang Kerugian Perusahaan	285.768.747.682	290.193.377.047	*Receivable from the Company's Losses*
Cadangan Kerugian Penurunan atas Kerugian Perusahaan	(271.956.938.915)	(271.087.858.903)	*Allowance for Impairment on Receivable from The Company's Losses*
Piutang Kerugiaan Perusahaan - Neto	**13.811.808.767**	**19.105.518.144**	***Receivable Losses from The Company - Net***
Taksiran Klaim Lebih Bayar Pajak	41.848.358.590	41.848.358.590	*Estimated Claim for Tax Refund*
Biaya Dibayar di Muka Jangka Panjang	35.895.066.132	20.269.481.800	*Long-term Prepaid Expenses*
Aset Sitaan	14.507.000.000	13.000.000.000	*Confiscated Assets*
Bank Garansi	5.098.075.601	35.117.000	*Guarantee Bank*
Aset Jaminan	246.116.022	976.808.411	*Guarantee Assets*
Aset Lainnya	378	377	*Other Assets*
Sub Jumlah	**97.594.616.723**	**76.129.766.178**	***Sub Total***
Jumlah	**111.406.425.490**	**95.235.284.322**	***Total***

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang atas kerugian Grup adalah sebagai berikut :

Movement of allowance for impairment losses on receivable from the Group's losses are as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	271.087.858.903	267.380.429.824	*Beginning Balance*
Pemulihan Akumulasi Penyisihan Piutang Kerugian Perusahaan	(5.680.816.729)	(841.505.770)	*Recovery of Accumulated Allowance Receivable from Company's Losses*
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyisihan Piutang Kerugian Perusahaan	6.549.896.741	4.548.934.849	*Reclassification from Accumulated Allowance Receivable from Company's Losses*
Jumlah	**271.956.938.915**	**271.087.858.903**	***Total***

Piutang kerugian Grup merupakan piutang yang tidak tertagih sesuai tingkat kolektibilitas untuk piutang usaha dan piutang lainnya. Nilai buku tercatat merupakan aset yang dapat dijaminkan kepada Grup.

Receivable from the Group's losses represent the uncollectible of trade receivables and other receivables according to the collectibility level. Net book value is an asset that can be guaranteed to the Group.

13. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi akun piutang kerugian Grup pada akhir periode pelaporan, Manajemen berpendapat bahwa pencadangan kerugian atas penurunan nilai piutang sudah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul apabila terdapat piutang yang tidak tertagih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Taksiran klaim lebih bayar pajak penghasilan merupakan jumlah keberatan yang diajukan oleh Perusahaan atas SKPLB untuk tahun 2015 (Catatan 15.g), sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan Perusahaan masih dalam proses pengadilan pajak.

Aset lainnya merupakan aset kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak laku terjual selama lelang tahun 2010 dan tahun 2015. Kendaraan tersebut merupakan bekas kendaraan operasional yang telah habis masa manfaatnya dan tidak dioperasionalkan kembali sebanyak 377 unit dan 1 unit aset yang belum dilelang pada tahun 2023. Mutasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

13. OTHER NON – CURRENT ASSETS *(Continued)*

According to examination of the receivables from the Group's losses at the end of the period, the Management believes that the allowance for impairment of receivables has been adequate to cover the losses arising from uncollectible receivables on December 31, 2023 and 2022.

The estimated claim for overpayment of income tax represents the number of objections filed by the Company against SKPLB for 2015 (Note 15.g), until the date of this report, the case is still in the tax court process.

Other assets represent assets of 2-wheeler vehicle and 4-wheeler vehicle which are not sold during auction in 2010 and 2015. The vehicle is a secondhand operational vehicle that has expired its benefits and is not operationalized again as many as 377 units and 1 unit of assets that have not been auctioned in 2023.

	2023	2022	
Saldo Awal	377	377	*Beginning Balance*
Penambahan			*Addition*
Nilai Perolehan Kendaraan	200.000.000	--	*Acquisition Cost of Vehicle*
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(199.999.999)		*Accumulated Depreciation Vehicle*
Pengurangan	--	--	*Deduction*
Jumlah	**378**	**377**	***Total***

14. UTANG USAHA / *14. TRADE PAYABLES*

Utang usaha merupakan kewajiban Grup kepada vendor atas transaksi operasional serta kepada mitra *biller* atas transaksi *settlement biller*.

Trade payables is the Group's obligation to vendors for operational transactions and to biller partners for settlement biller transactions.

	2023	2022	
Utang Layanan Keuangan Weselpos			***Weselpos Financial Services Payables***
Weselpos *Remittance*	3.912.021.550	6.233.887.656	*Weselpos Remittance*
Weselpos Kemitraan Dalam Negeri	8.638.435.352	6.718.366.924	*Weselpos Domestic Subscription*
Sub Jumlah	**12.550.456.902**	**12.952.254.580**	***Sub Total***
Utang Layanan Keuangan Giropos			***Giropos Financial Services Payable***
Giropos	52.346.984.948	141.908.967.360	*Giropos*
Sub Jumlah	**52.346.984.948**	**141.908.967.360**	***Sub Total***
Utang Pospay			***Pospay Services Payables***
Kemitraan Perbankan			*Banking Partner*
Angsuran Asuransi dan Mitra Lainnya	1.088.401.930	362.364.687	*Installment Insurance and Other Partners*
Angsuran Kredit CIMB Niaga	543.533.243	134.854.064	*Installment Loan from CIMB Niaga*
Tabungan E-Batara dan Setoran BTN	--	18.329.356.177	*E-Batara Saving and BTN Deposits*
Angsuran Kredit Citibank	--	27.715.000	*Installment Loan from Citibank*
Sub Jumlah	**1.631.935.173**	**18.854.289.928**	***Sub Total***
Kemitraan Pembiayaan			*Leasing Partner*
Angsuran Kredit Adira Finance	10.516.738.045	4.413.746.002	*Installment Loan from Adira Finance*
Angsuran Kredit Bussan Auto Finance	5.796.242.799	2.011.981.000	*Installment Loan from Bussan Auto Finance*
Angsuran Kredit FIF Finance	4.236.224.548	1.432.747.984	*Installment Loan from FIF Finance*
Angsuran Kredit Mandiri Utama Finance	3.815.719.485	--	*Installment Loan from Mandiri Utama Finance*
Angsuran Kredit Mandiri Tunas Finance	3.762.753.783	3.947.827.286	*Installment Loan from Mandiri Tunas Finance*
Angsuran OTO Kredit Mobil	1.539.574.240	--	*Installment Loan from OTO Kredit Mobil*
Angsuran Kredit Clipan Finance	1.241.638.942	439.231.379	*Installment Loan from Clipan Finance*
Angsuran Kredit Suzuki Finance	1.234.810.635	559.911.470	*Installment Loan from Suzuki Finance*
Angsuran Kredit Mega Auto Finance	1.062.753.632	407.808.050	*Installment Loan from Mega Auto Finance*
Angsuran Kredit Jaccs MPM Finance	883.625.500	286.816.500	*Installment Loan from Jaccs MPM Finance*
Angsuran Kredit Summit Oto Finance	593.416.010	881.019.500	*Installment Loan from Summit Oto Finance*
Nusa Surya Ciptadana (NSC)	585.835.023	--	*Nusa Surya Ciptadana (NSC)*
Angsuran Kredit Indomobil Finance Indonesia	536.467.858	--	*Installment Loan from Indomobil Finance Indonesia*
Angsuran Kredit Artha Asia Finance	245.779.715	88.332.706	*Installment Loan from Artha Asia Finance*
Angsuran Kredit Pembiayaan Lainnya	6.887.146.851	6.122.921.972	*Installment Loan from Others*
Sub Jumlah	**42.938.727.066**	**20.592.343.849**	***Sub Total***

14. UTANG USAHA (Lanjutan) / *14. TRADE PAYABLES (Continued)*

	2023	2022	
Kemitraan *Biller*			*Biller Partnership*
E-Wallet	4.285.841.424	--	*E-Wallet*
Kemitraan *Billers* Lainnya	1.155.633.652	3.912.801.948	*Other Billers Partnership*
BPJS Kesehatan	576.999.996	839.277.734	*BPJS Health*
Setoran PAM/PDAM	547.231.472	39.369.427	*Payment of Water - PAM/PDAM*
E-Commerce	533.457.580	3.373.611.199	*E-Commerce*
Setoran Telekomunikasi dan Seluler	291.731.715	172.262.527	*Payment of Cellular Telecommunication*
Setoran TV Kabel	60.155.072	107.145.346	*Cable TV Deposits*
Penjualan Tiket	27.969.500	46.453.336	*Sales of Ticket*
Sub Jumlah	**7.479.020.411**	**8.490.921.517**	***Sub Total***
Utang Ritel dan Properti			***Trade Retail and Property***
Jasa Properti	663.654.836	813.448.016	*Property Service*
Konsinyasi Lainnya (Sampul, Percetakan)	597.312.833	300.830.818	*Other Consignment (Cover, Printing)*
Benda Materai	--	267.730.000	*Stamps*
Sub Jumlah	**1.260.967.669**	**1.382.008.834**	***Sub Total***
Utang Layanan dan Pos Internasional			***International Post Service Payables***
Terminal Dues	98.596.095.784	101.305.705.087	*Terminal Dues*
Embalance EMS	20.850.540.816	38.811.004.077	*Embalance EMS*
Inward Land Rate	16.768.276.104	50.035.764.741	*Inward Land Rate*
IACD/Service Interior	1.108.240.824	1.853.678.116	*IACD/Service Interior*
Layanan Pos Domestik	135.607.838	124.495.000	*Domestic Post Service*
Sub Jumlah	**137.458.761.366**	**192.130.647.021**	***Sub Total***
Utang Usaha Biaya	218.653.323.077	84.669.404.116	*Cost Payables*
Utang Angsuran Kredit	34.740.070	--	*Bank Credit Installment Payables*
Sub Jumlah	**218.688.063.147**	**84.669.404.116**	***Sub Total***
Jumlah	**474.354.916.682**	**480.980.837.205**	***Total***

Utang usaha biaya merupakan saldo utang usaha atas transaksi beban operasional yang belum dibayarkan ke vendor Grup, proses pembayaran dilakukan secara terjadwal mengikuti aturan Grup yaitu setiap Jumat untuk vendor internal dan setiap tanggal 15 dan 30 untuk vendor eksternal.

Cost payables is the balance of account payables for operational expense transactions that have not been paid to the Group's vendors, the payment process is carried out on a scheduled basis following the Group's rules, which are every Friday for internal vendors and every 15th and 30th for external vendors.

Utang layanan jasa keuangan weselpos merupakan saldo utang kiriman uang yang belum diambil oleh penerima. Saldo utang weselpos dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu saldo wesel kemitraan yang bekerja sama dengan beberapa vendor pengiriman uang, dan weselpos yang merupakan produk wesel yang dikelola oleh Grup.

Weselpos financial service payables is a balance of remittance debt that has not been taken by the recipient of the remittance. The balance of weselpos financial service payables is grouped into 2, which are the balance of partnership money orders in collaboration with several remittance vendors and weselpos which are products managed by the Group.

14. UTANG USAHA (Lanjutan)

Utang layanan jasa keuangan pospay harus diselesaikan oleh Grup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan masing-masing Perjanjian Kerja Sama dengan para mitra yaitu antara 2 hari setelah tanggal transaksi sampai dengan tanggal 20 setiap bulan. Jika melebihi jangka waktu tertentu tersebut Grup akan dikenakan denda antara 1 permil sampai dengan 5% untuk setiap hari keterlambatan.

Utang layanan jasa keuangan giropos merupakan saldo mengendap dari *outstanding* dana virtual *account* pelanggan. *Account* pelanggan tersebut dipotong dengan biaya pemeliharaan rekening untuk rekening yang bersifat umum, tetapi untuk rekening yang bersifat khusus seperti rekening yang digunakan untuk penyaluran dana pemerintah ataupun swasta tidak dipotong dengan biaya pemeliharaan seperti penyaluran dana bantuan sosial tunai dan pembayaran gaji pensiun.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat utang usaha sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 28.

***14. TRADE PAYABLES** (Continued)*

Pospay financial services payables should be completed by the Company within a specified period in accordance with their respective cooperation agreement with the partners which is between two days after the date of transaction until the 20th day of every month. If it exceeds a certain period, the Group will be fined of 1 permil until 5% for each day of delay.

Giropos financial service payables is a deposited balance of outstanding customer virtual account funds. The customer account is deducted from the account maintenance fee for general purposed accounts, but for speciallized bank accounts such as accounts used for the distribution of government or private funds are not deducted with maintenance costs such as disbursement of cash social assistance funds and payment of pension salaries.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of trade payable as disclosed in Note 28.

15. PERPAJAKAN / *15. TAXATION*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	2023	2022	
Perusahaan	--	--	*The Company*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai	592.283.336	--	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan:			*Income Taxes:*
Pasal 28.a	--	1.467.275.200	*Article 28.a*
Jumlah	**592.283.336**	**1.467.275.200**	***Total***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2023	2022	
Perusahaan:			***The Company:***
Pajak Pertambahan Nilai	23.051.466.343	8.331.574.311	*Value Added Tax*
PPN WAPU	6.258.669.052	8.228.145.796	*Value Added Tax WAPU*
Pajak Penghasilan:			*Income Taxes:*
Pasal 21	19.211.180.130	9.833.154.536	*Article 21*
Pasal 22	230.010.636	307.064.839	*Article 22*
Pasal 23	3.972.225.599	2.193.122.437	*Article 23*
Pasal 4(2)	934.763.744	425.055.636	*Article 4(2)*
Pajak Lainnya	174.451.076	155.330.147	*Other Taxes*
Entitas Anak:			***Subsidiaries***
Pajak Pertambahan Nilai	1.607.811.131	1.697.731.867	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan:			*Income Taxes:*
Pasal 21	419.310.192	894.778.916	*Article 21*
Pasal 23	1.981.743.441	742.490.749	*Article 23*
Pasal 25	15.836.278	--	*Article 25*
Pasal 29	2.315.426.644	2.767.392.680	*Article 29*
Pasal 4(2)	357.791.944	233.835.206	*Article 4(2)*
Pajak Lainnya	38.760.807	31.639.854	*Other Taxes*
Jumlah	**60.569.447.017**	**35.841.316.974**	***Total***

15. PERPAJAKAN / *15. TAXATION*

c. Taksiran Pajak Penghasilan Tahun Berjalan / *c. Estimated Current Income Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat dan penghasilan (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between consolidated income before income tax benefit (expense), as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Sesuai Laporan Laba Rugi Konsolidasian	701.891.502.784	618.718.389.050	*Profit Before Income Tax Benefit (Expense) - as Presented in Consolidated Statements of Profit or Loss*
Dikurangi:			*Less:*
Laba Entitas Anak yang Dikonsolidasi Sebelum Pajak Penghasilan dan Eliminasi	31.211.824.422	44.742.529.717	*Profit of Consolidated Subsidiaries Before Income Tax and Elimination*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan - Perusahaan	**733.103.327.206**	**660.066.571.147**	***Profit Before Income Tax - Company***
Beda Tetap:			***Permanent Differences***
Bantuan Pelayanan Publik LPU	(366.120.584.914)	(343.586.407.407)	*Public Service of UPS*
Selisih Nilai Wajar Properti Investasi	(180.908.787.300)	288.906.200.881	*Difference in Fair Value of Investment Properties*
SKPKB Denda Pajak dan Pajak Final	22.416.023.429	14.778.654.883	*Tax Penalty and Final Tax*
Tunjangan Pangan dan Duka Pensiun	55.024.775.831	54.540.748.200	*Allowance For Meals And Pension*
Pembinaan Jasmani dan Rohani	1.445.705.800	611.084.987	*Physical and Spiritual Guidance*
Pemasaran Properti	107.734.832.157	7.313.507.341	*Property Marketing*
Sumbangan dan Bencana Alam	49.540.000	175.377.746	*Donation and Disaster*
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final	(58.821.064.097)	(631.526.774.417)	*Income Already Subjected to Final Income Tax*
Penyusutan	(298.948.783)	(14.408.631.459)	*Depreciation*
Lainnya	(71.514.399.975)	57.296.613.147	*Others*
Jumlah Beda Tetap	**(490.992.907.852)**	**(565.899.626.098)**	***Total Permanent Differences***
Beda Waktu:			***Timing Differences:***
Liabilitas Imbalan Kerja	(43.629.000.714)	111.581.078.244	*Employee Benefit Liabilities*
Provisi (Pemulihan) Penurunan Nilai Piutang	70.896.373.708	(79.566.919.640)	*Provision (Recovery) for Impairment of Receivables*
Penyisihan Uang Muka	16.951.213.083	--	*Provision for Advance*
Jumlah Beda Waktu	**44.218.586.077**	**32.014.158.604**	
Taksiran Laba Fiskal Perusahaan Tahun Berjalan	**286.329.005.431**	**126.181.103.653**	***Estimated Taxable Income of the Company Current Year***

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

c. Taksiran Pajak Penghasilan Tahun Berjalan (Lanjutan)

c. Estimated Current Income Tax *(Continued)*

	2023	2022	
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya			***Tax Loss Carry Forward***
Tahun 2022	(40.603.061.985)	--	*Year 2022*
Tahun 2021	(154.490.936.592)	(154.490.936.592)	*Year 2021*
Tahun 2020	(152.511.331.472)	(152.511.331.472)	*Year 2020*
Tahun 2019	(733.536.207.230)	(733.536.207.230)	*Year 2019*
Tahun 2018	(453.970.147.338)	(453.970.147.338)	*Year 2018*
Jumlah Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya	**(1.535.111.684.617)**	**(1.494.508.622.632)**	***Total Tax Loss Carry Forward***
Taksiran Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Setelah Kompensasi Rugi Fiskal	**(1.248.782.679.186)**	**(1.368.327.518.979)**	***Estimated Taxable Loss After Compensation of Tax Loss Carry Forward***
Taksiran Laba (Rugi) Kena Pajak			***Estimated Taxable Income (Loss)***
Perusahaan	**(1.248.782.679.186)**	**(1.368.327.518.979)**	*The Company*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Pos Logistik Indonesia	(2.377.907.000)	(34.396.127.000)	*PT Pos Logistic Indonesia*
PT Pos Finansial Indonesia	(6.826.800.000)	(9.344.730.000)	*PT Pos Finansial Indonesia*
PT Pos Properti Indonesia	576.138.000	863.797.000	*PT Pos Properti Indonesia*
Jumlah	**(1.257.411.248.186)**	**(1.411.204.578.979)**	***Total***
Beban Pajak Kini Konsolidasian			***Consolidated Current Tax Expense***
Perusahaan - Penyesuaian Hasil Pemeriksaan Fiskus Tahun Sebelumnya	193.336.281	--	*The Company - Adjustment of Previous Year's Audit Result*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Pos Logistik Indonesia	1.075.185.346	--	*PT Pos Logistic Indonesia*
PT Pos Finansial Indonesia	--	--	*PT Pos Finansial Indonesia*
PT Pos Properti Indonesia	126.750.360	190.035.340	*PT Pos Properti Indonesia*
Jumlah Beban Pajak Kini Konsolidasian	**1.395.271.987**	**190.035.340**	***Total Consolidated Current Tax Expense***

15. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *15. TAXATION (Continued)*

d. Pajak Tangguhan / *d. Deferred Tax*

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The deferred tax benefits (expense) computation on significant temporary differences between commercial and fiscal statements using tax rates as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss*	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	2023	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perusahaan:						***Deferred Tax Assets (Liabilities) of the Company:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang & Uang Muka	91.587.414.155	19.326.469.094	--	--	110.913.883.249	*Allowance for Impairment of Trade Receivables & Advance*
Imbalan Pasca Kerja	265.403.584.218	(9.598.380.157)	(12.707.192.559)	--	243.098.011.502	*Employee Benefits*
Pembayaran Sewa Pembiayaan	(18.506.986.958)	(1.679.891.928)	--	--	(20.186.878.886)	*Payment of Finance Leases*
Penyusutan Aset Hak Guna	15.691.084.965	1.679.891.928	--	--	17.370.976.893	*Depreciation Right-of-use Assets*
Sub Jumlah	**354.175.096.380**	**9.728.088.937**	**(12.707.192.559)**	**--**	**351.195.992.758**	***Sub Total***
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Entitas Anak:						***Deferred Tax Assets (Liabilities) Subsidiaries:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	10.752.504.283	897.513.358	--	--	11.650.017.641	*Allowance for Impairment of Trade Receivables*
Imbalan Pasca Kerja	477.540.412	35.536.692	41.146.012	--	554.223.116	*Employee Benefits*
Penyusutan Aset Tetap	370.155.791	47.747.943	--	(242.555.617)	175.348.117	*Depreciation of Fixed Assets*
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	(7.088.535.580)	905.242.143	--	--	(6.183.293.437)	*Depreciation of Leased Assets*
Penyisihan Piutang Usaha	5.811.221.351	4.681.920.448	--	2.210.999.740	12.704.141.539	*Allowance for Trade Receivable*
Penyisihan Piutang Lain-lain	46.547.926	3.740.000.000	--	--	3.786.547.926	*Allowance for Other Receivable*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.419.124.667	2.471.149.277	--	2.354.000.000	6.244.273.944	*Accrued Revenue*
Provisi Jangka Panjang	(294.190.100)	--	--	294.190.100	--	*Long-term Provision*
Aset Hak Guna	(171.703.404)	71.440.236	--	--	(100.263.168)	*Right-of-use Assets*
Rugi Fiskal	7.567.148.075	523.139.546	--	--	8.090.287.621	*Fiscal Loss*
Sub Jumlah	**18.889.813.421**	**13.373.689.643**	**41.146.012**	**4.616.634.223**	**36.921.283.299**	***Sub Total***
Jumlah	**373.064.909.801**	**23.101.778.580**	**(12.666.046.547)**	**4.616.634.223**	**388.117.276.057**	***Total***

15. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *15. TAXATION (Continued)*

d. Pajak Tangguhan (Lanjutan) / *d. Deferred Tax (Continued)*

	2021	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi / *Credited (Charged) to Profit or Loss*	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Charged to Other Comprehensive Income*	2022	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perseroan:					***Deferred Tax Assets (Liabilities) of the Company:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	77.948.272.359	13.639.141.795	--	91.587.414.154	*Allowance for Impairment of Trade Receivables*
Imbalan Pasca Kerja	189.604.525.460	(633.972.904)	76.433.031.662	265.403.584.218	*Employee Benefits*
Pembayaran Sewa Pembiayaan	(17.757.111.286)	(749.875.672)	--	(18.506.986.958)	*Payment of Finance Leases*
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	14.941.209.293	749.875.672	--	15.691.084.965	*Depreciation of Leased Assets*
Sub Jumlah	**264.736.895.826**	**13.005.168.891**	**76.433.031.662**	**354.175.096.379**	***Sub Total***
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Entitas Anak:					***Deferred Tax Assets (Liabilities) Subsidiaries:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	10.752.504.283	--	--	10.752.504.283	*Allowance for Impairment of Trade Receivables*
Imbalan Pasca Kerja	517.712.367	(79.570.830)	39.398.875	477.540.412	*Employee Benefits*
Penyusutan Aset Tetap	191.470.121	178.685.670	--	370.155.791	*Depreciation of Fixed Assets*
Amortisasi Aset Takberwujud	1.246.667	(1.246.667)	--	--	*Amortization of Intangible Assets*
Penyusutan Aset Sewa Guna Usaha	(6.370.124.977)	(718.410.603)	--	(7.088.535.580)	*Depreciation of Leased Assets*
Penyisihan Piutang Usaha	6.851.553.804	(1.040.332.453)	--	5.811.221.351	*Allowance for Trade Receivable*
Penyisihan Piutang Lain-lain	46.547.926	--	--	46.547.926	*Allowance for Other Receivable*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.419.124.667	--	--	1.419.124.667	*Accrued Revenue*
Provisi Jangka Panjang	--	(294.190.100)	--	(294.190.100)	*Long-term Provision*
Aset Hak Guna	(165.526.694)	(6.176.710)	--	(171.703.404)	*Right-of-use Assets*
Rugi Fiskal	93.116.274	7.474.031.801	--	7.567.148.075	*Fiscal Loss*
Sub Jumlah	**13.337.624.438**	**5.512.790.108**	**39.398.875**	**18.889.813.421**	***Sub Total***
Jumlah	**278.074.520.264**	**18.517.958.999**	**76.472.430.537**	**373.064.909.800**	***Total***

e. Manfaat Pajak / *e. Income Tax Benefit*

	2023	2022	
Perusahaan			***The Company***
Pajak Kini	--	--	*Current IncomeTax*
Pajak Kini - Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya	(193.336.281)	--	*Current Tax - Prior Year Adjustment*
Pajak Tangguhan	9.728.088.937	13.005.168.891	*Deferred Tax*
Sub Jumlah	**9.534.752.656**	**13.005.168.891**	***Sub Total***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Pajak Kini	(126.750.360)	(190.035.340)	*Current IncomeTax*
Pajak Kini - Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya	(1.075.185.346)	--	*Current Tax - Prior Year Adjustment*
Pajak Tangguhan	17.990.323.866	5.512.790.108	*Deferred Tax*
Sub Jumlah	**16.788.388.160**	**5.322.754.768**	***Sub Total***
Jumlah	**26.323.140.816**	**18.327.923.659**	***Total***

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

f. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

f. Estimated Claim for Tax Refund

Akun ini merupakan taksiran kelebihan pembayaran pajak penghasilan Grup yang menurut Manajemen dapat diperoleh kembali, dengan rincian sebagai berikut:

Estimated claims for tax refund represent the Group's over payment of income tax which in the Management's opinion can be refunded, with details as follows:

	2023	2022	
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan			***Estimated Claim for Tax Refund***
Perusahaan			***The Company***
2023	16.270.091.198	--	*2023*
2022	12.255.864.517	13.964.205.234	*2022*
2021	--	10.890.607.934	*2021*
Sub Jumlah Perusahaan	**28.525.955.715**	**24.854.813.168**	***Sub Total the Company***
Entitas Anak			***Subsidiaries***
2023	15.150.581.961	--	*2022*
2022	8.875.946.958	9.783.991.188	*2022*
2021	--	7.551.651.318	*2021*
Sub Jumlah Entitas Anak	**24.026.528.919**	**17.335.642.506**	***Sub Total Subsidiaries***
Jumlah	**52.552.484.634**	**42.190.455.674**	***Total***

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.00196A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp10.697.271.653, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp282.353.588, sehingga jumlah dibayarkan sebesar Rp10.414.918.065. Perusahaan telah menerima kelebihan pajak ini pada tanggal 4 Mei 2023.

On May 8, 2023, the Company received an Tax Overpayment Refund Order of Corporate Income Tax No.00549A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2021 fiscal year amounting to Rp10,697,271,653, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp282,353,588, so that it was paid amounting to Rp10,414,918,065. The Company has received this excess tax on May 4, 2023.

Perusahaan menghapus selisih estimasi tagihan pajak penghasilan badan tersebut sebesar Rp193.336.281 dan dicatat sebagai Pajak Kini – Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya.

The Company wrote off the difference in the estimated claim for corporate income tax amounting to Rp193,336,281 and recorded it as Current Tax - Prior Year Adjustment.

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pada tanggal 8 Mei 2023, Entitas anak PLI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Pajak Penghasilan Badan No.00549A, atas kelebihan pembayaran PPh Badan untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp6.476.465.972, dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sebesar Rp1.118.261.556, sehingga jumlah dibayarkan sebesar Rp5.358.204.416. PLI telah menerima kelebihan pajak ini pada tanggal 31 Mei 2023.

PLI menghapus selisih estimasi tagihan pajak penghasilan badan tersebut sebesar Rp1.075.185.346 dan dicatat sebagai Pajak Kini – Penyesuaian dari Tahun Sebelumnya.

Perusahaan mengajukan restitusi atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp12.255.864.517. Sampai pada saat pelaporan Perusahaan masih dalam proses pemeriksaan pajak.

PLI mengajukan restitusi atas Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp8.501.558.107. Sampai pada saat pelaporan Perusahaan masih dalam proses pemeriksaan pajak.

***15. TAXATION** (Continued)*

***f. Estimated Claim for Tax Refund** (Continued)*

On May 8, 2023, subsidiaries PLI received an Tax Overpayment Refund Order of Corporate Income Tax No.00549A, regarding the overpayment of Corporate Income Tax for the 2021 fiscal year amounting to Rp6,476,465,972, with tax payable compensation through SPMKP deductions amounting to Rp1,118,261,556, so that it was paid amounting to Rp5,358,204,416. PLI has received this excess tax on May 31, 2023.

PLI wrote off the difference in the estimated claim for corporate income tax amounting to Rp1,075,185,346 and recorded it as Current Tax - Prior Year Adjustment.

The Company filed for the restitution of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp12,255,864,517. Up to the date of this report, the Company is still undergoing tax audit.

PLI filed for the restitution of Corporate Income Tax for the 2022 fiscal year amounting to Rp8,501,558,107. Up to the date of this report, the Company is still undergoing tax audit.

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 6 Desember 2019, Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat Nomor S-3885/WPJ 19/2019 tentang Surat Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP01018/ KEB/WPJ19/2019, dalam surat tersebut Direktur Jendral Pajak sebagai Terbanding memberi tanggapan atas permohonan banding Perusahaan (pemohon banding) atas keberatan dilakukannya koreksi terhadap penyesuaian fiskal negatif berupa Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) sebesar Rp341.598.000.000 dalam SPT Badan tahun 2016. Berdasarkan tanggapan Terbanding, dasar hukum koreksi atas penyesuaian fiskal negatif terhadap BO-LPU yang dilakukan Terbanding adalah berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pertimbangan hukumnya adalah bahwa BO-LPU yang diterima pemohon banding dari pemerintah RI (selaku pemegang saham) tersebut dianggap:

a. Termasuk sebagai "Penghasilan" karena memenuhi unsur sebagai tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, oleh karenanya "dianggap" sebagai objek pajak (*Vide*, Pasal 4 ayat 1 UU PPh).

***15. TAXATION** (Continued)*

g. Tax Assesments

On December 6, 2019, the Director General of Taxes issued a letter Number S-3885/WPJ 19/2019 concerning Letter of Appeals on the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-01018/ KEB/WPJ19/2019, in that letter the Director General of Taxes as Apellee responding to the Company's appeal petition (appealant) against the objection to the correction of negative fiscal adjustments in the form of Universal Post Service Operational Assistance (OA-UPS) amounting to Rp341,598,000,000 in the Annual Income Tax Return fiscal year 2016. Based on Apellee's responses, the legal basis for correction of negative fiscal adjustments to the OA-UPS conducted by the Apellee is based on tax legislation. The legal consideration is that the OA-UPS received by the appealant from the Government of Republic of Indonesia (as a shareholder) is considered:

a. Included as "Income" because it fulfills the element as an additional economic ability by name and in any form that can be used for consumption or to add to the wealth of Taxpayer, therefore "considered" as a tax object (Vide, Article 4 paragraph 1 of the Income Tax Law).

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

b. Tidak termasuk dikecualikan sebagai objek pajak, karena BO-LPU *in litis*, kedudukannya oleh Terbanding dipersamakan dengan “bantuan dan sumbangan” yang diterima oleh WP/Pemohon Banding (Pihak/Pihak BO-LPU) dari pemerintah RI selaku pemegang sahamnya (Pihak/WP Pemberi BO-LPU) karena antara para pihak tersebut terdapat hubungan kerja usaha dan hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan satu sama lain. Sehingga terhadap BO-LPU *in litis* dilakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif dalam SPT Badan tahun 2016.

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan putusan salinan pajak atas gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00024/406/17/093/19 tahun pajak 2017 tanggal 7 Mei 2019 yang membatalkan seluruh koreksi yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak sebesar Rp588.551.106.

***15. TAXATION** (Continued)*

***g. Tax Assesments** (Continued)*

b. Not excluded as a tax object, because OA-UPS in litis, its position by Apellee is equivalent to "assistance and donations" received by Taxpayer/Appellant (Parties/Parties of OA-UPS) from the Indonesian Government as its shareholders (Parties/Taxpayer Giving OA-UPS) because between the parties there is a business employment relationship and ownership or control relationship with each other. So that the OA-UPS in litis was corrected for the Negative Fiscal Adjustment in the Annual Tax Return fiscal year 2016.

On December 2, 2019, the Company obtained a copy of tax decision on the lawsuit against the Income Tax Assessment Letter (SKPLB) of Income Tax Number 00024/406/17/093/19 fiscal year 2017 dated May 7, 2019 which canceled all corrections made by the Director General of Taxes amounting to Rp588,551,106.

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2020, Perusahaan mengeluarkan Surat Bantahan Nomor 58/Dir-1/0120 terhadap Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-3885/WPJ 19/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Surat Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, dalam suratnya Perusahaan dalam hal ini sebagai Pemohon Banding dengan berdasarkan argumentasi hukum tidak sependapat dengan seluruh dasar dan pertimbangan hukum serta alasan koreksi yang didalilkan dan ditetapkan oleh Terbanding, karena dasar yang dikonstatir, pertimbangan dan alasan hukum koreksi yang dikonstitusinya tidak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku dan tidak mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya (tidak sesuai dengan sifat usaha WP). Sehingga hasil koreksi atas penyesuaian fiskal negatif berupa Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO-LPU) sebesar Rp341.598.000.000 harus dibatalkan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diterima oleh Perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp42.903.902.988. Perusahaan mengajukan kembali kelebihan pembayaran pajak atas BO-LPU tahun 2015 sebesar Rp41.848.358.688 sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan Perusahaan masih dalam proses pengadilan pajak.

***15. TAXATION** (Continued)*

***g. Tax Assesments** (Continued)*

On January 16, 2020, the Company issued an Objection Letter Number 58/Dir-1/0120 to the Director General of Taxes Letter Number S-3885/WPJ19/2019 dated December 6, 2019 concerning Letter of Appeal to the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-01018/KEB/WPJ19/2019, in his letter the Company in this case as an Appallant based on legal arguments does not agree with all legal basis and law considerations and the reasons for correction which are postulated and determined by the Appellee, because the basis is constrained, the legal considerations and reasons for correction whose constitution is not in accordance with the applicable tax law and does not reflect actual business activities (not in accordance with the nature of Taxpayer business). So that the correction results of the negative fiscal adjustment in the form of Universal Postal Service Operational Assistance (OA-UPS) amounting to Rp341,598,000,000 must be canceled.

The refund for the overpayment of tax has been received by the Company in 2020 amounting to Rp42,903,902,988. The company resubmitted the overpayment of tax on OA-UPS in 2015 amounting to Rp41,848,358,688 until the date of this report, the case is still in the tax court process.

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

Pada tanggal 4 Januari 2023, Perusahaan menerima memori peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak Nomor PUT-014103.99/2021/PP/M.VIIIB tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang pengembalian keterlanjuran kelebihan pembayaran pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2015 tentang pajak Bantuan Operasional Layanan Pos Universal (BO LPU) bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2023 dan 2022 Grup menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 4 ayat 2 dan PPN dengan rincian sebagai berikut:

***15. TAXATION** (Continued)*

***g. Tax Assesments** (Continued)*

On January 4, 2023, the Company proposed a files for judicial review of tax court decisions Number PUT-014103.99/2021/PP/M.VIIIB of 2022 dated September 28, 2022 regarding the refund of tax overpayment on the Tax Assessment Letter (SKP) of 2015 concerning the Universal Postal Service Operational Assistance (OA-UPS) tax not an Income Tax Object.

In 2023 and 2022, the Grup received Tax Collection Letter on Income Tax Articles 21, 23, 4 (2) and VAT with the following details:

Surat Pajak/ ***Tax Assesment Letters***	**Jenis Pajak/** ***Type of Tax***	**Total/** ***Amounts***
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00002/101/22/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00002/101/23/954/23	PPh Pasal 21	12.041
00004/101/19/832/23	PPh Pasal 21	100.353
00008/101/20/832/23	PPh Pasal 21	100.000
00009/101/20/302/23	PPh Pasal 21	100.000
00009/101/23/804/23	PPh Pasal 21	167.337
00011/101/23/804/23	PPh Pasal 21	97.597
00012/101/21/127/23	PPh Pasal 21	462.499
00012/101/21/647/23	PPh Pasal 21	316.600
00012/101/22/513/23	PPh Pasal 21	21.126
00015/201/19/655/23	PPh Pasal 21	309.785
00016/101/21/303/23	PPh Pasal 21	471.570
00016/201/19/655/23	PPh Pasal 21	401.410
00017/201/19/655/23	PPh Pasal 21	5.072.602
00020/101/20/303/23	PPh Pasal 21	100.000
00020/101/23/093/23	PPh Pasal 21	100.000
00022/101/21/629/23	PPh Pasal 21	2.092

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	**Jenis Pajak/** *Type of Tax*	**Total/** *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00022/101/21/804/23	PPh Pasal 21	100.000
00023/101/21/629/23	PPh Pasal 21	412.747
00023/101/21/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00027/101/21/116/23	PPh Pasal 21	541.728
000281/101/19/952/23	PPh Pasal 21	1.772
00029/101/20/313/23	PPh Pasal 21	200.000
00030/101/22/541/23	PPh Pasal 21	56.148
00031/101/21/127/23	PPh Pasal 21	23.055
00031/101/23/942/23	PPh Pasal 21	30.983
00038/101/21/803/23	PPh Pasal 21	100.000
00046/101/20/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00047/101/19/813/23	PPh Pasal 21	100.000
00050/101/22/101/23	PPh Pasal 21	4.789
00057/101/22/221/23	PPh Pasal 21	11.133
00059/101/22/629/23	PPh Pasal 21	222
00063/101/20/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00066/101/21/822/23	PPh Pasal 21	100.000
00067/101/20/822/23	PPh Pasal 21	487.398
00068/101/20/952/23	PPh Pasal 21	100.000
00072/101/22/093/23	PPh Pasal 21	161.330
00077/103/20/629/23	PPh Pasal 21	100.000
00078/103/20/629/23	PPh Pasal 21	100.000
00079/101/22/517/23	PPh Pasal 21	143.345
00082/101/22/956/23	PPh Pasal 21	4.459
00089/101/22/526/23	PPh Pasal 21	52.136
00096/101/21/605/23	PPh Pasal 21	205.431
00100/101/19/804/23	PPh Pasal 21	100.000
00103/101/20/332/23	PPh Pasal 21	100.000
00105/101/20/309/23	PPh Pasal 21	100.000
00109/101/20/803/23	PPh Pasal 21	100.000
00116/101/11/127/22	PPh Pasal 21	17.880
00117/101/11/127/22	PPh Pasal 21	343.911
00118/101/11/127/22	PPh Pasal 21	27.362
00123/101/21/419/23	PPh Pasal 21	322.660
00125/101/21/419/23	PPh Pasal 21	720.067
00126/101/19/804/23	PPh Pasal 21	17.857
00129/101/21/307/23	PPh Pasal 21	181.400
00138/101/18/952/23	PPh Pasal 21	43.922
00149/101/22/542/23	PPh Pasal 21	14.951
00158/101/22/729/23	PPh Pasal 21	26.957
00162/101/22/824/22	PPh Pasal 21	100.000
00168/101/22/642/23	PPh Pasal 21	17.363
00182/101/20/419/23	PPh Pasal 21	100.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	**Jenis Pajak/** *Type of Tax*	**Total/** *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00182/101/20/954/23	PPh Pasal 21	100.000
00182/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00187/101/22/419/23	PPh Pasal 21	913.894
00188/101/19/626/23	PPh Pasal 21	53.934
00193/101/22/423/23	PPh Pasal 21	38.893.356
00204/101/20/423/23	PPh Pasal 21	100.000
00241/101/19/438/23	PPh Pasal 21	12.801
00247/101/20/304/23	PPh Pasal 21	100.000
00304/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00305/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00306/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00307/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00308/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00326/101/22/543/22	PPh Pasal 21	30.104
00350/101/22/407/23	PPh Pasal 21	559.654
00373/101/20/307/23	PPh Pasal 21	100.000
00385/101/19/402/23	PPh Pasal 21	154.905
00387/101/19/429/23	PPh Pasal 21	535.549
00457/101/19/905/23	PPh Pasal 21	108.671
00514/101/22/732/23	PPh Pasal 21	100.000
00003/103/19/608/23	PPh Pasal 23	100.000
00003/103/19/733/23	PPh Pasal 23	19.206
00004/103/19/733/23	PPh Pasal 23	100.000
00007/103/20/442/23	PPh Pasal 23	100.000
00008/103/19/509/23	PPh Pasal 23	918.412
00011/103/19/832/23	PPh Pasal 23	2.534
00014/103/19/203/23	PPh Pasal 23	106.652
00018/103/19/626/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/406/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00023/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00024/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00025/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00028/103/19/735/23	PPh Pasal 23	100.000
00032/103/19/804/23	PPh Pasal 23	137.474
00044/103/19/712/23	PPh Pasal 23	100.000
00045/103/19/649/23	PPh Pasal 23	100.000
00046/103/19/647/23	PPh Pasal 23	200.000
00047/103/19/647/23	PPh Pasal 23	100.000
00047/103/19/741/23	PPh Pasal 23	100.000
00049/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00050/103/19/645/23	PPh Pasal 23	82.328
00054/103/21/438/23	PPh Pasal 23	17.955

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00182/101/20/954/23	PPh Pasal 21	100.000
00182/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00187/101/22/419/23	PPh Pasal 21	913.894
00188/101/19/626/23	PPh Pasal 21	53.934
00193/101/22/423/23	PPh Pasal 21	38.893.356
00204/101/20/423/23	PPh Pasal 21	100.000
00241/101/19/438/23	PPh Pasal 21	12.801
00247/101/20/304/23	PPh Pasal 21	100.000
00304/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00305/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00306/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00307/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00308/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00326/101/22/543/22	PPh Pasal 21	30.104
00350/101/22/407/23	PPh Pasal 21	559.654
00373/101/20/307/23	PPh Pasal 21	100.000
00385/101/19/402/23	PPh Pasal 21	154.905
00387/101/19/429/23	PPh Pasal 21	535.549
00457/101/19/905/23	PPh Pasal 21	108.671
00514/101/22/732/23	PPh Pasal 21	100.000
00003/103/19/608/23	PPh Pasal 23	100.000
00003/103/19/733/23	PPh Pasal 23	19.206
00004/103/19/733/23	PPh Pasal 23	100.000
00007/103/20/442/23	PPh Pasal 23	100.000
00008/103/19/509/23	PPh Pasal 23	918.412
00011/103/19/832/23	PPh Pasal 23	2.534
00014/103/19/203/23	PPh Pasal 23	106.652
00018/103/19/626/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/406/23	PPh Pasal 23	100.000
00022/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00023/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00024/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00025/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00028/103/19/735/23	PPh Pasal 23	100.000
00032/103/19/804/23	PPh Pasal 23	137.474
00044/103/19/712/23	PPh Pasal 23	100.000
00045/103/19/649/23	PPh Pasal 23	100.000
00046/103/19/647/23	PPh Pasal 23	200.000
00047/103/19/647/23	PPh Pasal 23	100.000
00047/103/19/741/23	PPh Pasal 23	100.000
00049/103/19/645/23	PPh Pasal 23	100.000
00050/103/19/645/23	PPh Pasal 23	82.328
00054/103/21/438/23	PPh Pasal 23	17.955

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2023		
Surat Tagihan Pajak		
00071/103/19/727/23	PPh Pasal 23	100.000
00074/103/20/646/23	PPh Pasal 23	100.000
00092/103/19/093/23	PPh Pasal 23	100.000
00099/103/19/217/23	PPh Pasal 23	116.732
00105/103/20/438/23	PPh Pasal 23	100.000
00107/103/19/646/23	PPh Pasal 23	100.000
00192/103/20/655/23	PPh Pasal 23	100.000
00193/103/20/655/23	PPh Pasal 23	100.000
00282/101/22/727/23	PPh Pasal 23	2.706
00409/103/19/416/23	PPh Pasal 23	166.689
00410/103/19/416/23	PPh Pasal 23	133.650
00004/106/18/093/23	PPh Pasal 29	1.000.000
00019/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00020/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00021/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00022/140/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00030/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00031/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00032/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00033/140/20/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00035/140/19/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00030/187/21/093/23	PPN	673.169
00031/187/21/093/23	PPN	74.022
00032/187/21/093/23	PPN	107.683
00033/187/21/093/23	PPN	3.633.174
00034/187/21/093/23	PPN	370.065
00035/187/21/093/23	PPN	2.141.765
00036/187/21/093/23	PPN	6.869.269
00037/187/21/093/23	PPN	14.518.608
00038/187/21/093/23	PPN	6.688.365
00039/187/21/093/23	PPN	30.767.236
00053/207/21/093/23	PPN	109.627.742
00066/107/21/093/23	PPN	101.659.611
00256/107/22/955/23	PPN	500.000
01000/107/22/955/23	PPN	500.000
04071/107/22/955/23	PPN	500.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *15. TAXATION (Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan) / *g. Tax Assesments (Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
Surat Ketetapan Pajak		
00002/243/21/093/23	PPh Pasal 21	16.090.789
00005/202/21/093/23	PPh Pasal 22	2.686.544
00007/201/21/093/23	PPh Pasal 21	2.259.871.386
00009/240/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	1.101.826.599
00010/240/21/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	246.930.346
00012/203/21/093/23	PPh Pasal 23	564.744.823
00015/201/19/093/21	PPh Pasal 21	226.759.840
00015/202/19/093/21	PPh Pasal 22	48.909.284
00017/240/19/093/21	PPh Pasal 4 ayat (2)	240.501.360
00035/203/19/093/21	PPh Pasal 23	406.884.280
00054/207/21/093/23	PPN	2.033.192.221
00093/207/19/093/2	PPN	884.118.952
Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan		
S-1030/IMB/KPP.2706/06/2023	PPh Pasal 21	1.454.404
S-1717/P2DK/KPP.2506/2022	PPh Pasal 21	3.345.000
S-3019/KPP.2808/2022	PPh Pasal 21	346.644
S-577/KPP.2507/2022	PPh Pasal 21	384.000
S-620/KPP.2808/2022	PPh Pasal 21	1.524.001
S-765/KPP.2502/2022	PPh Pasal 21	14.793.725
S-871/KPP.0301/2022	PPh Pasal 21	2.454.271
S-99/P2DK/KPP.2505/2023	PPh Pasal 21	9.123.385
SP2DK-3/WPJ.09/KP.05/2022	PPh Pasal 21	3.989.296
SP2DK-379/WPJ.08/KP.05/2022	PPh Pasal 21	1.584.000
SP2DK-602/WPJ.29/KP.09/2022	PPh Pasal 21	546.449
SP2DK-663/WPJ.29/KP.09/2022	PPh Pasal 21	471.562
Laporan Hasil Penelitian		
LAP-140/LHPT/KPP.260607/2023	PPh Pasal 21	5.026.603
Total		**8.418.163.697**

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	**Jenis Pajak/** *Type of Tax*	**Total/** *Amounts*
2022		
Surat Tagihan Pajak		
00165/507/20/093/22	PPN	274.175.918
01.001.620.2.093.000	PPN	15.510.523
00017/587/19/093/22	PPN	5.371.768
00026/201/20/093/22	PPh 21	752.071.609
00021/203/20/093/22	PPh 23	514.710.771
00044/101/17/127/21	PPh Pasal 21	100.000
00072/103/21/403/21	PPh Pasal 23	100.000
00767/101/21/402/21	PPh Pasal 21	100.000
00004/101/18/956/22	PPh Pasal 21	137.746
00003/101/18/956/22	PPh Pasal 21	100.000
00006/103/20/951/22	PPh Pasal 23	45.607
00189/101/17/953/22	PPh Pasal 21	100.000
00039/101/20/953/22	PPh Pasal 21	100.000
00014/103/21/412/22	PPh Pasal 23	34.153
00019/101/21/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00112/101/21/732/22	PPh Pasal 21	72.607
00014/103/21/419/22	PPh Pasal 23	20.947
00023/101/19/407/22	PPh Pasal 21	100.000
00038/103/21/332/22	PPh Pasal 23	100.000
00019/103/21/429/22	PPh Pasal 23	16.773
00043/101/21/952/22	PPh Pasal 21	45.815
00009/101/22/952/22	PPh Pasal 21	8.305
00213/101/21/402/22	PPh Pasal 21	100.000
00018/103/21/406/22	PPh Pasal 23	29.053
00021/103/21/407/22	PPh Pasal 23	24.451
00037/101/20/307/22	PPh Pasal 21	100.000
00115/101/21/942/22	PPh Pasal 21	100.000
00047/101/21/813/22	PPh Pasal 21	100.000
00074/101/21/824/22	PPh Pasal 21	100.000
00022/103/19/702/22	PPh Pasal 23	100.000
00018/101/18/307/22	PPh Pasal 21	43.330
00018/103/19/307/22	PPh Pasal 23	14.335
00028/103/21/419/22	PPh Pasal 23	100.000
00129/101/21/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00366/101/21/423/22	PPh Pasal 21	97.433
00013/101/18/106/22	PPh Pasal 21	25.512
00015/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00020/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00049/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00115/101/01/951/01	PPh Pasal 21	50.000
00176/101/01/951/01	PPh Pasal 21	50.000
00325/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00375/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2022		
Surat Tagihan Pajak		
00390/101/01/951/02	PPh Pasal 21	50.000
00042/201/02/952/03	PPh Pasal 21	11.963.271
00270/101/01/952/03	PPh Pasal 21	100.000
00001/101/08/952/08	PPh Pasal 21	100.000
00002/201/04/712/05	PPh Pasal 21	145.975
00019/201/91/311/93	PPh Pasal 21	4.454.085
00013/201/97/101/98	PPh Pasal 21	13.015.743
00212/101/02/101/03	PPh Pasal 21	100.000
00047/101/93/625/93	PPh Pasal 21	60.000
00328/101/20/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00326/101/20/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00257/103/21/093/21	PPh Pasal 23	98.684
00267/101/21/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00254/103/21/093/21	PPh Pasal 23	2.034.029
00159/101/21/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00229/103/21/093/21	PPh Pasal 23	2.165.257
00258/103/21/093/21	PPh Pasal 23	62.434
00327/101/20/093/21	PPh Pasal 21	100.000
00117/101/21/423/22	PPh Pasal 21	1.999.870
00037/103/21/423/22	PPh Pasal 23	100.000
00184/101/21/113/22	PPh Pasal 21	12.194
00021/103/20/201/22	PPh Pasal 23	13.829
00111/103/21/423/22	PPh Pasal 23	47.222
00366/101/21/423/22	PPh Pasal 21	97.433
00186/101/21/111/22	PPh Pasal 21	24.997
00063/103/22/093/22	PPh Pasal 23	19.974
00149/103/21/093/22	PPh Pasal 23	28.767
00055/103/22/416/22	PPh Pasal 23	392.502
00163/103/22/416/22	PPh Pasal 23	473.578
00164/103/21/453/22	PPh Pasal 23	16.810
00150/103/21/093/22	PPh Pasal 23	56.208
00152/103/21/093/22	PPh Pasal 23	1.046.921
00060/103/21/405/22	PPh Pasal 23	4.160
00025/103/21/426/22	PPh Pasal 23	46.690
00033/103/21/438/22	PPh Pasal 23	11.344
00001/103/21/442/22	PPh Pasal 23	12.723
00002/241/20/093/22	PPh Pasal 15	4.342.830.671
00001/201/21/655/22	PPh Pasal 21	5.471.709
00081/103/19/21/22	PPh Pasal 23	137.698
00066/103/19/217/22	PPh Pasal 23	257.955
00160/101/19/217/22	PPh Pasal 21	7.806
00197/101/21/118/22	PPh Pasal 21	85.641
00198/101/21/118/22	PPh Pasal 21	765.906

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ ***Tax Assesment Letters***	**Jenis Pajak/** ***Type of Tax***	**Total/** ***Amounts***
2022		
Surat Tagihan Pajak		
00199/101/21/118/22	PPh Pasal 21	51.726
00098/101/22/732/22	PPh Pasal 21	100.000
00088/103/21/404/22	PPh Pasal 23	30.341
00002/103/19/942/22	PPh Pasal 23	16.952
00013/101/20/942/22	PPh Pasal 21	100.000
00015/101/20/942/22	PPh Pasal 21	100.000
00016/103/22/942/22	PPh Pasal 23	7.838
00019/101/19/942/22	PPh Pasal 21	8.513
00287/101/22/942/22	PPh Pasal 21	59.647
00326/101/22/543/22	PPh Pasal 21	30.104
00338/101/21/941/22	PPh Pasal 21	100.000
00252/103/21/414/22	PPh Pasal 23	15.463
00208/101/17/514/22	PPh Pasal 21	1.102
01806/101/22/416/22	PPh Pasal 21	100.000
00075/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00077/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00101/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00182/101/22/419/22	PPh Pasal 21	100.000
00130/103/21/403/22	PPh Pasal 23	26.827
00016/103/21/443/22	PPh Pasal 23	26.712
00013/103/19/622/22	PPh Pasal 23	100.000
00104/101/19/622/22	PPh Pasal 21	38.488
00019/103/21/437/22	PPh Pasal 23	16.861
00128/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00151/103/21/093/22	PPh Pasal 23	274.965
00118/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00126/101/22/093/22	PPh Pasal 21	100.000
00010/207/11/511/12	PPN Dalam Negeri	64.049
00011/207/11/511/12	PPN Dalam Negeri	59.258
00032/103/21/425/22	PPh Pasal 23	25.897
00138/101/20/955/22	PPh Pasal 21	100.000
03000/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
06184/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
06232/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
06824/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
09308/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
09416/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
09477/107/21/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
10962/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
11236/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
11769/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
11810/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
13967/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *15. TAXATION (Continued)*

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan) / *g. Tax Assesments (Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assesment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Total/ *Amounts*
2022		
Surat Tagihan Pajak		
14640/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
16543/107/22/955/22	PPN Dalam Negeri	500.000
00059/103/21/401/22	PPh Pasal 23	13.281
00250/101/22/401/22	PPh Pasal 21	100.000
00329/101/22/401/22	PPh Pasal 21	100.000
00200/101/22/412/22	PPh Pasal 21	100.000
00303/101/22/713/22	PPh Pasal 21	1.648
00036/103/21/446/22	PPh Pasal 23	20.734
00025/103/99/302/02	PPh Pasal 23	75.000
00032/103/20/305/22	PPh Pasal 23	100.000
00067/101/21/808/22	PPh Pasal 21	1.598
00626/101/21/821/22	PPh Pasal 21	100.000
00781/101/22/821/22	PPh Pasal 21	100.000
00094/101/22/732/22	PPh Pasal 21	7.219
00099/101/22/732/22	PPh Pasal 21	26.259
00071/101/22/804/22	PPh Pasal 21	100.000
00061/101/22/734/22	PPh Pasal 21	10.949
00008/103/22/816/22	PPh Pasal 23	1.372
00042/101/22/816/22	PPh Pasal 21	46.324
00047/101/19/816/22	PPh Pasal 21	100.076
00081/101/22/816/22	PPh Pasal 21	8.682
00005/101/07/922/07	PPh Pasal 21	82.237
01412/101/98/922/99	PPh Pasal 21	50.000
02673/101/00/922/02	PPh Pasal 21	50.000
01272/101/22/402/22	PPh Pasal 21	100.000
00115/101/22/954/22	PPh Pasal 21	3.409
00026/103/99/302/02	PPh Pasal 23	150.000
	Total	**5.963.922.273**

Surat Pajak/ *Tax Assessment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Nominal/ *Amounts*
PLI		
Surat Tagihan Pajak		
00008/140/21/078/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	651.000
00007/140/21/078/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00102/107/21/078/23	PPN	100.000

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

g. Tax Assesments (Continued)

Surat Pajak/ *Tax Assessment Letters*	Jenis Pajak/ *Type of Tax*	Nominal/ *Amounts*
Surat Ketetapan Pajak		
00014/240/21/078/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	145.371.860
00051/406/21/078/23	PPh Pasal 29	6.867.768.972
00041/201/21/078/23	PPh Pasal 21	34.623.379
00116/207/21/078/23	PPN	48.430.537
00110/207/21/078/23	PPN	41.533.938
00112/207/21/078/23	PPN	60.721.449
00107/207/21/078/23	PPN	51.235.315
00115/207/21/078/23	PPN	72.384.431
00113/207/21/078/23	PPN	66.567.342
00111/207/21/078/23	PPN	55.203.104
00105/207/21/078/23	PPN	55.945.930
00106/207/21/078/23	PPN	72.644.059
00108/207/21/078/23	PPN	54.016.639
00109/207/21/078/23	PPN	105.912.273
00114/207/21/078/23	PPN	65.351.060
PFI		
Surat Tagihan Pajak		
00003/406/22/093/23	PPh 29	308.914.096
00024/407/22/093/23	PPN	(1.899.626.222)
00038/140/22/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000
00168/107/22/093/23	PPN	87.273
00169/107/22/093/23	PPN	43.243
00170/107/22/093/23	PPN	1.800
00171/107/22/093/23	PPN	2.990.505
Surat Ketetapan Pajak		
00003/240/22/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	602.082
00004/240/22/093/23	PPh Pasal 4 ayat (2)	2.053.030
00003/201/22/093/23	PPh Pasal 21	21.096.558
00003/203/22/093/23	PPh Pasal 23	126.519.137
00084/207/22/093/23	PPN	1.527.273
00085/207/22/093/23	PPN	832.432
00086/207/22/093/23	PPN	546.154
00087/207/22/093/23	PPN	41.200.899
00088/207/22/093/23	PPN	34.650
00089/207/22/093/23	PPN	169.236
00090/207/22/093/23	PPN	404.250

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

g. Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

15. TAXATION *(Continued)*

g. Tax Assesments *(Continued)*

Surat Pajak/ *Tax Assessment Letters*	**Jenis Pajak/** *Type of Tax*	**Nominal/** *Amounts*
PPI		
Surat Ketetapan Pajak		
00223/103/19/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00230/103/19/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00550/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00551/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.011
00557/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00556/103/20/441/23	PPh Pasal 23	129.700
00554/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00555/103/20/441/23	PPh Pasal 23	100.000
00552/103/20/441/23	PPh Pasal 23	129.700
00640/107/19/441/23	PPN	500.000
00639/107/19/441/23	PPN	500.000
00492/107/20/441/23	PPN	500.000
00661/107/20/441/23	PPN	500.000
00659/107/20/441/23	PPN	500.000
00700/101/20/441/23	PPh Pasal 21	164.792
00623/101/19/441/23	PPh Pasal 21	2.309.119
00694/101/20/441/23	PPh Pasal 21	100.000
00142/107/21/441/23	PPN	60.912
00196/106/23/441/23	PPh 25	114.861
00198/106/23/441/23	PPh 25	400.889
00519/106/19/441/23	PPh 29	1.000.000
00880/107/20/441/23	PPN	500.000
00198/106/23/441/23	PPN	500.000
00539/106/23/441/23	PPh 25	258.362
	Total	**6.414.926.030**

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

h. Administrasi Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari sebelumnya 10% menjadi 11% efektif mulai dari 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

***15. TAXATION** (Continued)*

h. Tax Administration

On October 29, 2021, the Government issue Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the fiscal year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

16. UTANG LAIN-LAIN / *16. OTHER PAYABLES*

	2023	2022	
Utang Lain-lain			***Other Payables***
Utang Kepegawaian	56.652.393.250	47.007.060.153	*Employee Payables*
Pendapatan Diterima di Muka Pemanfaatan Aset	58.618.995.767	48.211.637.531	*Prepaid Income on Asset Utilization*
Utang atas Penyelesaian Investasi	45.324.750.466	15.141.336.294	*Payable of Working Investment*
Utang Uang Jaminan	6.224.087.757	5.761.694.609	*Fund Guarantee Payables*
Deposit Layanan P*ayment Point*	4.299.165.685	21.712.486.141	*Deposit Payment of Point Service*
Deposit atas Penyelenggaraan Layanan Surat dan Paket:			***Deposits on the Operation of Foreign Letter and Package Services:***
Deposit Agen	17.770.194.400	6.069.622.790	*Agent Deposits*
Luar Negeri	7.097.813.277	24.565.770.965	*International*
Deposit atas Jaminan Sewa Properti	158.000.000	163.365.000	*Deposit for Property Rental Guarantee*
Jaminan Penyelenggaraan Layanan Wesel Langganan	200.000.000	200.000.000	*Guaranteed Service Delivery Subscription*
Sub Jumlah	**196.345.400.602**	**168.832.973.483**	***Sub Total***
Utang Lancar Lainnya	**75.071.385.880**	**217.461.752.146**	***Other Current Payables***
Provisi Jangka Pendek			***Short-term Provision***
Jasa Produksi	120.880.593.816	122.117.990.766	*Production Service*
Tantiem	28.672.438.082	19.501.676.424	*Tantiem*
Sub Jumlah	**149.553.031.898**	**141.619.667.190**	***Sub Total***
Biaya yang Masih Harus Dibayar			***Accrued Expenses***
Angkutan Pos	166.960.257.755	82.068.266.459	*Postal Delivery*
Sewa	61.188.027.651	43.868.527.912	*Building Rent*
Administrasi	38.067.491.347	52.696.911.585	*Administration*
Honorarium Petugas Agen Pos	11.089.227.095	18.692.287.642	*Honorarium of Post Agents*
Beban Bunga Pinjaman	10.665.097.222	2.057.782.444	*Loan Interest Expense*
Konstruksi	5.704.935.518	--	*Construction*
Pengerjaan Kiriman Pos Luar Negeri	5.517.220.438	9.443.826.603	*International Mailing Delivery*
Fee Konsultan	1.454.428.500	--	*Consultant Fee*
Biaya Lembur Tenaga Kontrak Karya	1.381.629.112	2.020.621.606	*Overtime Allowance for Non-permanent Employees*
Pajak Final	1.212.650.386	--	*Final Tax*
Keamanan	443.643.200	1.285.133.592	*Security*
Pemeliharaan	264.747.056	--	*Maintenance*
Pengembangan Properti	150.105.381	--	*Property Development*
Tunjangan Karyawan Lainnya	57.616.155	2.287.402.405	*Other Employee Allowance*
Manfaat Tambahan Karyawan	--	1.004.497.000	*Additional Employee Benefits*
Sub Jumlah	**304.157.076.816**	**215.425.257.248**	***Sub Total***
Utang Pemegang Saham Minoritas	28.701.465.612	2.488.200.000	*Debt of Minority Shareholders*
Jumlah	**753.828.360.808**	**745.827.850.067**	***Total***

Manajemen telah mencadangkan provisi untuk pembayaran jasa produksi untuk karyawan dan tenaga kerja kontrak pembayaran tantiem untuk direksi dan komisaris.

The Management has made a provision for payment of production services for employees and payment of bonuses for directors and commissioners.

16. UTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)

Utang kepegawaian merupakan utang gaji dan manfaat karyawan yang sampai dengan akhir periode pelaporan laporan keuangan belum dibayarkan kepada pegawai. Utang kepegawaian terdiri dari uang kontrak rumah pegawai, uang cuti tahunan dan uang cuti tahap akhir.

Utang uang jaminan adalah penerimaan kas atau bank yang diterima dari pihak ketiga (mitra) sebagai utang uang jaminan di awal kerjasama dengan Grup. Tujuan uang jaminan ini adalah untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh Grup dalam pelaksanaan pekerjaan.

Biaya yang masih harus dibayar merupakan beban akrual Grup dimana manfaat atas penggunaan beban tersebut telah diterima Grup pada masa periode pelaporan. Beban akrual angkutan pos merupakan beban akrual atas angkutan pengiriman barang kiriman pos baik itu menggunakan moda angkutan darat dan udara yang mana proses penagihan *invoice* dilakukan kurang lebih 2–3 bulan dari tanggal transaksi.

Kenaikan akrual atas angkutan pos dan sewa kendaraan merupakan biaya akrual dari proyek pengiriman bantuan cadangan beras pemerintah yang merupakan kerjasama Grup dengan Perum Bulog. Angka tersebut merupakan cadangan atas 3 tahap pekerjaan proyek pengiriman.

Penurunan akrual atas honorarium petugas agen pos karena penurunan jumlah proyek jasa keuangan.

16. OTHER PAYABLES *(Continued)*

Employee payables is a payable of salaries and employee benefits that until the end of the reporting period has not been paid to employees. The employee payables consist of employee's housing contract money, annual leave money and final stage leave money.

Fund guarantee payable is bank or cash received from third parties (partners) as security deposits that were paid at the beginning of cooperation agreement with the Company. The purpose of deposits is to avoid losses that might experienced by the Group in the implementation of the work.

Accrued expenses are the accrual of the Group's expenses where the benefits of using expenses have been received by the Group during the reporting period. Accrued postal delivery expense is an accrued expenses on postal delivery freight transport whether by land and air transportation mode where the invoice billing process is approximately 2-3 months from the date of transaction.

The increase in accrual of postal delivery and rental of vehicles is an accrual expenses for the delivery project of government rice reserve assistance which is a collaboration between the Group and Perum Bulog. This amount is a reserve for 3 stages of delivery project work.

Decrease in accrual for postal agent honorarium due to decrease in the number of financial services projects.

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK / *17. SHORT-TERM BANK LOAN*

Akun ini merupakan pinjaman bank jangka pendek Grup dengan rincian sebagai berikut:

This account pertains to short-term bank loan of the Group with details are as follows:

	2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 26)			***Related Parties (Note 26)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	370.604.000.000	--	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	300.000.000.000	150.000.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Sub Jumlah	**670.604.000.000**	**150.000.000.000**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Bank Central Asia Tbk	665.000.000.000	320.000.000.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	500.000.000.000	--	*PT Bank Maspion Indonesia Tbk*
PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk	400.000.000.000	50.000.000.000	*PT Bank Dubai Panin Syariah Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	*PT Bank Sinarmas*
PT Bank KB Bukopin Tbk	--	200.000.000.000	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Sub Jumlah	**1.615.000.000.000**	**620.000.000.000**	***Sub Total***
Total	**2.285.604.000.000**	**770.000.000.000**	***Total***

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

Perjanijan Kredit	:	Perjanjian Kredit Modal Kerja I: No.CRO.KP/206/KMK/12 Akta Nomor 100. Adendum XI (kesebelas) tanggal 22 September 2023.	*Loan Agreement*	:	*Working Capital Loan Agreement I No.CRO.KP/206/KMK/12. Deed No. 100 Addendum XI (eleventh) dated September 22, 2023.*
Plafond	:	Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).	*Limit*	:	*Rp350,000,000,000 (three hundred and fifty billion rupiah).*
Jangka Waktu	:	26 September 2023 sampai dengan 25 September 2024	*Period*	:	*September 26, 2023 until September 25, 2024*
Tujuan	:	Modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian	*Purposes*	:	*Working capital to meet the needs of daily transaction funds*
Tingkat Bunga	:	8,5% per tahun	*Interest Rate*	:	*8.5% per annum*
Provisi	:	0,25% per tahun dari total limit	*Provision*	:	*0.25% per annum of the limit*
Jaminan	:	Tanpa Jaminan	*Collateral*	:	*Clean basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanijan Kredit	:	Perjanjian Kredit Modal Kerja II No.CRO.KP/444/KMK/21 Akta Nomor 101. Adendum II (kedua) tanggal 22 September 2023.
Plafond	:	Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	25 September 2023 sampai dengan 25 September 2024
Tujuan	:	Modal kerja untuk memenuhi kebutuhan dana transaksi harian
Tingkat Bunga	:	8,5% per tahun
Provisi	:	0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perjanijan Kredit	:	Perjanjian Kredit Fasilitas *Non Cash Loan* No. WCO.KP/1535/NCL/2023, Akta No. 102 tanggal 22 September 2023
Plafond	:	Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	25 September 2023 sampai dengan 25 September 2024
Tujuan	:	Bank Garansi untuk keperluan tender dan retensi atau pemeliharaan proyek kerja sama dengan Pemerintah dann pengiriman surat atau paket atau logistik Perusahaan.
Provisi	:	0,25% per tahun dari total limit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

***17. SHORT-TERM BANK LOAN** (Continued)*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	:	*Working Capital Loan Agreement II No.CRO.KP/444/KMK/21. Deed No.101 Addendum II (second) September 22, 2023.*
Limit	:	*Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah)*
Period	:	*September 25, 2023 until September 25, 2024*
Purposes	:	*Working capital to meet the needs of daily transaction funds*
Interest Rate	:	*8.5% per annum*
Provision	:	*0.25% per annum of the limit*
Collateral	:	*Clean basis*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Loan Agreement	:	*Credit Agreement of Non Cash Loan Facility No. WCO.KP/1535/NCL/2023 Deed No. 102 dated September 22, 2023.*
Limit	:	*Rp50,000,000,000 (fifty billion rupiah)*
Period	:	*September 25, 2023 until September 25, 2024*
Purposes	:	*Bank Guarantee for tender purposes and retention or maintenance of cooperation projects with the Government and delivery of letters or packages or Company logistics.*
Provision	:	*0.25% per annum of the limit*
Collateral	:	*Clean basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 62 tanggal 15 Maret 2023 Adendum XII (Kedua Belas)
Plafon	:	Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	17 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2024
Tujuan	:	Tambahan Modal Kerja usaha jasa logistik, pengiriman dan jasa keuangan
Jenis Kredit	:	*Term Loan*
Tingkat Bunga	:	9,75%
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 09 tanggal 15 Maret 2023 Adendum XIII (Ketiga Belas).
Plafon	:	Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
Jangka Waktu	:	17 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2024.
Tujuan	:	Pembiayaan Belanja Modal Perusahaan
Tingkat Bunga	:	9,50%, sejak Oktober 2023 menjadi 9,75%
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

17. SHORT-TERM BANK LOAN *(Continued)*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 62, dated March 15, 2023 Addendum XII (The twelfth)*
Plafond	*:*	*Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah)*
Period	*:*	*March 17, 2023 until March 16, 2024*
Purposes	*:*	*Additional Working Capital for logistics, shipping, and financial services businesses*
Type of Credit	*:*	*Term Loan*
Interest Rate	*:*	*9.75%*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 09, dated March 15, 2023 Addendum XII (Thirteenth).*
Plafond	:	*Rp250,000,000,000 (two hundred fifty billion rupiah).*
Period	:	*March 17, 2023 until March 16, 2024.*
Purposes	:	*To Finance the Company's Capital Expenditure*
Interest Rate	*:*	*9.50%, since October 2023 to 9,75%*
Collateral	:	*Clean Basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 1 tanggal 2 Oktober 2023
Fasilitas Kredit	:	*Time loan revolving* dengan limit Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar rupiah)
	:	Fasilitas kredit lokal dengan limit Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	29 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional Perusahaan, khususnya pembayaran kepada Pihak Ketiga
Jenis Kredit	:	*Time Loan Revolving*
Tingkat Bunga	:	8,60% per tahun
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 03 tanggal 10 Maret 2023
Fasilitas Kredit	:	*Demand loan* dengan limit Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	10 Maret 2023 sampai dengan 10 Maret 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	:	8,50% per tahun
Provisi	:	0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

***17. SHORT-TERM BANK LOAN** (Continued)*

PT Bank Central Asia Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 1 dated October 2, 2023*
Credit Facilities	*:*	*Time loan revolving with limit facilities Rp1,400,000,000,000 (one trillion four hundred billion rupiah)*
		Local credit facility with limit facilities Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah)
Period	*:*	*October 29, 2023 until October 29, 2024*
Purposes	*:*	*Operational Working Capital firms, especially the payment to Third Parties*
Type of Credit	*:*	*Time Loan Revolving*
Interest Rate	*:*	*8.60% per annum*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 03 dated March 10, 2023*
Credit Facilities	*:*	*Demand Loan with limit facilities Rp300,000,000,000 (Three hundred billion rupiah)*
Period	*:*	*March 10, 2023 until March 10, 2024*
Purposes	*:*	*Operational Working Capital firms, especially the payment to third parties*
Interest Rate	*:*	*8.50% per annum*
Provision	*:*	*0.25% per annum of the limit provided*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 07 tanggal 23 Juni 2023
Fasilitas Kredit	:	*Demand loan* dengan limit Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	23 Juni 2023 sampai dengan 23 Juni 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	:	8,25% per tahun
Provisi	:	0,1% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Perjanijan Kredit	:	Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 05. tanggal 04 Mei 2023. Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 32. tanggal 29 September 2023 tentang perubahan fasilitas.
Fasilitas Kredit	:	Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dengan limit Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	29 Juni 2023 sampai dengan 29 Juni 2024
Tujuan	:	Modal Kerja usaha penyaluran bantuan pemerintah
Tingkat Bunga	:	8,35% per tahun
Provisi	:	0,25% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

17. SHORT-TERM BANK LOAN *(Continued)*

PT Bank Maspion Indonesia Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 07 dated June 23, 2023*
Credit Facilities	*:*	*Demand loan with limit facilities Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah)*
Period	*:*	*June 23, 2023 until June 23, 2024*
Purposes	*:*	*Operational Working Capital firms, especially the payment to third parties*
Interest Rate	*:*	*8.25% per annum*
Provision	*:*	*0.1% per annum of the limit provided*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Loan Agreement	*:*	*Addendum of Musyarakah Financing Agreement No. 05. dated May 04, 2023. Addendum of Musyarakah Financing Agreement No. 32. dated September 29, 2023 about facility changes.*
Credit Facilities	*:*	*Sharia Current Account Financing (PRKS) with limit facilities Rp400,000,000,000 (four hundred billion rupiah)*
Period	:	*June 29, 2023 until June 29, 2024*
Purposes	:	*Working Capital for government aid distribution*
Interest Rate	:	*8.35% per annum*
Provision	:	*0.25% per annum of the limit provided*
Collateral	:	*Clean Basis*

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Sinarmas Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. 19 tanggal 30 Agustus 2021 Adendum 2 (Kedua) tanggal 29 Agustus 2023
Fasilitas Kredit	:	*Demand Load (Revolving – Uncommited)* dengan limit Rp350.000.000.000
Jangka Waktu	:	30 Agustus 2023 sampai dengan 30 Agustus 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional Perusahaan khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	:	9,50%
Provisi	:	0,25% per tahun dari besarnya plafon
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

PT Bank KB Bukopin Tbk

Perjanjian Kredit	:	Persetujuan Kredit No. LIII/125/KB BUKI/ADD-PK-REG/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023
Plafond	:	Rp200.000.000.000 (Dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	7 Desember 2023 sampai dengan 7 Desember 2024
Tujuan	:	Modal Kerja Operasional perusahaan, khususnya pembayaran kepada pihak ketiga
Tingkat Bunga	:	8,95% per tahun
Provisi	:	0,10% per tahun dari besarnya limit kredit
Jaminan	:	Tanpa Jaminan

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagai syarat perpanjangan fasilitas.

17. SHORT-TERM BANK LOAN *(Continued)*

PT Bank Sinarmas Tbk

Loan Agreement	*:*	*Loan Approval No. 19 dated 30 August 2021 Addendum 2 (Second) dated 29 August 2023*
Credit Facilities	*:*	*Demand Load (Revolving – Uncommited) with limit facilities Rp350,000,000,000*
Period	*:*	*August 30, 2023 until August 30, 2024*
Purposes	*:*	*Operational Working Capital Firms especially the payment to third parties*
Interest Rate	*:*	*9.50%*
Provision	*:*	*0.25% per annum of the limit provided*
Collateral	*:*	*Clean Basis*

PT Bank KB Bukopin Tbk

Loan Agreement	:	*Persetujuan Kredit No. LIII/125/KB BUKI/ADD-PK-REG/XII/2023 dated December 20, 2023*
Limit	:	*Rp200,000,000,000 (Two hundred billion Rupiah)*
Period	:	*December 7, 2023 until December 7, 2024*
Purposes	:	*Operational Working Capital firms, especially the payment to third parties*
Interest Rate	:	*8.95% per annum*
Provision	:	*0.10% per annum of the limit provided*
Collateral	:	*Clean Basis*

This loan has been repaid on December 27, 2023 as a condition of facility extension.

17. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) / *17. SHORT-TERM BANK LOAN (Continued)*

Berikut uraian pembatasan masing-masing fasilitas pinjaman bank:

The following is a description of the restrictions on each bank loan facilities:

Nama Bank/ *Bank Name*	Rasio/ *Ratio*	Batasan/ *Convenants*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio utang terhadap ekuitas/*Debt equity ratio*	Maksimal 2,2x/*Maximum 2.2x*
	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
PT Bank Sinarmas Tbk	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
PT Bank Central Asia Tbk	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio kewajiban terhadap ekuitas/*Liabilities to equity ratio*	Maksimal 2,5x/Maximum 2.5x
PT Bank KB Bukopin Tbk	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1,25x/*Minimum 1.25x*
	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
PT Bank Maspion Tbk	Rasio cakupan layanan utang/*Debt service coverage ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio lancar/*Current ratio*	Minimal 1x/*Minimum 1x*
	Rasio kewajiban terhadap ekuitas/*Liabilities to equity ratio*	Maksimal 2,5x/*Maximum 2.5x*

Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan covenant yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company has fulfilled all covenant requirements specified in the agreement.

18. PINJAMAN JANGKA PANJANG / *18. LONG-TERM LOANS*

a. Pinjaman Bank / *a. Bank Loans*

	2023	2022	
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	127.500.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Pelunasan Pinjaman Bank	--	(40.000.000.000)	*Repayment of Bank Loans*
Jumlah Pinjaman	**--**	**87.500.000.000**	***Total Loan***
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	--	(34.000.000.000)	*Less Current Maturities*
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	**--**	**53.500.000.000**	***Total Long-term Bank Loans***

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) / *18. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)*

a. Pinjaman Bank (Lanjutan) / *a. Bank Loans (Continued)*

Berdasarkan akta perjanjian kredit Nomor 09 tahun tanggal 12 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman kredit investasi dengan jumlah fasilitas sebesar Rp250.000.000.000. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Adendum XIII Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 15 Maret 2023 tentang jangka waktu perpanjangan kredit diperpanjang selama 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit atau terhitung sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 17 Maret 2024. Sehingga atas pinjaman ini per 31 Desember 2023 berubah menjadi pinjaman jangka pendek (Catatan 17).

Based on the deed of credit agreement Number 09 dated August 12, 2012, the Company obtained an investment credit loan facility with a total facility of Rp250,000,000,000. This agreement has been amended several times, most recently amended by Addendum XIII Approval of Amendment to Credit Agreement Number 09 dated March 15, 2023 regarding the credit extension period extended for 12 months from the due date of the loan of the credit or from March 17, 2023 to March 17, 2024. Therefore, this loan as of December 31, 2023 has been converted into a short-term loan (Note 17).

b. Liabilitas Sewa / *b. Lease Liabilities*

	2023	2022	
Utang Pembiayaan Konsumen			***Customer Financing Liabilites***
Pihak Berelasi			***Related Parties***
PT Mandiri Tunas Finance	--	859.987.418	*PT Mandiri Tunas Finance*
Dikurangi bagian utang yang jatuh tempo dalam satu tahun	--	(859.987.418)	*Less Current Maturities*
Pihak Berelasi Jangka Panjang - Bersih	**--**	**--**	***Non-Current Related Parties - Net***
Pihak Ketiga			***Third Parties***
PT Indomobil Finance	--	6.750.000.000	*PT Indomobil Finance*
PT Gemilang 85	--	40.960.000	*PT Gemilang 85*
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			*Less Current Maturities*
PT Indomobil Finance	--	(6.750.000.000)	*PT Indomobil Finance*
PT Gemilang 85	--	(40.960.000)	*PT Gemilang 85*
Pihak Ketiga Jangka Panjang - Bersih	**--**	**--**	***Non-Current Third Parties - Net***
Liabilitas Sewa			***Lease Liabilities***
Liabilitas Sewa	22.928.966.765	36.829.098.452	*Lease Liabilities*
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(7.734.098.789)	(30.397.974.543)	*Less Current Maturities*
Jumlah	**15.194.867.976**	**6.431.123.909**	***Total***

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan) / *18. LONG-TERM BANK LOANS (Continued)*

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi / *c. Medium Term Notes and Bonds*

	2023	2022	
Nilai Nominal			***Related Parties***
Obligasi I Seri A	100.000.000.000	100.000.000.000	*Obligasi I Seri A*
Obligasi I Seri B	400.000.000.000	400.000.000.000	*Obligasi I Seri B*
MTN Posindo 03 tahap 1	325.000.000.000	325.000.000.000	*MTN Posindo 03 stage 1*
Sub Jumlah	**825.000.000.000**	**825.000.000.000**	***Sub Total***
Dikurangi Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi	(6.538.541.667)	(10.776.041.667)	*Less unamortized Issuance Cost*
Jumlah MTN & Obligasi - Bersih	**818.461.458.333**	**814.223.958.333**	***Total MTN & Bonds - Net***
Dikurangi Bagian Utang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(323.361.458.333)	--	*Less Current Portion*
Jumlah Jangka Panjang	**495.100.000.000**	**814.223.958.333**	***Total Long-term Portion***

Pinjaman Jangka Mengengah

Utang MTN merupakan surat hutang berjangka menengah *(Medium Term Notes)* yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) guna mendukung penyediaan dana untuk penggantian kewajiban yang ada (kredit perbankan/KMK) dengan kewajiban hutang lain *(refinancing)*. Dalam melakukan penerbitan ini Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan surat No.356/Dekom/1218 tanggal 18 Desember 2018 dan No.278/Dekom/0821 tanggal 16 Agustus 2021.

Medium Term Notes diterbitkan secara bertahap terdiri dari beberapa seri dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 yang diterbitkan secara berseri.

MTN Posindo-03 Tahap I Tahun 2021 telah disahkan oleh Notaris Fathiah Helmi SH No. 39 tanggal 29 Desember 2021 dengan cara penempatan dana terbatas (*private placement*) dengan jumlah sebesar Rp325.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 29 Desember 2021 dengan bunga 10,50%.

Medium Term Notes

MTN debt is a medium-term note issued by PT Pos Indonesia (Persero) to support the provision of funds for the obligation replacement (bank credit/KMK) with other debt obligations (refinancing). In conducting this issuance, the Company has received approval from the Board of Commissioners based on letter No.356/Dekom/1218 dated December 18, 2018 and No.278/Dekom/0821 dated August 16, 2021.

Medium Term Notes are issued in stages consisting of several series with maximum principal value amounting to Rp1,000,000,000,000.

MTN Posindo-03 Phase I of 2021 has been ratified by Notary Fathiah Helmi SH No. 39 dated December 29, 2021 by means of a private placement of funds in the amount of Rp325,000,000,000 with a tenor of 3 years from the issuance date namely December 29, 2021 with an interest of 10.50%.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Pinjaman Jangka Mengengah (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian MTN, Perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:
1. *Debt to Equity Ratio* (DER) Maksimal 5
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Minimal 100%

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memenuhi semua persyaratan covenant yang ditentukan dalam perjanjian.

Perusahaan telah menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk bertindak sebagai Agen Pembayaran.

Perusahaan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Tbk. untuk mewakili hak-hak dan kepentingan pemegang MTN selaku Agen Pemantau dan Agen Jaminan.

Obligasi

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi pada tahun 2022 untuk mendukung ketersediaan dana dan operasional Perusahaan. Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam surat No. S-596/MBU/09/2022 perihal persetujuan Rencana Penerbitan Obligasi dan/atau Surat Berharga Lainnya PT Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 21 September 2022.

***18. LONG-TERM BANK LOANS** (Continued)*

***c. Medium Term Notes and Bonds** (Continued)*

***Medium Term Notes** (Continued)*

Based on the MTN agreement, the Company has an obligation to ensure and maintain financial ratios as follows:
1. *Debt to Equity Ratio (DER) Maximum 5*
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Minimum 100%*

As of December 31, 2023, the Company has fulfilled all covenant requirements within the agreement.

The Company has appointed PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) to act as a Payment Agent.

The company has appointed PT Tabungan Negara Tbk (Persero) Tbk. to represent the rights and interests of MTN holders as Monitoring Agents and Guarantee Agents.

Bonds

The Company has issued Bond in 2022 to support the availability of funds and the Company's operations. The Company has obtained approval from the Board of Commissioners in letter No. S-596/MBU/09/2022 regarding the approval of the Planned Issuance of Bond and/or Other Securities of PT Pos Indonesia (Persero) on September 21, 2022.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Obligasi (Lanjutan)

Obligasi I Pos Indonesia telah disahkan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 87 tanggal 13 Desember 2022 tentang Addendum III dan pernyataan kembali perjanjian emisi obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 bahwa PT Pos Indonesia (Persero) menerbitkan Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 dengan ketentuan Obligasi Seri A sebesar Rp100.000.000.000 dengan tenor 3 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 28 Desember 2022 dengan bunga 10,90%. Obligasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000 dengan tenor selama 5 tahun sejak tanggal penerbitan yaitu 28 Desember 2022 dengan bunga 11,75%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, peringkat Obligasi Perusahaan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat irA- dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI) tanggal 7 Agustus 2023.

Perusahaan sudah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat.

Perusahaan menunjuk PT Bahana Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi Perusahaan.

18. LONG-TERM BANK LOANS *(Continued)*

c. Medium Term Notes and Bonds *(Continued)*

Bonds *(Continued)*

Pos Indonesia's Bond I have been certified by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 87 dated December 13, 2022 concerning Addendum III and restatement of the I Pos Indonesia's bond issuance agreement for 2022 that PT Pos Indonesia (Persero) issues bonds of Rp500,000,000,000 with the provisions for Series A Bonds of Rp100,000,000,000 with a tenor of 3 years from the issuance date, which is December 28, 2022 with an interest of 10.90%. Series B bonds of Rp400,000,000,000 with a tenor of 5 years from the issuance date, December 28, 2022 with an interest of 11.75%.

As of December 31, 2023, the Company's bond rating has been rated irA- by PT Kredit Rating Indonesia (KRI) dated August 7, 2023.

The Company has appointed PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as trustee.

As underwriters for the issuance of Bond, the Company has appointed PT Bahana Sekuritas and PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Obligasi (Lanjutan)

Biaya penawaran umum adalah sebesar Rp9.690.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

18. LONG-TERM BANK LOANS *(Continued)*

c. Medium Term Notes and Bonds *(Continued)*

Bonds *(Continued)*

The cost of the public offering is Rp9,690,000,000 and with details as follows:

No.	Uraian/*Description*	Jumlah Biaya/ *Total Cost*
1	**Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek/*Underwriting Fee***	
	Biaya Jasa Manajemen/*Management Fee*	4.000.000.000
	Biaya Jasa Penjaminan/*Underwriting Fee*	1.400.000.000
	Biaya Jasa Penjualan/*Selling Fee*	1.400.000.000
	Sub Jumlah/*Sub Total*	**6.800.000.000**
2	**Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal/*Capital Market Support Professional Fees***	
	Biaya Jasa Akuntan Publik/*Audit Fee*	1.245.000.000
	Biaya Jasa Konsultan Hukum/*Legal Fee*	600.000.000
	Biaya Notaris/*Notary Fee*	100.000.000
	Sub Jumlah/*Sub Total*	**1.945.000.000**
3	**Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal/*Capital Market Supporting Institution Fees***	**450.000.000**
Jumlah/*Total*		**9.195.000.000**

Yang termasuk biaya lain-lain adalah biaya pernyataan pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biaya pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI), biaya-biaya untuk Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan prospektus awal dan prospektus, formulir, biaya iklan koran dan audit penjatahan.

Other costs include OJK registration statement fee, IDX listing fee, fees for KSEI, initial bidding costs, printing costs for initial prospectus and prospectus, forms, newspaper advertising fees and allotment audits.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan pada laporan keuangan akhir tahun (Desember) audited sebagai berikut:

1. *Debt to Equity Ratio (DER)* Maksimal 5
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* Minimal 100%

Bonds payable requires the Company to maintain financial ratios on year end audited financial statement (December) as follows:

1. *Debt to Equity Ratio (DER) Maximum 5*
2. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Minimum 100%*

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup memenuhi semua persyaratan covenant yang ditentukan dalam perjanjian.

As of December 31, 2023, the Group has fulfilled all covenant requirements within the agreement.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. Utang Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi (Lanjutan)

Obligasi (Lanjutan)

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi I tahun 2022 melalui surat Nomor 26/DIR-1/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. realisasi penggunaan dana bersih Obligasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp490.310.000.000 sehingga sisa dana hasil penawaran umum adalah nihil.

Sebesar Rp294.186.000.000 atau 60,00% (enam puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka kegiatan usaha Grup sehari–hari antara lain untuk beban operasional, beban pemasaran, beban pengembangan usaha atas bisnis jasa keuangan, bisnis surat pos dan paket pos, bisnis ritel, bisnis logistik, bisnis filateli, bisnis properti dan/atau beban lainnya sehubungan kegiatan usaha Grup.

Sebesar Rp83.580.000.000 atau 40,00% (empat puluh persen) akan digunakan untuk belanja modal berupa digitalisasi proses bisnis Grup, pengembangan sistem *Customer Relationship Management (CRM)*, inovasi bisnis digital dan *middle mile* infrastruktur.

Eksposur maksimum terhadap risiko likuiditas pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat utang obligasi sebagaimana yang diungkapkan di Catatan 28.

18. LONG-TERM BANK LOANS *(Continued)*

c. Medium Term Notes and Bonds *(Continued)*

Bonds *(Continued)*

Based on the Realization Report on the Use of Bonds I Year 2022 through letter Number: 26/DIR-1/01/2024 dated January 9, 2024 has been submitted to the Financial Services Authority ("OJK") and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, realization of the use of bond until December 31, 2023 amounting to Rp490,310,000,000, so that the remaining proceeds from the public offering are nil.

A total of Rp294,186,000,000 or 60.00% (sixty percent) will be used for working capital in the framework of the Group's daily business activities, including operational expenses, marketing expenses, business development expenses for the financial services business, postal mail and postal package business, retail business, logistics business, philatelic business, property business and/or other expenses in connection with the Group's business activities.

A total of Rp83,580,000,000 or 40.00% (forty percent) will be used for capital expenditure in the form of digitalizing the Group's business processes, developing Customer Relationship Management (CRM) systems, digital business innovation and middle mile infrastructure.

The maximum exposure to liquidity risk at the end of the reporting period is the carrying amount of bonds payable as disclosed in Note 28.

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan merupakan imbalan pasti sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. Penyisihan ini didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, sebagaimana tercantum dalam laporan No. 0039/PSAK/KKA.AB/II/2024 tanggal 6 Februari 2024.

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee benefits granted to employees is a defined benefit in accordance with Omnibus Law No. 11/2020.

The Company recognizes the provision for employee benefits in accordance with SFAS 24 (Revised 2013) and the Omnibus Law No. 11 of 2020. This provision is based on calculations done by Arya Bagiastra Actuarial Consulting Firm, as stated in report No. 0039/PSAK/KKA.AB/II/2024 dated February 6, 2024.

Details of employee benefit obligations are recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2023	2022	
Pesangon			***Severance***
Perusahaan	1.104.990.961.370	1.206.379.928.262	*The Company*
Entitas anak	3.035.817.531	3.507.866.362	*Subsidiaries*
Jumlah	**1.108.026.778.901**	**1.209.887.794.624**	***Total***

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

Employee benefits expenses recognized in the income statement as general and administrative expenses are as follows:

	2023	2022	
Biaya Bunga	99.041.729.730	81.514.121.957	*Interest Expense*
Biaya Jasa Kini	80.367.230.162	87.570.128.257	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu	(98.756.178.563)	(32.215.873.576)	*Past Service Cost*
Harapan Hasil Investasi	(15.078.071.402)	(25.251.501.321)	*Return on Plan Assets at BoP - Expected*
Provisi untuk Imbalan Terminasi	44.128.000	--	*Provision for Excess Benefit Payment*
Jumlah	**65.618.837.927**	**111.616.875.317**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) / *19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)*

Beban imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah:

Employee benefits expenses recognized in the statement of other comprehensive income are as follows:

	2023	2022	
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial pada Kewajiban			*Actuarial (Gain) or Loss on Obligation:*
Perubahan Asumsi Keuangan	9.534.106.273	(53.190.727.165)	*Change in Financial Assumption*
Penyesuaian Pengalaman	(20.110.076.057)	204.251.923.650	*Experience Adjustment*
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial pada Nilai Wajar Aktiva Program	(46.996.969.066)	196.446.248.755	*Actuarial (Gain)/Loss on Plan Assets*
Jumlah	**(57.572.938.850)**	**347.507.445.240**	***Total***

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas imbalan kerja serta rekonsiliasi nilai kini liabilitas imbalan pasti dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of the present value of defined benefit liabilities, and the reconciliation of the present value of defined benefit obligations and liabilities recognized in the consolidated statements of financial position were as follows:

	2023	2022	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Awal Periode	1.209.887.794.624	865.323.544.840	*Present Value of Defined Benefit Obligations*
Beban Tahun Berjalan	65.618.837.927	111.616.875.317	*Current Year Expense*
Pembayaran Manfaat	(109.611.722.659)	(114.641.660.975)	*Benefit Payments*
Keuntungan)/Kerugian Aktuaria	(57.572.938.850)	347.507.445.240	*Actuarial (Gain)/Loss*
Iuran Perusahaan Selama Periode Berjalan	(239.154.319)	(151.386.500)	*Company Contribution Paid in Year*
Penyesuaian	(56.037.822)	232.976.702	*Adjustment*
Jumlah	**1.108.026.778.901**	**1.209.887.794.624**	***Total***

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)*

Penyisihan imbalan kerja di atas dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* modifikasi IFRIC berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2023 yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, aktuaris independen, dengan asumsi aktuarial utama sebagai berikut:

The estimated liabilities on employee benefits are computed using the Projected Unit Credit method IFRIC modification based on the actuarial reports as of December 31, 2023 and 2022 conducted by Arya Bagiastra Actuarial Consulting Firm, independent actuaries, with the following principal assumptions:

	2023	2022	
Tingkat Kenaikan Gaji	5,50%	5,50%	*Salary Increase Rate*
Tingkat Bunga Diskonto	6,67%	6,95%	*Interest Discount Rate*
Usia Pensiun Normal	56 tahun/*years old*	55 tahun/*years old*	*Normal Retirement Age*
Tingkat Pengunduran Diri	10%	10%	*Resignation Rate*
Tingkat Cacat	1%	1%	*Disability Rate*
Tingkat Mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Indonesian Mortality Table 2019*		*Mortality Rate*

Dasar penetapan tingkat diskonto dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kelangsungan Usaha Perusahaan.
2. Pengembangan terhadap aset program pada Dana Pensiun Pos Indonesia diharapkan berada di atas 10% sebagaimana tingkat bunga aktuaria yang dipergunakan pada Dana Pensiun Pos Indonesia saat ini adalah 10%.
3. Informasi yang diperoleh dari PT Pos Indonesia (Persero) tentang imbal hasil investasi yang telah dilakukan selama ini.

The factors considered in determining the charge in discount rate are as follows:

1. *The Going Concern of the Company*
2. *Development of the assets in the Pension Fund program of Pos Indonesia was expected to be over 10% as an actuarial interest rate on Pension Fund program of Pos Indonesia is 10%.*
3. *Information obtained from PT Pos Indonesia (Persero) about the yield of investments that have been made so far.*

Berikut adalah analisa ekspektasi jatuh tempo dari manfaat pasca kerja tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit are as follow:

	2023	2022	
Dalam 0 dan 2 tahun	515.708.561.999	574.346.037.445	*Within 0 and 2 years*
Antara 2 dan 5 tahun	577.180.093.856	710.830.725.192	*Between 2 and 5 years*
Antara 5 dan 10 tahun	483.451.322.322	594.190.035.955	*Between 5 and 10 years*
Diatas 10 tahun	3.481.285.556.464	4.014.805.627.286	*Above 10 years*

19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo Liabilitas Imbalan Kerja PFI adalah sebesar Rp944.069.123 dan Rp794.185.226.

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Properti Indonesia (PPI)

PPI membuat cadangan jangka panjang untuk direksi dan karyawan pengkaryaan yang telah bekerja minimal 6 bulan di PT Pos Properti Indonesia. Tidak terdapat pendanaan sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja. Total liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp849.734.811.

Liabilitas Imbalan Kerja PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Imbalan kerja untuk tahun berjalan dicerminkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta laporan posisi keuangan. Saldo liabilitas imbalan kerja kepada karyawan sesuai PSAK 24 (Revisi 2013) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.242.013.597 dan sebesar Rp1.376.453.406.

Analisis Sensitivitas

Sensitivitas dari nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2023 terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(Continued)*

Employee benefits liability of PT Pos Finansial Indonesia (PFI)

On December 31, 2023 and 2022, the balance of PFI'S Post-Employment Benefit Liabilities is Rp944,069,123 and Rp794,185,226.

Employee Benefits Liability of PT Pos Properti Indonesia (PPI)

PPI makes long-term reserves for directors and employees who have worked for at least 6 months at PT Pos Properti Indonesia. There is no funding in relation to employee benefit liabilities. The total employee benefit liabilities as of December 31, 2023 are Rp849,734,811.

Employee Benefits Liability of PT Pos Logistik Indonesia (PLI)

Employee benefits for the current year are reflected in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the statement of financial position. The balance of the employee benefits obligation in accordance with PSAK 24 (Revised 2013) as of December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp1,242,013,597 and Rp1,376,453,406 respectively.

Sensitivity Analysis

The sensitivity of post-employment benefit as of December 31, 2023 to changes in the actuarial assumptions is as follows:

	2023	2022	
Analisa Sensitivitas Tingkat Diskonto			
Jika Tingkat +1%	1.344.517.768.767	1.368.575.713.914	*If Rate +1%*
Jika Tingkat -1%	1.427.165.035.669	1.481.528.343.955	*If Rate -1%*
Analisa Sensitivitas Kenaikan Gaji			
Jika Tingkat +1%	1.428.772.681.255	1.481.389.542.704	*If Rate +1%*
Jika Tingkat -1%	1.342.291.463.602	1.367.732.755.982	*If Rate -1%*

20. EKUITAS

a. Modal Saham

Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto. SH.M.Kn.. No.164 tanggal 15 Agustus 2008, susunan pemilikan saham Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 425.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp425.000.000.000.

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari. SH. M.Kn. No. 3 tanggal 3 Januari 2013 para pemegang saham mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 30.023 saham, masing-masing saham dengan nilai Rp1.000.000, sehingga seluruhnya seharga Rp30.023.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
2. Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perusahaan sebesar Rp30.023.000.000 dengan cara sebagai berikut:
   - Sebesar Rp 30.022.899.470 yang berasal dari pengalihan barang milik negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2012.
   - Sebesar Rp100.530 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan sampai dengan tahun buku 2011.

20. EQUITY

a. Share Capital

Based on Notarial Deed No.164 of Sutjipto. SH. M.Kn. dated August 15, 2008, the shareholding of the Company is fully owned by the Republic of Indonesia with 425,000 shares or Rp425,000,000,000.

Based on Notarial Deed of Aryanti Artisari. SH. M.Kn. No. 3 dated January 3, 2013, shareholders decided as follows:

1. *Approving expenses/shares placement that is still in deposits consisting of 30,023 shares, with par value of Rp1,000,000, thereby the total amount will be Rp30,023,000,000 which all part taken by the Government of Republic of Indonesia.*
2. *Increase in the Government of Republic of Indonesia capital to the Company, amounted to Rp30,023,000,000 as follows:*
   - *Amounted to Rp30,022,899,470 that originated from the transfer of goods owned by the state as stated in Government Regulation No. 67 year 2012.*
   - *Amounted to Rp100,530 that originated from part of the capitalization of the Company's allowance until book year 2011.*

20. EKUITAS (Lanjutan)

a. Modal Saham (Lanjutan)

3. Peningkatan modal ditempatkan/ disetor Perusahaan yang semula Rp425.000.000.000 menjadi sebesar Rp455.023.000.000.

20. EQUITY (Continued)

a. Share Capital (Continued)

3. Increase in the Company's paid-up capital from Rp425,000,000,000 to Rp455,023,000,000.

	2023 dan/*and 2022*				
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Share Issued and Fully Paid*	Persentase Pemilikan/ *Percentage of Ownership*	Nominal per Lembar saham *Nominal Share*	Jumlah Modal Disetor/ *Total Paid-up Capital*	
Pemegang Saham					***Shareholders***
Negara Republik Indonesia	455.023	100%	1.000.000	455.023.000.000	*Negara Republik Indonesia*
Jumlah	**455.023**	**100,00%**	**1.000.000**	**455.023.000.000**	***Total***

b. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor berasal dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diikuti oleh entitas anak pada tahun 2016 mengacu pada surat keterangan pengampunan pajak Nomor: KET-22467/PP/WPJ.06/2016 tanggal 2 November 2016 atas setoran pajak tahun 2015 senilai Rp2.344.427.566.

b. Additional Paid-in Capital

Additional paid in capital arise from tax amnesty program that the Subsidiary participated in 2016 referring to the tax amnesty certificate Number: KET-22467/PP/WPJ.06/2016 dated November 2, 2016 for tax payments in 2015 amounting to Rp2,344,427,566.

20. EKUITAS (Lanjutan) / *20. EQUITY (Continued)*

c. Komponen Ekuitas Lainnya / *c. Other Equity Components*

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Keuntungan/ Herugian Tahun Berjalan *Profit (loss) for The Year*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	(120.026.621.099)	44.894.930.668	65.967.771	(75.065.722.660)	*Remeasurement of Defined Benefit*
Selisih Lebih Revaluasi Aset Properti	3.365.475.909.885	412.370.729.903	--	3.777.846.639.788	*Surplus of Revaluation of Fixed Assets*
Jumlah	**3.245.449.288.786**	**457.265.660.571**	**65.967.771**	**3.702.780.917.128**	***Total***

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Keuntungan/ Kerugian Tahun Berjalan *Profit (loss) for The Year*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending balance*	
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	151.029.186.186	(271.055.807.285)	--	(120.026.621.099)	*Remeasurement of Defined Benefit*
Selisih Lebih Revaluasi Aset Properti	2.375.368.267.788	990.107.642.097	--	3.365.475.909.885	*Surplus of Revaluation of Fixed Assets*
Jumlah	**2.526.397.453.974**	**719.051.834.812**	**--**	**3.245.449.288.786**	***Total***

d. Kepentingan Non-Pengendali / *d. Non-Controlling Interest*

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Bagian atas Laba (Rugi) Neto/ *Share in Net Profit (Loss)*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprehensive Income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*
PT Pos Finansial Indonesia	(17.938.001.455)	(20.491.252.597)	11.781.505	(7.042.738.893)	(45.460.211.440)
PT Pos Logistik Indonesia	379.793.429	6.791.098	180.130	45.749.490	432.514.147
Jumlah/*Total*	**(17.558.208.026)**	**(20.484.461.499)**	**11.961.635**	**(6.996.989.403)**	**(45.027.697.293)**

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Bagian atas laba (rugi) neto/ *Share in net profit (loss)*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo akhir/ *Ending balance*
PT Pos Finansial Indonesia	(4.637.719.753)	(13.304.182.215)	3.900.513	--	(17.938.001.455)
PT Pos Logistik Indonesia	402.635.716	(22.414.850)	(427.437)	--	379.793.429
Jumlah/*Total*	**(4.235.084.037)**	**(13.326.597.065)**	**3.473.076**	**--**	**(17.558.208.026)**

20. EKUITAS (Lanjutan) / *20. EQUITY (Continued)*

e. Laba per Saham Dasar / *e. Earnings Per Share*

Perhitungan laba per saham dasar berdasarkan pada informasi berikut:

The basic earnings per share is based on the following:

	2023	2022	
Laba yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	748.699.105.099	650.369.436.698	*Profit Attributtable to Owners of the Company*
Rata-rata Tertimbang Saham Biasa untuk Perhitungan Laba Per Saham Dasar	455.023	455.023	*Weighted Average Number of Ordinary Shares for Computation of Basic Earning Per Share*
Laba Per Saham	**1.645.409,36**	**1.429.311,13**	***Earnings Per Share***

21. PENDAPATAN / *21. REVENUES*

Rincian pendapatan sebagai berikut:

The details of revenues are as follows:

	2023	2022	
Logistik	2.176.037.721.479	491.798.145.319	*Logistics*
Paket Pos	1.456.773.750.070	1.333.750.006.520	*Parcels*
Jasa Keuangan	1.256.664.342.262	2.145.339.877.301	*Financial Services*
Surat Pos	437.098.907.316	468.612.104.846	*Postal Main*
Properti	152.546.415.548	178.890.753.614	*Properties*
Jumlah	**5.479.121.136.675**	**4.618.390.887.600**	***Total***

Kenaikan pendapatan logistik dikarenakan adanya penyaluran bantuan logistik pemerintah yang bekerjasama dengan Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.

The increase in logistics revenue was due to the distribution of government logistics assistance in collaboration with Perum Bulog and PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Penurunan pendapatan jasa keuangan dikarenakan jumlah program penyaluran bantuan sosial pada tahun 2023 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2022.

The decrease in financial services revenue is due to the number of social assistance distribution programs in 2023 is less when compared to 2022.

22. BEBAN POKOK PELAYANAN / *22. COST OF SERVICES*

Rincian beban pokok layanan berdasarkan jenis layanan sebagai berikut:

The details of cost of services based on type of services are as follows:

	2023	2022	
Logistik	1.335.772.630.029	437.539.587.422	*Logistics*
Jasa Keuangan	1.050.441.914.990	1.056.306.409.374	*Financial Services*
Paket Pos	1.035.197.356.677	1.179.497.101.684	*Parcels*
Surat Pos	425.907.312.173	507.325.508.047	*Postal Main*
Properti	32.421.498.083	73.585.225.402	*Properties*
Jumlah	**3.879.740.711.952**	**3.254.253.831.929**	***Total***

Rincian beban pokok layanan berdasarkan jenis biaya sebagai berikut:

The details of cost of services based on type of expenses are as follows:

	2023	2022	
Pegawai	1.785.135.699.779	1.710.091.422.139	*Employees*
Operasi	1.781.439.099.526	1.258.570.642.069	*Operations*
Administrasi	181.494.029.551	155.790.157.913	*Administration*
Penyusutan (Catatan 10)	84.550.779.372	90.932.387.344	*Depreciations (Note 10)*
Umum	31.734.901.739	25.374.841.100	*General*
Amortisasi (Catatan 12)	15.386.201.985	13.494.381.364	*Amortizations (Note 12)*
Jumlah	**3.879.740.711.952**	**3.254.253.831.929**	***Total***

23. BEBAN USAHA / *23. OPERATING EXPENSES*

	2023	2022	
Beban Pemasaran			***Marketing Expenses***
Surat Pos dan Paket Pos	32.948.917.992	22.330.358.903	*Postal Mails and Parcels*
Jasa Keuangan	20.852.622.808	39.618.346.059	*Financial Services*
Logistik	11.588.025.107	1.401.365.425	*Logistics*
Properti	3.061.803.960	2.831.078.404	*Properties*
Ritel	1.567.100.992	1.527.318.307	*Retails*
Filateli	241.974.213	254.966.368	*Philately*
Sub jumlah	**70.260.445.072**	**67.963.433.466**	***Subtotal***
Beban Umum dan Administrasi			***General and Administration Expenses***
Pegawai	598.953.600.639	620.298.137.121	*Employees*
Operasi	132.339.444.242	112.613.282.304	*Operations*
Umum	125.676.697.998	102.738.599.044	*General*
Penyusutan (Catatan 10)	34.341.721.684	48.924.702.429	*Depreciations (Note 10)*
Administrasi	13.422.545.695	15.600.498.081	*Administration*
Amortisasi (Catatan 12)	6.909.312.044	6.806.692.792	*Amortizations (Note 12)*
Sub Jumlah	**911.643.322.302**	**906.981.911.771**	***Sub Total***
Jumlah	**981.903.767.374**	**974.945.345.237**	***Total***

24. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA / *24. OTHER INCOME (EXPENSES)*

	2023	2022	
Pendapatan Lainnya			***Other Income***
Pendapatan Donasi LPU	366.120.584.914	329.930.974.408	*UPS Donation Income*
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi (Catatan 11)	168.004.840.966	262.736.356.147	*Increase in Fair Value of Investment Property (Note 11)*
Pendapatan Pemulihan Kerugian Perusahaan	59.177.796.699	111.582.128.615	*Income from Recovery Losses*
Pendapatan Pelepasan Aset Tetap	12.283.680.595	1.538.036.353	*Gain on Fixed Asset Disposal*
Pendapatan QSF–Penyelenggaraan Pos	923.349.130	13.655.433.088	*QSF Revenue – Postal Maintenance*
Lainnya	22.217.834.505	7.133.570.846	*Others*
Sub Jumlah	**628.728.086.809**	**726.576.499.457**	***Sub Total***
Beban Lainnya			***Other Expenses***
Purna Bakti	(175.697.661.278)	(245.169.916.960)	*Pension Cost*
Beban yang Tidak Didistribusikan	(122.190.027.210)	(69.394.924.478)	*Undistributed Cost*
Denda Pajak	(27.935.892.177)	(26.815.634.627)	*Penalty Tax*
Kerugian Aset Tetap	(352.656.105)	(816.559.298)	*Loss of Fixed Assets*
Sumbangan Bencana Alam	(49.540.050)	(175.377.748)	*Natural Disaster Donations*
Sub Jumlah	**(326.225.776.820)**	**(342.372.413.111)**	***Sub Total***
Jumlah	**302.502.309.989**	**384.204.086.346**	***Total***

Beban lainnya dengan kategori purna bakti adalah beban - beban yang dikeluarkan Grup untuk pembayaran pensiunan eks karyawan Grup seperti bantuan kesehatan, bantuan pangan dan perbaikan gizi.

Other expenses in the after-service category are the burdens issued by the Group for the payment of retired ex-employees of the Group such as health assistance, food assistance and nutritional improvements.

Beban yang tidak distribusikan merupakan kelompok beban lainnya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi seperti beban kesekretariatan, kegiatan hukum, lainnya.

Undistributed expenses represent other costs that are not directly related to production activities such as the secretarial cost, legal activity, and others.

25. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN / *25. FINANCE INCOME (COST)*

	2023	2022	
Pendapatan Keuangan			***Finance Income***
Pendapatan Selisih Kurs	30.322.878.977	51.482.514.677	*Foreign Exchange Difference Income*
Pendapatan Jasa Giro	10.004.759.893	5.732.912.308	*Current Account Service Income*
Pendapatan Penempatan Dana di Bank	3.233.763.485	1.622.797.743	*Fund Placement Income in Bank*
Sub Jumlah	**43.561.402.355**	**58.838.224.728**	***Sub Total***
Beban Lain-lain			***Finance Expenses***
Bunga Pinjaman	(170.439.111.903)	(131.011.105.150)	*Loan Interest*
Beban Kupon MTN	(92.025.000.000)	(61.039.865.872)	*MTN Coupon Interest*
Beban Pendanaan	(14.254.784.262)	(6.156.720.473)	*Funds Expense*
Pengelolaan *Treasury*	(6.429.191.554)	(10.542.896.233)	*Treasury Management*
Selisih Kurs atas Transaksi Valas	26.687.614.147	(1.976.112.078)	*Exchange Difference on Forex*
Beban Administrasi Bank	(5.188.393.337)	(2.788.932.652)	*Bank Administration*
Sub Jumlah	**(261.648.866.909)**	**(213.515.632.458)**	***Sub Total***
Jumlah	**(218.087.464.554)**	**(154.677.407.730)**	***Total***

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI / *26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Grup, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following table is a summary of related parties who have transactions with the Group, and includes the nature of the relationship and transaction:

No	Pihak Berelasi/*Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank fasilitas pinjaman dari bank, dan piutang usaha/ *Account bank, loans bank facility, and trade receivables*
2.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank, piutang usaha dan utang usaha/ *Account bank, trade receivables and trade payables*
3.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank dan piutang usaha/ *Account bank and trade receivables*

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(Continued)*

No	Pihak Berelasi/*Related Parties*	Sifat Hubungan/*Nature of Relationship*	Transaksi/*Transaction*
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank fasilitas pinjaman dari bank, dan piutang usaha/ *Account bank, loans bank facility, and trade receivables*
5.	PT Bank Mandiri Taspen	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank dan piutang usaha/ *Account bank and trade receivables*
6.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Penempatan dana di rekening bank *Account bank*
7.	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
8.	Perum Bulog	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
9.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha dan utang usaha/ *Trade receivables and trade payables*
10.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha dan utang usaha/ *Trade receivables and trade payables*
11.	PT Pertamina (Persero)	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
12.	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
13.	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha dan utang usaha/ *Trade receivables and trade payables*
14.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
15.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*
16.	PT Asabri (Persero)	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha dan utang usaha/ *Trade receivables and trade payables*
17.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Sepengendalian / *Under Common Control*	Piutang usaha/ *Trade receivables*

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

Rincian akun dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

The details of transactions with related parties are as follows:

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Bank (Catatan 5)					***Bank (Note 5)***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	525.044.625.494	690.421.666.492	3,84%	29,99%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	45.028.912.392	149.312.884.267	0,33%	6,49%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.259.405.362	85.326.074.144	0,27%	3,71%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	23.196.151.363	19.689.808.610	0,17%	0,86%	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8.437.571.702	92.884.451.081	0,06%	2,72%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri Taspen	1.296.789.387	1.303.342.143	0,01%	0,06%	*PT Bank Mandiri Taspen*
Jumlah	**639.263.455.700**	**1.038.938.226.737**	**4,68%**	**43,83%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Bank (Catatan 5)					***Bank (Note 5)***
Dolar AS					*US Dollar*
Jepang Yen					*Japan Yen*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	121.333.526.650	--	0,89%	1,44%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.488.127.760	29.875.174.949	0,06%	1,12%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	279.646	1.686.984	0,00%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Euro Eropa					*Europe Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.516.858.623	55.870.901.851	0,03%	1,44%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
GBP Inggris					*England GBP*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	563.785.928	540.686.481	0,00%	0,03%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Dolar Singapura					*Singapore Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	659.971.175	656.395.361	0,00%	0,03%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
CHF Swiss					*Swiss CHF*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.134.429.150	982.681.559	0,01%	0,00%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah	**135.696.978.932**	**87.927.527.185**	**0,11%**	**2,62%**	***Total***

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan) / *26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Deposito Berjangka (Catatan 5)					***Time Deposits (Note 5)***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.500.000.000	48.500.000.000	0,36%	2,11%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	35.000.000.000	22.000.000.000	0,26%	0,96%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18.000.000.000	12.500.000.000	0,13%	0,41%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.500.000.000	--	0,04%	0,13%	*PT Bank Tabungan Negara*
Jumlah	**108.000.000.000**	**83.000.000.000**	**0,79%**	**3,61%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Piutang Usaha					***Account Receivables***
Rupiah					*Rupiah*
PT Rajawali Nusantara					*PT Rajawali Nusantara*
Indonesia (Persero)	80.600.509.544	--	0,59%	0,00%	*Indonesia (Persero)*
PT Semen Indonesia (Persero)	28.508.588.771	6.314.473.836	0,21%	0,06%	*PT Semen Indonesia (Persero)*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	22.950.013.958	--	0,17%	0,00%	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Pertamina (Persero)	17.988.761.623	12.768.984.755	0,13%	0,11%	*PT Pertamina (Persero)*
PT Telekomunikasi					*PT Telekomunikasi*
Indonesia (Persero) Tbk	8.574.023.685	13.507.717.178	0,06%	0,12%	*Indonesia (Persero) Tbk*
PT Waskita (Persero), Tbk	3.881.429.110	3.953.370.000	0,03%	0,04%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.761.925.603	1.050.240.801	0,01%	0,01%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.018.374.506	73.267.000	0,01%	0,00%	*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)*
Jumlah	**165.283.626.800**	**37.668.053.570**	**1,21%**	**0,34%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Pendapatan Diterima di Muka					***Accrued Revenues***
Rupiah					*Rupiah*
Perum Bulog	286.236.015.716	--	2,10%	0,00%	*Perum Bulog*
PT Rajawali Nusantara Indonesia	103.629.226.557	--	0,76%	0,00%	*PT Rajawali Nusantara Indonesia*
Jumlah	**389.865.242.273**	**--**	**2,85%**	**0,00%**	***Total***

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan) / *26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)*

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Aset Lancar Lainnya					***Other Current Assets***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	234.806.998.514	53.047.975.929	1,72%	0,48%	*PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	76.383.325.096	2.344.445.494	0,56%	0,02%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	9.349.738.942	9.349.738.942	0,07%	0,08%	*PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.700.582.143	--	0,01%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Tabungan Indonesia (Persero) Tbk	15.257.262	15.257.262	0,00%	0,00%	*PT Bank Negara Tabungan Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**322.255.901.957**	**64.757.417.627**	**2,36%**	**0,58%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Utang Usaha					***Trade Payables***
Rupiah					*Rupiah*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.853.866.404	5.204.192.609	0,07%	0,12%	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**3.853.866.404**	**5.204.192.609**	**0,07%**	**0,12%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Utang Lainnya					***Other Payables***
Rupiah					*Rupiah*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7.062.205.000	2.421.149.552	0,13%	0,06%	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	4.591.394.607	--	0,08%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk*
Jumlah	**11.653.599.607**	**2.421.149.552**	**0,21%**	**0,06%**	***Total***

	Saldo/ *Amount*		Persentase Terhadap Jumlah Aset dan Liabilitas/ *Percentage to Total Assets and Liabilities*		
	2023	2022	2023	2022	
Pinjaman Bank (Catatan 17)					***Bank Loans (Note 17)***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	370.604.000.000	--	6,71%	0,00%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk	300.000.000.000	150.000.000.000	5,43%	3,58%	*PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah	**670.604.000.000**	**150.000.000.000**	**12,14%**	**3,58%**	***Total***

26. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (Lanjutan)

Jumlah imbalan (penghasilan) berupa gaji, honorarium dan tunjangan dibayarkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp26.947.964.975 dan Rp16.713.310.728 sampai dengan 31 Desember 2023 dan Rp14.501.959.996 dan Rp8.098.293.290 periode yang sama tahun 2022.

26. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

The amount of compensation (income) in the form of salary, honorarium and allowances paid to the Board of Directors and Board of Commissioners is Rp26,947,964,975 and Rp16,713,310,728 until December 31, 2023 and Rp14,501,959,996 and Rp8,098,293,290 for the same period in 2022.

27. PERJANJIAN PENTING

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms*	
			Awal/*Start*	Akhir/*End*
PT Lion Express	PKS.296/DIR-3/1222 06/LE-PKS/SLS/I/2022	Pendistribusian Kirimanpos Udara Dalam Negeri/ *Domestic Air Mail Distribution*	30 Desember/ *December* 2022	29 Desember/ *December* 2024
PT Stefany Jaya Sentosa (Agen dari Asiana Air)	PKS 117/DIR-3/0523	Perjanjian Kerja Sama Layanan Pengangkutan Kirimanpos Internasional/ *Cooperation Agreement on the Transportation Service of International Mail*	26 Mei/ May 2023	25 Mei/ *May* 2025
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial	1/3.4/HK.01/2/2023 PKS037/DIR-4/0223	Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2023/ *Distribution of Social Assistance for the Family Hope Program for the Year 2023*	22 Februari/ *February* 2023	31 Desember/ *December* 2023
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial	01/5.4/PKS/HK.01/02/2023 PKS036/DIR-4/0223	Penyaluran Program Sembako Tahun 2023/ *Distribution of Basic Food Program for the Year 2023*	22 Februari/ *February* 2023	31 Desember/ *December* 2023
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	1015/SVP-Financial Service/0423 481/IV/2023	Pekerjaan Pengadaan Jasa Percetakan Prangko dan Benda Filateli Tahun 2023/ *Procurement of Stamp and Philatelic Items Printing Services for the Year 2023*	1 Januari/ *January* 2023	31 Desember/ *December* 2023
Perusahaam Umum (Perum) Bulog	PJ-196/DP303/PG.04/03/2023 PKS073/DIRUT/0323	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023/*Transportation Services Agreement for the Distribution of Government Rice Reserve Food Assistance in 2023*	31 Mei/ *May* 2023	30 Juni/ *June* 2023
Perusahaam Umum (Perum) Bulog	PJ-540/DP303/PG.04/09/2023 PKS224/DIRUT/092023	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023/ *Agreement for Transportation Services in the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid for the Year 2023*	6 September/ *September* 2023	30 November/ *November* 2023

27. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan) / *27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: (Lanjutan)

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms*	
			Awal/*Start*	Akhir/*End*
Perusahaam Umum (Perum) Bulog	PJ-730/DP303/PG.04/11/2023 PKS310/DIRUT/1123	Perjanjian Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023/ *Agreement for Transportation Services in the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid for the Year 2023*	22 November/ *November* 2023	31 Desember/ *Desember* 2023
PT Taspen (Persero)	JAN-37/DIR/2022 PKS.027/DIRUT/0222	Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening/ *Payment of Pension Time Savings, Pension, Work Accident Benefit and Death Benefit through an account*	22 Februari/ *February 2022*	21 Februari/ *February 2024*
PT Asabri (Persero)	SPKS/HK.02/58-AS/IV/2021 PKS.078/DIRUT/0421	Pembayaran Manfaat Asuransi Sosial dan Penerima Fasilitas Kredit Kepada Peserta Asabri/ *Payment of Social Insurance Benefits and Credit Facility Recipients to Asabri Participants*	9 April/ *April* 2022	8 April/ *April 2023*
Direktorat Jendral Pajak (DJP)	PRIN-86/2023/PJ.0134/PPK/MTR/2022	Pekerjaan Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023/ *Duties of Distribution and Sales of Stamp Stamps of the Directorate General of Taxes 2023 Fiscal Year*	30 Desember/ *December* 2022	Sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban/ *Until the completion of work and the fulfillment of rights and obligations*
Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika	Dalam proses penandatangan	Subsidi Operasional Penyelenggaraan Layanan Pos Universal/ *Operational Subsidies for the Implementation of Universal Postal Services*	1 Januari/ *January 2023*	31 Desember/ *December 2023*

27. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: (Lanjutan)

27. *SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)*

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms*	
			Awal/*Start*	Akhir/*End*
PT Global Loyal Sejahtera	SPK Nomor : /MPM & AM/0822 & PKS : 429/GLS/TS/IX /2022	Penyedia Jasa Brand Ambassador PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2022/ *Provide Brand Ambassador Service PT Pos Indonesia (Persero) In 2022*	31 Agustus/ *August* 2022	1 Agustus/ August 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PKS 238/SVP Finance Operation/1222 dan WHS/052/01122022	Layanan *Cash Management* / Cash Management Services	1 Januari/ *January* 2023	31 Desember/ *December 2024*
Emudhra Pte Limited	45/DIR-POSFIN/PKS/2019	Pemasangan Fasilitas *Certifying Authority* dan Kegiatan Lain yang Terkait/ *Installation of Certifying Authority Facilities and Other Related Activities*	03 Desember/ *December 2019*	02 Desember/ *December 2024*
PT Nusantara Comnet	001/BKU-BWN/PKS/XI/2018 034/DIR-BWN/PKS/2018	Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak untuk Layanan *Visa Center* / *Procurement of Software for Visa Center Services.*	06 November/ *November 2018*	05 November/ *November 2023*
PT Asuransi Tri Pakarta	PKS 292/DIR-1/1222 dan 082/PKS/DIR/2022	Jasa Asuransi Gedung dan Barang Inventaris Serta Asuransi Kas Tahun 2023/ *Building And Inventory Insurance Services And Cash Insurance For 2023*	31 Desember/ *December 2022*	31 Desember/ *December 2023*
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	01/S.Pj-UP/RNI.01/IV/2023	Pengadaan Jasa Transporter untuk Distribusi Bantuan Pangan Program Stunting Pemerintah 2023/ *Procurement of Transporter Services for the Distribution of Government Stunting Food Aid Program 2023*	17 April/ *April* 2023	16 Juli/ *July* 2023
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	09/S.Pj-UP/RNI.01/X/2023 PKS251/DIRUT/1023	Pengadaan Jasa Transporter untuk Distribusi Bantuan Pangan Program Stunting Pemerintah 2023/ *Procurement of Transporter Services for the Distribution of Government Stunting Food Aid Program 2023*	9 Oktober/ *October* 2023	31 Desember/ *December* 2023
PT Eka Jaya Agung	54	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pemanfaatan Tanah Milik PT. Pos Indonesia (Persero) di Jalan Teuku Umar Denpasar/ *Cooperation Agreement Regarding the Utilization of Land Owned by PT. Pos Indonesia (Persero) on Teuku Umar Street, Denpasar*	23 Agustus/ *August* 2004	Sampai dengan berakhirnya masa laku/ *Until the expiration of the validity period*

27. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: (Lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Group has the following significant agreements are as follows:

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms*	
			Awal/*Start*	Akhir/*End*
Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Papua	01/SP-OAB/II/2023	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Kegiatan Ongkos Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun 2023/ Work Package for Procurement of Other Services for Rice Cost Activities for Civil Servants (PNS) in the Inland Districts of West Papua Province in 2023	24 Februari/ *February* 2023	Sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban/ *Until the completion of work and the fulfillment of rights and obligations*
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua	KONTR-01/OAB/WPB.34/2023	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Distribusi (Pemindahan dan Pengiriman) Beras Pegawai Negeri Sipil (PNS) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun 2023/ *Package of Procurement of Other Service Works for Civil Servants (PNS) Rice Allowance Activities in the Remote Districts of West Papua Province in 2023*	4 April/ *April* 2023	Sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban/ *Until the completion of work and the fulfillment of rights and obligations*
PT Arkan Global Utama	211/Penj/Korp/1023 001/ARKAN-POS/PKSCBP-BAPANG/IX/2023	Perjanjian Kerjasama Tentang Proses Mid Miles Penyediaan Jasa Angkutan Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Tahap II Jawa Timur Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on Mid-Miles Process for Providing Transportation Services for the Distribution of Government Rice Reserve Food Aid by Perum Bulog Phase II East Java 2023*	11 September/ *September 2023*	31 Desember/ *December* 2023
PT Yasa Artha Trimanunggal	212/Penj/Korp/1023 002/PKS/YASA-POS/CBP-BAPANG/IX/2023	Perjanjian Kerjasama Tentang Proses Last Miles Penyaluran Bantuan Bapang CBP (Cadangan Beras Pemerintah) Perum Bulog Tahap II Jawa Timur Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on the Last-Mile Process for the Distribution of Government Rice Reserve Aid (CBP) by Perum Bulog Phase II East Java 2023*	8 September/ *September 2023*	30 November/ *November 2023*

27. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Grup mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut: (Lanjutan)

27. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The Group has the following significant agreements are as follows: (Continued)

Mitra/ *Partners*	Nomor Perjanjian/ *Agreements Number*	Perjanjian/ *Agreements*	Jangka Waktu/*Terms* Awal/*Start*	Jangka Waktu/*Terms* Akhir/*End*
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	1119/4.4/BS.01.00/7/2023 PKS161/DIR-4/0723	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyaluran Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on the Distribution of Food Assistance for Persons with Disabilities for the Year 2023*	5 Juli/ *July 2023*	31 Desember/ *December 2023*
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial	94/4/HK.01/7/2023 PKS160/DIR-4/0723	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on the Distribution of Food Assistance for Elderly Single-Family Household for the Year 2023*	5 Juli/ *July 2023*	31 Desember/ *December 2023*
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Kementerian Sosial	01/5.2/PKS/HK.01/8/2023 PKS216/DIR-4/0823	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2023/ *Cooperation Agreement on the Distribution of Social Assistance for the National Economic Heroes Program for the Year 2023*	29 Agustus/ *August 2023*	31 Desember/ *December* 2023
PT Bank Central Asia Tbk	PKS251/DIR-4/1021	Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Layanan Weselpos Instan/ *Cooperation Agreement on the Utilization of Instant Postal Money Order Services*	26 Oktober/ *October* 2021	25 Oktober/ *October* 2023

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen risiko keuangan Grup bersifat dinamis dengan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko atas portofolio instrumen keuangan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko keuangan, Grup mengidentifikasikan risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan instrumen keuangan, yaitu risiko pasar (tingkat suku bunga dan nilai tukar), risiko likuiditas, dan risiko kredit. Masing-masing risiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's financial risk management is dynamic with the purpose to identify, measure, map, and developed alternatives for portfolio risk management of financial instruments. In the implementation of financial risk management, the Group identify the risks faced relating to financial instruments, namely market risk (interest rate and exchange rate), liquidity risk, and credit risk, each of these risks can be explained as follows:

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

a. Risiko Kredit / *a. Credit Risk*

Risiko kredit dalam piutang adalah ketidakpastian pelanggan pos untuk dapat membayar utangnya sesuai dengan PKS yang ditetapkan. Risiko ini teridentifikasi dari status debitur (pelanggan) dalam posisi bangkrut. Kesulitan likuiditas (permintaan penjadwalan ulang pembayaran) dan tidak dikenal alamat terakhir.

Credit risk in receivables is due to the uncertainty of postal customers to pay their amounts due in accordance with the agreement. These risks are identified from the status of the customer in a position of bankruptcy. Difficulty in liquidity (request for rescheduling of payment), and no last known address.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit mendekati nilai tercatat bersih dari aset keuangan dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the maximum Group exposure of the credit risk approximates the net carrying amounts of the outstanding financial assets with details as follows:

	2023	2022	
Kas dan Setara kas	2.653.918.421.743	2.301.803.310.923	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	385.402.397.127	323.084.646.578	*Trade Receivables*
Piutang Layanan Jasa Keuangan	880.739.688.637	407.714.729.112	*Receivable from Financial Services*
Aset Lancar Lainnya	477.506.326.678	285.355.865.077	*Other Current Assets*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	930.909.600.985	253.959.319.110	*Accrued Revenues*
Piutang Kerugian termasuk dalam Aset Tidak Lancar Lainnya	13.811.808.767	19.105.518.144	*Receivable Losses include in Other Non-Current Assets*
Jumlah	**5.342.288.243.937**	**3.591.023.388.944**	***Total***

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan sesuai dengan peringkat kredit debitur yang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The following table provides the credit quality and age analysis of financial assets according to credit ratings of debtors as of December 31, 2023 and 2022:

	2023				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai/ *Neither Past Due Nor Impaired*	Jatuh Tempo Tetapi Tidak Ada Penurunan/ *Past Due But Not Impaired* <1 Tahun/*Year*	Telah Jatuh Tempo Dan Ada Penurunan/ *Past Due And Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan Setara kas	2.653.918.421.743	--	--	2.653.918.421.743	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	--	--	385.402.397.127	385.402.397.127	*Trade Receivables*
Piutang Layanan Jasa Keuangan	880.739.688.637	--	--	880.739.688.637	*Receivable from Financial Services*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	930.909.600.985	--	--	930.909.600.985	*Accrued Revenues*
Aset Lancar Lainnya	--	--	477.506.326.678	477.506.326.678	*Other Current Assets*
Piutang Kerugian termasuk dalam Aset Tidak Lancar Lainnya	--	--	13.811.808.767	13.811.808.767	*Receivable Losses include in Other Non-current Assets*
Jumlah	**4.465.567.711.365**	**--**	**876.720.532.572**	**5.342.288.243.937**	***Total***

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

a. Risiko Kredit (Lanjutan) / *a. Credit Risk (Continued)*

	2022				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Ada Penurunan Nilai/ *Neither Past Due Nor Impaired*	Jatuh Tempo Tetapi Tidak Ada Penurunan/ *Past Due But Not Impaired* <1 Tahun/*Year*	Telah Jatuh Tempo Dan Ada Penurunan/ *Past Due And Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Kas dan Setara kas	2.301.803.310.923	--	--	2.301.803.310.923	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	233.946.404.119	89.138.242.459	--	323.084.646.578	*Trade Receivables*
Aset Lancar Lainnya	407.714.729.112	--	--	407.714.729.112	*Other Current Assets*
Jumlah	**2.943.464.444.154**	**89.138.242.459**	**--**	**3.032.602.686.613**	***Total***

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Grup menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai "tidak jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai" termasuk instrumen dengan kualitas kredit yang tinggi karena hanya terdapat sedikit atau tidak terdapat riwayat gagal bayar atas persyaratan yang dijaminkan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*.

The credit quality of financial instruments is managed by the Group using internal credit ratings. Financial instruments classified as "neither past due nor impaired" includes high grade credit quality instruments because there was few or no history of default on the agreed terms based on the letter of authorization, letter of guarantee or promissory note.

"Past due but not impaired" adalah barang-barang dengan sejarah default sering namun jumlahnya karena masih tertagih. Terakhir, *"past due and impaired"* adalah mereka yang lama beredar dan telah dilengkapi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang.

"Past due but not impaired" are items with history of frequent default nevertheless the amount due are still collectible. Lastly, "past due and impaired" are those that are long outstanding and has been provided with allowance for impairment loss on receivables.

Manajemen yakin akan kemampuan Perusahaan dan Entitas Anak untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum dengan membentuk penyisihan penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang berdasarkan data historis kerugian yang ada (Catatan 6).

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Company and Subsidiaries with set sufficient allowance for impairment losses to cover incurred losses arising from uncollectible receivables based on historical loss (Note 6).

b. Risiko Pasar / *b. Market Risk*

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market price. The Group are exposed to market risks, particularly interest rate risk and foreign currency exchange risk.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Grup menghadapi risiko pasar, risiko pertukaran mata uang asing tertentu.

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar Rupiah sebagai mata uang pelaporan terhadap mata uang asing, terutama USD, EUR, GBP, SGD dan CHF.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar berasal dari selisih nilai tukar antara Rupiah dan US Dolar.

Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing merupakan kontribusi secara tunai dalam mata uang USD, EUR, GBP, SGD dan CHF pada kas di bank.

Grup memantau fluktuasi nilai tukar asing dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan paling diuntungkan kepada Grup pada waktunya. Manajemen saat ini tidak mempertimbangkan kebutuhan untuk masuk ke dalam setiap mata uang *forward/swaps.*

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Market Risk *(Continued)*

Foreign Exchange Risk

The Group are exposed to market risks, in particular foreign currency exchange risk.

Foreign currency exchange risk is the risk that arises from the changes of exchange rate of Rupiah as the reporting currency against foreign currencies, especially USD, EUR, GBP, SGD and CHF currencies.

Foreign currency exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuation comes from the exchange rate difference between Rupiah and US Dollar.

The significant portion of the foreign currency exchange risk is contributed by USD, EUR, GBP, SGD and CHF denominated cash in banks.

The Group monitors the foreign exchange rate fluctuation and market expectation so it can take necessary actions benefited most to the Group in due time. The Management currently does not consider the necessity to enter into any currency forward/swaps.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (Lanjutan)

Risiko nilai tukar adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar berdampak langsung pada penerimaan atau kewajiban karena Grup melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Risiko ini sangat jelas tergambar atas transaksi pos internasional baik untuk jasa pos internasional ataupun dalam bidang administrasi pos (UPU). Berbagai kurs valuta asing digunakan terkait dengan *counterpart* negara masing-masing.

Namun pada umumnya risiko nilai tukar dimulai pada saat mengakui transaksi pos internasional yang dimulai dengan kurs SDR. Penempatan dana pada portofolio valas, diyakini mampu untuk memitigasi risiko nilai tukar tersebut.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dengan pendapatan sebelum pajak yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(Continued)*

b. Market Risk *(Continued)*

Exchange rate risk is the potential deviation from expected results due to exchange rate fluctuations. Exchange rate risk has a direct impact on revenues or liabilities because the Group use transactions using foreign currency. This risk is clearly illustrated by the transaction to postal international either for the international postal services or in the field of postal administrations (UPU). A variety of foreign exchange rates are used in connection with their respective state counterparts.

But in general, exchange rate risk begins at recognition of international postal transactions that began with the SDR exchange rate. Placement of funds in foreign currency portfolio that is believed to be able to mitigate the exchange rate risks.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against foreign currency, with all other variables held constant, to the Company and Subsidiaries income before tax for the period ended December 31, 2023 and 2022:

		Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ ***Increase (Decrease)*** **Foreign Currencies**	**Pengaruh pada Laba** ***Sebelum Pajak/ Effect on Income*** **Before Tax**	
31 Desember 2023	USD	0,0119%	83.311.205	*December 31, 2023*
		-0,0119%	(83.311.205)	
	EUR	0,0552%	387.136.609	
		-0,0552%	(387.136.609)	
	SGD	0,2102%	1.475.179.950	
		-0,2102%	(1.475.179.950)	
	GBP	0,8622%	6.051.744.102	
		-0,8622%	(6.051.744.102)	
	CHF Swiss	0,1312%	921.095.908	
		-0,1312%	(921.095.908)	
	JPY	0,0471%	330.930.151	
		-0,0471%	(330.930.151)	

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

b. Risiko Pasar (Lanjutan) / *b. Market Risk (Continued)*

		Kenaikan (Penurunan) Mata Uang Asing/ *Increase (Decrease) Foreign Currencies*	Pengaruh pada Laba *Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax*	
31 Desember 2022	USD	3,5090%	4.753.223.550	*December 31, 2022*
		-3,5090%	(4.753.223.550)	
	EUR	3,0913%	1.727.112.011	
		-3,0913%	(1.727.112.011)	
	SGD	2,7303%	17.921.682	
		-2,7303%	(17.921.682)	
	GBP	3,6533%	19.753.104	
		-3,6533%	(19.753.104)	
	CHF	3,3109%	32.535.149	
		-3,3109%	(32.535.149)	

c. Risiko Likuiditas / *c. Liquidity Risk*

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Tabel dibawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Liquidity risk is the risk that the Group are unable to meet its obligations when they fall due. The management evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows to ensure the availability of funds to settle the due obligation. The tables below summarize the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments at December 31, 2023 and 2022:

	2023			
	Dibawah 1 tahun/ *Below 1 year*	*Past due but* Lebih dari 1 tahun *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Utang Usaha	474.354.916.682	--	474.354.916.682	*Trade Payable*
Utang Lainnya	753.828.360.808	--	753.828.360.808	*Other Payables*
MTN dan Obligasi	323.361.458.333	495.100.000.000	818.461.458.333	*MTN & Bond*
Pinjaman Bank	2.285.604.000.000	--	2.285.604.000.000	*Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	7.734.098.789	15.194.867.976	22.928.966.765	*Consumer Financing Liabilities*
Jumlah	**3.844.882.834.612**	**510.294.867.976**	**4.355.177.702.588**	***Total***

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan) / *c. Liquidity Risk (Continued)*

	2022			
	Dibawah 1 tahun/ *Below 1 year*	*Past due but* Lebih dari 1 tahun *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Keuangan				***Financial Liabilities***
Utang Usaha	480.980.837.206	--	480.980.837.206	*Trade Payable*
Utang Pajak	35.841.316.974	--	35.841.316.974	*Taxes Payable*
Utang Lainnya	745.827.850.066	--	745.827.850.066	*Other Payables*
MTN dan Obligasi	--	825.000.000.000	825.000.000.000	*MTN and Bond*
Pinjaman Bank	804.000.000.000	53.500.000.000	857.500.000.000	*Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	38.048.921.961	6.431.123.909	44.480.045.870	*Consumer Financing Liabilities*
Total Liabilitas Keuangan	**2.104.698.926.207**	**884.931.123.909**	**2.989.630.050.116**	***Total***

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

The following is an anlysis of the maturity of the Group's financial liabilities based on contractual payments that are not discounted:

(dalam jutaan rupiah)

	Nilai Buku Tercatat/ *Book Value*	Arus Kas Wajib/ *Cash Flow*	Kewajiban yang Harus Dilunasi 2024/ *Obligation to be Paid 2024*	Kewajiban yang Harus Dilunasi 2025/ *Obligation to be Paid 2025*	Kewajiban yang Harus Dilunasi 2026/ *Obligation to be Paid 2026*	Kewajiban yang Harus Dilunasi 2027/ *Obligation to be Paid 2027*
Pinjaman Bank/ *Bank Loan*	2.285.604	2.285.604	2.285.604	--	--	--
Pinjaman Jangka Menengah & Obligasi/ *Medium Term Note & Bonds*	825.000	825.000	335.000	100.000	--	400.000
Jumlah/*Total*	**3.110.604**	**3.110.604**	**2.620.604**	**100.000**	**--**	**400.000**

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Kebijakan Grup adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat dalam rangka untuk mengamankan akses untuk membiayai dengan biaya yang wajar.

Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize rewards for shareholders.

The Group policy is to maintain a healthy capital structure to secure access to finance at a reasonable cost.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan) / *c. Liquidity Risk (Continued)*

Pengelolaan Modal (Lanjutan) / ***Capital Management** (Continued)*

Tabel dibawah merupakan ringkasan jumlah modal Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The table below summarizes the total capital of the Group as of December 31, 2023 and 2022:

	2023	2022	
Modal	455.023.000.000	455.023.000.000	*Share Capital*
Saldo Laba	4.019.944.671.201	3.264.314.544.470	*Retained Earnings*
Komponen Ekuitas Lainnya	3.702.780.917.128	3.245.449.288.786	*Other Equity Component*
Jumlah	**8.177.748.588.329**	**6.964.786.833.256**	***Total***

Bank Covenant / ***Bank Covenant***

Kreditur/*Creditors*	Syarat Kredit/*Covenant*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Rasio Lancar (kali)	*Current Asset/Current Liabilities*
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali)	* Total Hutang : Total Ekuitas (Total hutang = Total hutang dikurangi dengan Kas)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Rasio Lancar (kali)	(EBITDA + Pendapatan Donasi LPU) : (Total Utang jatuh tempo + Biaya Bunga)
Rasio Debt Service Coverage (kali)	*Current Asset : Current Liabilities*
PT Bank Sinarmas Tbk	
Rasio Lancar (kali)	*Current Asset : Current Liabilities*
Rasio Debt Service Coverage (kali)	EBITDA : (Angsuran pokok + Bunga jatuh tempo)
PT Bank Central Asia Tbk	
Rasio Lancar (kali)	Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali)	Total Kewajiban/ Utang : Total Ekuitas
PT Bank KB Bukopin Tbk	
Current Ratio	*Cash + Account Receivable + Inventory* : Hutang Usaha + Utang Pajak
Debt Service Coverage Ratio	EBITDA : (Pokok + Bunga)
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	
Current Ratio	*Current Asset : Current Liabilities*
Liabilities to Equity Ratio	* Total Kewajiban/ Utang : Total Ekuitas *Hutang Bank + Hutang Usaha + MTN + Obligasi
Debt Service Coverage Ratio	EBITDA disetahunkan /Hutang Berbunga + Beban Bunga
Obligasi	
Debt Equity Ratio	Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar
Debt Service Coverage	EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)
MTN POSINDO-03 TAHAP 1	
Debt Equity Ratio	Total Aktiva Lancar : Total Kewajiban Lancar
Debt Service Coverage	EBITDA : (Angsuran pokok jatuh tempo + Bunga)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) / *28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)*

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan) / *c. Liquidity Risk (Continued)*

Perjanjian Bank (Lanjutan) / ***Bank Covenant** (Continued)*

Kreditur / *Creditors*	Syarat Kredit/*Covenant*	Hasil/*Result*	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / ***PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk***			
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38	
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Maksimal 2,2x/*Maximum 2.2x*	0,68	
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt Service Coverage Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,87	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk / ***PT Bank Mandiri (Persero) Tbk***			
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38	
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt Service Coverage Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	2,48	
PT Bank Sinarmas Tbk / ***PT Bank Sinarmas Tbk***			
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38	
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt Service Coverage Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,87	
PT Bank Central Asia Tbk / ***PT Bank Central Asia Tbk***			
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38	
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Minimal 2,5x/*Minimum 2,5x*	0,68	
PT Bank KB Bukopin Tbk / ***PT Bank KB Bukopin Tbk***			
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	5,76	
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Minimal 2,5x/*Minimum 2,5x*	1,87	
PT Bank Maspion Indonesia Tbk / ***PT Bank Maspion Indonesia Tbk***			
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	1,38	
Liabilities to Equity Ratio (kali) / *Liabilities to Equity Ratio (times)*	Minimal 2,5x/*Minimum 2,5x*	0,44	
Rasio *Debt Service Coverage* (kali) / *Debt Service Coverage Ratio (times)*	Minimal 1x/*Minimum 1x*	0,87	
Medium Term Note (MTN) dan Obligasi / ***Medium Term Note (MTN) and Bond***			
Obligasi / ***Bond***			
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Maksimal 5/*Maximum 5*	0,68	
Rasio *Debt Service Coverage* (%) / *Debt Service Coverage Ratio (%)*	Minimal 100%/*Minimum 100%*	0,44	
MTN POSINDO-03 TAHAP 1 / ***MTN POSINDO-03 TAHAP 1***			
Rasio Lancar (kali) / *Current Ratio (times)*	Maksimal 5/*Maximum 5*	0,68	
Rasio Hutang ke Ekuitas (kali) / *Debt to Equity Ratio (times)*	Minimal 100%/*Minimum 100%*	0,44	

29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN / *29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS*

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value.

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang layanan usaha, piutang pegawai, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lainnya dan pinjaman bank jangka pendek mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

The fair value of cash and cash equivalents, trade receivables, accrued income, trade receivable from business services, employee receivables, trade payable, accrued expenses, other payable and short-term bank loan approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these financial instruments.

Nilai wajar dari pinjaman bank, utang pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunganya diasumsikan mendekati tingkat diskonto pasar.

Fair value of bank loans, consumer financing, and lease payable approximately at their carrying values largely due to their interest rates assuming close to the market discount rate.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrument keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

The table below presents comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Group financial instrument that are carried in the consolidated financial statements.

	2023		2022		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan Setara Kas	2.653.918.421.743	2.653.918.421.743	2.301.803.310.923	2.301.803.310.923	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha - Bersih	385.402.397.127	385.402.397.127	323.084.646.578	323.084.646.578	*Trade Receivables - Net*
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	930.909.600.985	930.909.600.985	253.959.319.110	253.959.319.110	*Accrued Income*
Piutang Layanan Jasa Keuangan	880.739.688.637	880.739.688.637	407.714.729.112	407.714.729.112	*Financial Services Receivable*
Piutang Karyawan	7.054.857.557	7.054.857.557	6.751.962.233	6.751.962.233	*Receivable to Employee*
Piutang Kerugian Perusahaan	13.811.808.767	13.811.808.767	290.193.377.047	290.193.377.047	*Company Loss Receivables*
Liabilitas Keuangan					***Financial Liabilities***
Liabilitas Keuangan Dicatat Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi					***Financial Liabilities Measured at Amortized Cost***
Utang Usaha	474.354.916.682	474.354.916.682	480.980.837.205	480.980.837.205	*Trade Payables*
Pinjaman Bank Jangka Pendek	2.285.604.000.000	2.285.604.000.000	804.000.000.000	804.000.000.000	*Short-term Bank Loan*
Utang Lain-lain	753.828.360.808	753.828.360.808	745.827.850.066	745.827.850.066	*Other Payables*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	--	--	53.500.000.000	53.500.000.000	*Long-term Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	22.928.966.765	22.928.966.765	44.480.045.870	44.480.045.870	*Consumer Financing Liabilities*
Pinjaman Jangka Menengah dan Obligasi	818.461.458.333	818.461.458.333	814.223.958.333	814.223.958.333	*Medium Term Note and Bond*

30. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

30. MENETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Balances of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:

	2023		2022		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah/*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currency*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent Rupiah/*	
Aset					***Assets***
Kas dan Setara Kas					***Cash and Cash Equivalents***
EUR	205.190,03	3.516.858.623	3.343.034,69	55.870.901.851	*EUR*
USD	550.605,07	8.488.127.759	1.698.316,89	26.716.222.997	*USD*
CHF	61.740,06	1.134.429.150	57.913,88	982.681.558	*CHF*
SGD	56.351,73	659.970.893	56.299,07	656.395.361	*SGD*
GBP	28.531,33	563.786.071	28.568,48	540.686.481	*GBP*
JPY	1.107.563.000,00	121.333.526.650	--	--	*JPY*
Piutang Usaha					***Account Receivables***
USD	8.000.101,85	123.329.570.120	8.782.931,03	138.164.288.033	*USD*
Jumlah Aset		**259.026.269.266**		**222.931.176.281**	***Total Assets***
Liabilitas					***Liabilities***
Utang Usaha					***Trade Payables***
USD	8.907.833,00	137.323.153.528	12.205.591,00	161.733.992.026	*USD*
Utang Lainnya					***Other Payables***
USD	588.389,00	9.070.604.824	1.545.265,00	209.351.629.364	*USD*
Jumlah Liabilitas		**146.393.758.352**		**371.085.621.390**	***Total Liabilities***
Aset Bersih		**112.632.510.914**		**(148.154.445.109)**	***Net Assets***

Pada tanggal 26 Maret 2024 nilai kurs tengah yang dipakai adalah Rp. 17.077,57 untuk 1 EUR, Rp. 15.795,00 untuk 1 USD, Rp. 11.727,37 untuk 1 SGD, Rp, 19.898,56 untuk 1 GBP, Rp. 17.586,16 untuk 1 CHF, serta Rp. 104,38 untuk 1 JPY, sehingga nilai bersih aset keuangan turun sebesar (Rp.5.715.705.686,23).

On March 26, 2024, the middle exchange rates used were Rp17,077.57 for 1 EUR, Rp15,795.00 for 1 USD, Rp11,727.37 for 1 SGD, Rp19,898.56 for 1 GBP, Rp17,586.16 for 1 CHF, and Rp104.38 for 1 JPY, resulting in a decrease in the net value of financial assets by (Rp5,715,705,686.23).

31. KONTINJENSI / *31. CONTINGENCIES*

Perseroan memiliki potensi kerugian yang cukup signifikan disebabkan oleh praktik kecurangan pegawai. Sampai saat ini beberapa kasus masih dalam tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh pihak penyidik yang telah memberikan estimasi kerugian sekurang - kurangnya sebesar Rp17.523.102.627 dan Rp25.963.224.885 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

The Company has significant potential losses caused by fraudulent practices of its employees. Currently some cases are still under inspection, investigation, inquiry, and prosecution on courts, being performed by prosecutors, who has given the estimated losses of at least Rp17,523,102,627 and Rp25,963,224,885 as of December 31, 2023 and 2022 with details as follows:

	2023	2022	
Perseroan			***Company***
Regional 1 Medan	2.485.900.378	2.313.956.307	*Regional 1 Medan*
Regional 2 Jakarta	281.722.094	321.338.316	*Regional 2 Jakarta*
Regional 3 Bandung	4.518.103.349	86.450.500	*Regional 3 Bandung*
Regional 4 Semarang	267.617.210	329.985.077	*Regional 4 Semarang*
Regional 5 Surabaya	757.714.865	1.787.189.267	*Regional 5 Surabaya*
Regional 6 Makassar	7.233.352.766	7.480.926.453	*Regional 6 Makassar*
Regional HO	618.378.965	643.378.965	*Regional HO*
Entitas Anak			***Subsidiary***
PT Pos Properti Indonesia	1.360.313.000	--	*PT Pos Properti Indonesia*
PT Pos Finansial Indonesia	--	13.000.000.000	*PT Pos Finansial Indonesia*
Jumlah	**17.523.102.627**	**25.963.224.885**	***Total***

Terkait dengan kerugian atas praktek kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, Perusahaan telah mendapatkan jaminan atas aset sitaan dari karyawan yang melakukan kecurangan berupa aset bergerak dan aset tak bergerak. Adapun daftar aset sitaan tersebut sebagai berikut:

Related to losses on fraudulent practices committed by employees, the Company has secured confiscated assets from employees who commit fraud in the form of movable assets and immovable assets. The list of confiscated assets is as follows:

Aset Jaminan	**2023/2022**	***Collateral assets***
Tanah luas 144 m² dan bangunan	**1.152.066.290**	*Land area 144 m² and building*
Tanah luas 234 m² dan pagar 50 m	467.810.410	*Area 234 m² and fence 50 m*
Tanah luas 1 HA	687.714.776	*Land area 1 HA*
2 Sertifikat rumah	212.623.310	*2 house certificate*
Tanah luas 2.945,5 m²	3.799.323.691	*Land area 2.945,5 m²*
Rumah tinggal	247.231.691	*Resedential house*
Tanah dan Rumah tinggal	81.806.205	*Land and Resedential house*
BPKB mobil Suzuki APV	219.250.520	*BPKB of Suzuki APV car*
Tanah	**514.326.532**	*Land*
Sertifikat tanah dan BPKB Motor	650.701.619	*Land certificate and BPKB Motorcycle*
Sertifikat tanah	705.280.974	*Land certificate*
Tanah luas 189 m²	81.806.205	*Land area 189 m²*
Jumlah	**8.819.942.223**	***Total***

32. PERENCANAAN MANAJEMEN

Pada tanggal 31 Januari 2023 telah disetujui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 dalam RUPS oleh Kementerian BUMN, program kerja direncanakan sebanyak 27 program kerja utama terdiri dari 14 Program Transformasi dan 13 Program Inovasi. Adapun program kerja yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Ritel Domestik

Akuisisi 3 juta UMKM baik di *e-commerce, socio-commerce* maupun yang belum terdigitalisasi dengan meningkatkan performa *physical & digital channels*.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program *Marketing Retail:* "Peningkatan Produktivitas & Pendapatan Channel"

- Mengakuisisi/PKS dengan 3 Juta UMKM melalui seluruh *channel* ritel.
- Mendorong program *Win Back* Agen Pos & Oranger dari kompetitor.
- Kolaborasi strategis dengan pihak lain (*Wholesale* bisnis).
- Menetapkan standar pelayanan lebih bagus dari kompetitor dan perbaikan tampilan *Point of Present*.
- Program *Channel one stop shopping channel* dengan memunculkan *showcase* produk UMKM (UMKM *Corner*) & *packaging corner*.

***Drive e-Commerce* dan *Socio-Commerce*: "POSAja!"**

- Akusisi & aktifasi 3 juta *new user E-UMKM* dari *seller Marketplace* dan *Socio-commers*.
- Meningkatkan *customer experience* yang bertransaksi lewat *digital channel* dengan *chatbot* yang lebih baik.

32. MANAGEMENT PLAN

On January 31, 2023, the Corporate Budget Work Plan (RKAP) was approved at the GMS by the Ministry of SOEs, 27 main work programs were planned consisting of 14 Transformation Programs and 13 Innovation Programs. The work program to be carried out are as follows:

1. Domestic Retail

Acquisition of 3 million MSMEs in ecommerce, socio-commerce and those that are not yet digitized by improving the performance of physical & digital channels.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Retail Marketing Program: "Increased Channel Productivity & Revenue"

- *Acquire/MCC with 3 Million MSMEs through all retail channels.*
- *Encourage the Win Back Postal Agent & Oranger program from competitors.*
- *Strategic collaboration with other parties (Wholesale business).*
- *Setting a better service standard than competitors and Improvement of Point of Present Display.*
- *Channel one stop shopping channel program by creating a UMKM product showcase (UMKM Corner) & packaging corner.*

***Drive e-Commerce and Socio-Commerce*: "POSAja!"**

- *Acquisition & activation of 3 million new E-UMKM users from Marketplace sellers and Socio-commers.*
- *Improve customer experience through digital channels with better chatbot.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

2. Korporat Domestik

Penguatan bisnis kurir korporat melalui rekrutmen 1.000 AM *(Included Global AM)*, peningkatan kapabilitas, dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan korporasi.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Retensi Pelanggan

- Membangun keakraban dengan pelanggan: Penjualan konsultatif, memahami rantai nilai pelanggan, memahami industri pelanggan & berkantor di lokasi pelanggan.
- Membangun Program Retensi & Loyalitas.
- Memastikan tidak ada pelanggan pasif.

Akuisisi Pelanggan

- *Aggressive Bidding: new customer & win back.*
- *Aggressive Bidding: LPSE_LKPP, E-Proc, INAPROC, Official Website, Official Bidding.*
- *Enlareg number of AM recruitment 1.000 new AM (include Global AM + AMEX).*
- Membangun kemampuan terkait pemahaman *value chain customer* dan pengetahuan industri dalam melakukan akselerasi akuisisi *customer (Valueable Proposal*).
- Membangun Jaringan dan Kemampuan Internasional.
- *Customer Penetration.*
- Agresif menggarap pasar yang berorientasi *solution end-to-end logistic*.
- Membuat peluang bisnis baru.
- Melakukan penawaran spesial kepada Grup konglomerasi (Strategi *Bundling*).
- Implementasi Pos Dinas Lainnya.

***32. MANAGEMENT PLAN** (Continued)*

2. Domestic Corporate

Strengthening the corporate courier business through recruitment of 1,000 AMs (Included Global AM), capability enhancement, and services that meet corporate customer expectations.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Customer Retention

- *Building familiarity with customers: Consultative selling, Understanding the Customer's value chain, understanding the customer's industry & being based at the customer's location.*
- *Build Retention & Loyalty Programs.*
- *Ensure no customer churn.*

Customer Acquisition

- *Aggressive Bidding: new customers & winning back.*
- *Aggressive Bidding: LPSE_LKPP, E-Proc, INAPROC, Official Website, Official Bidding.*
- *Increase number of AMs: recruitment of 1.000 new AMs (including Global AM + AMEX).*
- *Build capabilities in customer value chain understanding and industry knowledge to accelerate customer acquisition (Valueable Proposal).*
- *Create International Network and Capabilities.*
- *Customer Penetration.*
- *Aggressively pursued markets oriented towards end-to-end logistics solutions.*
- *Create new business opportunities.*
- *Provide special offers to conglomerate Groups (Bundling Strategy).*
- *Implementation of Other Postal Services.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

2. Korporat Domestik (Lanjutan)

Project, Bidding and Collection Management
- Implementasi *Management Account Receivable System*.
- Membangun *Bidding Management Capability.*
- Membangun *Project Management Capability.*

3. *Outgoing International*

Ekspansi bisnis kurir internasional melalui kolaborasi dengan mitra strategis serta simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Akuisisi
- Akuisisi kiriman langsung ke Perusahaan *import* dan w*holesale*.
- Membangun Jaringan dan Kemampuan Internasional.

Program Retensi
- Building Customer intimacy Consultative selling, memahami value chain customer, & memahami industry customer
- Building Retention & Loyalty Program.
- Memastikan tidak ada Churn Customer

Simplifikasi dan Digitalisasi Proses Bisnis
- Pengadaan sarana dan prasarana di TPS dan IPC (*Capex* Rp8,4 Miliar).
- Penanganan digitalisasi dan *dashboard* operasi untuk kiriman internasional.
- Perbaikan sistem *custom* dan integrasi dengan proses di *Office of Exchange (OE).*
- Sosialisasi perubahan regulasi ekspor dan impor.

***32. MANAGEMENT PLAN** (Continued)*

***2. Domestic Corporate** (Continued)*

Project, Bidding and Collection Management
- *Implementation of Accounts Receivable Management System.*
- *Raising Bidding Management Capability.*
- *Raising Project Management Capability.*

3. Outgoing International

Expansion of international courier business through collaboration with strategic partners and simplification and digitalization of business process.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Acquisition Program
- *Direct Entry shipment acquisition to import and wholesale companies.*
- *Create International Network and Capability.*

Retention Program
- *Building familiarity with customers: Consultative selling, Understanding customer value chain, & understanding industry customers*
- *Building Retention & Loyalty Programs.*
- *Ensure no customer churn*

Simplification and Digitalization of Business Process
- *Procurement of facilities and infrastructure at TPS and IPC (Capex Rp8.4 Billion).*
- *Handling digitalization and operation dashboard for international shipments.*
- *Improvement of custom system and integration with Office of Exchange (OE) process.*
- *Socialization of changes in export and import regulations.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

3. *Outgoing International* (Lanjutan)

***Strategic Alliances* dengan Mitra Strategis Kurir Internasional**

- Kerja sama agensi dengan Perusahaan kurir-logistik di luar negeri.
- Kolaborasi/kemitraan strategis dengan Perusahaan *forwarding* internasional.

4. *Profitable* eks-KCP LPU

Akuisisi >2.000 UMKM di >1.000 eks-KCP LPU dan redistribusi KCP LPU ke wilayah 3T.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Sosialiasi

- Melakukan perubahan *mindset* KCP LPU sebagai pendorong ekonomi di wilayah kerja.
- Sosialisasi dan internalisasi KD Pedoman Pengelolaan LPU.
- Pembentukan kepala KCP LPU sebagai seorang “mantri LPU”.

Kerja Sama Strategis

- Bekerjasama dengan Pemerintah setempat membentuk agen/mitra LPU.
- Melakukan analisa daerah operasi tekait potensi ekonomi terutama UMKM di wilayah kerja KCP LPU.
- Mengunjungi kegiatan masyarakat (terutama UMKM) dengan memanfaatkan oranger *mobile* & mitra LPU.
- Perpanjangan jam loket.

32. MANAGEMENT PLAN *(Continued)*

3. Outgoing International *(Continued)*

Strategic Alliances with International Courier Strategic Partners

- *Agency cooperation with overseas courier-logistics Companies.*
- *Strategic collaborations/partnerships with international forwarding Companies.*

4. Profitable ex-KCP LPU

Acquisition of >2,000 MSMEs in >1,000 ex-KCP LPU and redistribution of KCP LPU to 3T areas.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Socialization

- *Change the mindset of KCP LPU as an economic driver in the working area.*
- *Socialization and internalization of KD LPU Management Guidelines.*
- *Establishment of KCP LPU head as an "LPU mantri".*

Strategic Cooperation

- *Cooperate with local Government to form LPU agents/partners.*
- *Analyze the area of operation regarding economic potential, especially MSMEs in the KCP LPU working area.*
- *Attending the community activities (especially MSMEs) by utilizing oranger mobile & LPU partners.*
- *Extension of counter hours.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

5. *Digital* SCM

Optimalisasi pengelolaan jaringan transportasi dan pergudangan pos secara digital demi kepuasan pelanggan.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Digitalisasi & Otomasi Proses Bisnis dan Infrastruktur

- Integrasi sistem *fulfillment*, modernisasi sistem, dan pengembangan jaringan titik layanan (*Capex* Rp0,6 Miliar).
- Pengelolaan infrastruktur teknologi (*Capex* Rp1,2 Miliar).
- Peningkatan kapabilitas sistem dengan integrasi internal dan eksternal (*Capex* Rp10 Miliar).
- Evaluasi *performance* operasional sesuai ekspektasi pelanggan.
- Pengelolaan alat transportasi (*Capex* Rp2,7 Miliar).
- Mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan terkait operasional proyek.

Program Peningkatan Kapabilitas Bisnis dengan Sinergi

- Perluasan kerjasama SCM dan *warehousing* dengan *e-commerce*.
- Pengembangan kapasitas penjualan 120 AM dengan skema insentif yang menarik.
- Membangun tim *Bidding Management*.
- Menjalin kerjasama dengan penyedia jasa kargo dan pergudangan (*air lines*, *shipping lines*, CTO, PCS, ACS) untuk optimalisasi *load factor*.
- *Product Knowledge Re-freshment Training.*

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

5. Digital SCM

Optimizing the management of the postal transportation and warehousing network digitally for customer satisfaction.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Business Process & Infrastructure Digitalization and Automation Programs

- *Integration of fulfillment system, system modernization, and service point network development (Capex Rp0.6 Billion).*
- *Technology infrastructure management (Capex Rp1.2 Billion).*
- *System capability improvement with internal and external integration (Capex Rp10 Billion).*
- *Evaluation of operational performance in line with customer expectations.*
- *Transportation equipment management (Capex Rp2.7 Billion).*
- *Develop a system that suits the needs related to project operations.*

Business Capability Improvement Program with Synergy

- *Expansion of SCM and warehousing cooperation with e-commerce.*
- *Development of 120 AM sales capacity with attractive incentive schemes.*
- *Build Bidding Management team.*
- *Establish cooperation with cargo and warehousing service providers (air lines, shipping lines, CTO, PCS, ACS) for load factor optimization.*
- *Product Knowledge Re-freshment Training.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

5. Digital SCM (Lanjutan)

Program Pemenuhan Ekspektasi Pelanggan
- Manajemen pelanggan korporat berdasarkan besar, industri dan segmen.
- Evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala.
- Pengelolaan pelanggan dan portofolio.
- Program pemasaran untuk mempertahankan pelanggan.

6. Logistik Energi

Penguatan 5 *Key Account Management* (KAM) untuk Sektor Energi dengan produktivitas melebihi Rp3 Miliar per bulan.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Manajemen Pelanggan
- Perbaikan proses akuisisi *Key Account* pada *cluster* yang *mature*, analisis CBA dan pembiayaan proyek.
- Mengembangkan kapasitas penjualan 5 KAM.
- Membangun tim *Bidding* Manajemen.

Program Project, Bidding* dan *Collection Management
- Optimalisasi pola operasi.
- Pengelolaan pelaporan manajemen operasional dengan *dashboard*.
- Manajemen pengelolaan piutang.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

***5. Digital SCM** (Continued)*

Customer Expectation Fulfillment Program
- *Corporate customer management by size, industry and segment.*
- *Periodic evaluation of customer satisfaction.*
- *Customer and portfolio management.*
- *Marketing program to retain customers.*

6. Energy Logistics

Strengthening of 5 Key Account Management (KAM) for Energy Sector with productivity exceeding Rp3 Billion per month.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Customer Management Program
- *Improved Key Account acquisition process in mature clusters, CBA analysis and project financing.*
- *Developed sales capacity of 5 KAMs.*
- *Raising Bidding Management team.*

Project, Bidding and Collection Management Program
- *Optimization of operation pattern.*
- *Management of operational management reporting with dashboards.*
- *Accounts receivable management.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

7. Logistik Pemerintah/BUMN/BUMD

Ekspansi bisnis logistik melalui kolaborasi dengan Pemerintah/BUMN/BUMD.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Logistik Pemerintah
- Persiapan dukungan logistik untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
- Proyek Logistik pada Pembangunan IKN 2023.
- Evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala.

Logistik BUMN/BUMD

- Perluasan kerjasama strategis dengan BUMN/BUMD.
- Evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala.

8. Penyaluran Dana dan Lainnya

Peningkatan pendapatan bisnis jasa keuangan melalui MAU >4% dari NoA Pospay.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Perluasan Kerja Sama
- Melakukan kerja sama strategis dengan pemerintah pusat, daerah, perbankan, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain.
- Sosialisasi proyek kerja sama.
- Meningkatkan kemampuan komunikasi para *Account Manager.*

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

7. Government/ State/ Local Owned Enterprises Logistics

Expansion of the logistics business through collaboration with the Government/State/Local owned enterprises.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Government Logistics
- *Preparation of logistical support for the implementation of the 2024 Simultaneous Elections.*
- *Logistics project for the construction of IKN 2023.*
- *Periodic evaluation of customer satisfaction.*

State/Local Owned Enterprises Logistics
- *Expansion of strategic cooperation with State/Local owned enterprises.*
- *Periodic evaluation of customer satisfaction.*

8. Fund Disbursement and Others

Increase in financial services business revenue through MAU >4% of NoA Pospay.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Cooperation Expansion Program
- *Conduct strategic cooperation with central and local governments, banks, social organizations, community institutions, etc.*
- *Socialization of cooperation projects.*
- *Improve communication skills of Account Managers.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

8. Penyaluran Dana dan Lainnya (Lanjutan)

Program Peningkatan Pendapatan dari Produk Materai dan *Legacy*
- Mempertahankan kinerja produk materai dan *legacy* dengan peningkatan kualitas layanan.
- Menyediakan pelaporan yang transparan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

9. Bisnis Agregator

Akuisisi dan kolaborasi mitra agregator untuk pengembangan bisnis *digital payment* Posfin.

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Perluasan Kemitraan dan *Biller*
- Menambah Pospay Agen dan *channel* penjualan *multibiller* H2H ke mitra strategis.
- Program promosi e-materai untuk peningkatan transaksi sesuai target pelanggan.

Program Peningkatan Kualitas Operasional dan Interaksi Pelanggan
- Memastikan aplikasi dapat diakses dan beroperasi setiap saat.
- Mempercepat proses integrasi ke sisi *supplier* dan *customer*.
- Menjaga performansi *rate complaint handling*.
- Melakukan *project management* yang terstruktur dan terencana.
- Menyelesaikan proyek dengan hasil sesuai dengan *Scope of Work* yang telah ditentukan sebelumnya.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

***8. Fund Disbursement and Others** (Continued)*

Program to Increase Revenue from Stamp and Legacy Products
- *Maintain the performance of stamp and legacy products with improved service quality.*
- *Provide transparent reporting in a way that suits partner needs.*

9. Aggregator Business

Acquisition and collaboration of aggregator partners for the development of Posfin's digital payment business.

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Partnership and Biller Expansion Program
- *Adding Pospay Agent and H2H multibiller sales channel to strategic partners.*
- *E-stamp promotion program to increase transactions according to target customers.*

Program to Improve Operational Quality and Customer Interaction
- *Ensure apps are always accessible and operational.*
- *Accelerate the integration process to the supplier and customer side.*
- *Maintain complaint handling rate performance.*
- *Perform structured and planned project management.*
- *Complete projects with results in accordance with the predetermined Scope of Work.*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

10. *Fronting Business*

Pengembangan model layanan *fronting* untuk *Payment, Investment, Credit, Insurance*, dan *Saving* (PICIS) dari mitra perbankan dan non-perbankan (syariah/konvensional).

***Key Action* yang akan Dijalankan dalam Mendukung Program Kerja ini adalah:**

Program Pembangunan *Platform*
- Pengembangan sistem jasa keuangan untuk layanan Tabungan Pos, *Multibank Fronting, Cash Pickup*, dan *Fronting* Investasi (*CAPEX Dept.* Operasi dan *Digital Services* Rp69,63 Miliar).
- Melakukan tolak ukur layanan simpanan dan pembiayaan pada lembaga pos dunia.

Program Pengembangan Bisnis dan Kolaborasi dengan Mitra Strategis
- Aliansi strategis dengan lembaga syariah, asuransi, simpanan dan pembiayaan yang kredibel.
- Ekosistem gabungan untuk perluasan bisnis, baik *e-commerce*, transaksi keuangan dan lainnya.
- Percepatan proses kerja sama.

11. *Leverage Property*

Optimalisasi aset properti investasi dan/atau properti strategis untuk kebutuhan masyarakat, khususnya sektor kreatif.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

10. Fronting Business

Development of fronting service model for Payment, Investment, Credit, Insurance, and Saving (PICIS) from banking and non-banking partners (sharia/conventional).

Key Actions that Will be Carried Out in Support of This Work Program are:

Platform Development Program
- *Financial services system development for Postal Savings, Multibank Fronting, Cash Pickup, and Investment Fronting services. (CAPEX Dept. Operations and Digital Services Rp69.63 Bllion).*
- *Benchmarking of savings and financing services at world postal institutions.*

Business Development Programs and Collaboration with Strategic Partners
- *Strategic alliance with credible Islamic institutions, insurance, savings and financing.*
- *Join ecosystem for business expansion, both e-commerce, financial transactions and others.*
- *Acceleration of cooperation process.*

11. Leverage Property

Optimization of investment property assets and/or strategic properties for community needs, especially the creative sector.

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

12. *Construction Business Partnership*

Pengembangan kemitraan konstruksi yang menguntungkan bagi Grup.

13. *HC Practices*

Implementasi PMS berbasis OKR untuk mendorong *succession planning* dan akselerasi karir serta remunerasi berbasis performa.

14. Re-engineering HC Service

Implementasi *single HC platform* dan *re-engineering HC services process*.

15. *Talent Management*

Penerapan pengembangan talenta yang relevan untuk mendukung pencapaian target bisnis.

16. *Lean Organization & Productivity Enhancement*

Pengembangan struktur organisasi yang ramping dan peningkatan produktivitas karyawan berlandaskan budaya AKHLAK.

17. Inkubasi dan Transformasi

Akselerasi inkubasi inovasi dan transformasi untuk mendorong pencapaian target Perusahaan.

18. *Customer Experience*

Peningkatan pengalaman pelanggan menjadi lebih baik pada setiap layanan pos.

***32. MANAGEMENT'S PLAN** (Continued)*

12. Construction Business Partnership

Development of profitable construction partnerships for the Group.

13. HC Practices

Implementation of OKR-based PMS to encourage succession planning and career acceleration as well as remuneration based on performance.

14. HR Service Reengineering

Implementation of a single HC platform and re-engineering of HC service processes.

15. Talent Management

Implementation of relevant talent development to support the achievement of business targets.

16. Lean Organization & Productivity Enhancement

Development of lean organization structure and employee productivity enhancement based on AKHLAK culture.

17. Incubation and Transformation

Acceleration of innovation incubation and transformation to drive the achievement of Company's targets.

18. Customer Experience

Improved customer experience for the better in every postal service.

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

19. Aksi Korporasi

Peningkatan pertumbuhan *non-organic* melalui akuisisi/*merger/strategic alliances*.

20. Revitalisasi *Brand*

Rekode, membangun kembali dan meningkatkan daya tarik *brand* Pos Indonesia di mata masyarakat, khususnya mitra-mitra strategis.

21. Sistem Inti Berbasis Layanan

Pengembangan *Core System* dan *Superapps*.

22. Otomatisasi dan Modernisasi

Modernisasi proses bisnis dengan teknologi otomatisasi dan modernisasi infrastruktur operasional bisnis.

23. Integrasi Mitra Bisnis

Integrasi sistem *supporting* dan modernisasi infrastruktur untuk *Big Data Analytics*.

24. Manajemen Keuangan dan Aset

Pengembangan sistem keuangan dan aset yang memenuhi kebutuhan induk dan anak Perusahaan serta berbasis risiko.

25. Perencanaan Anggaran

Pengembangan sistem perencanaan anggaran Perusahaan berbasis program kerja bagi induk, anak, dan afiliasi Perusahaan.

26. Audit dan Kontrol

Pemanfaatan sistem audit yang tepat untuk menyelenggarakan audit preventif yang profesional, efisiensi dan efektif.

32. MANAGEMENT'S PLAN *(Continued)*

19. Corporate Action

Increased non-organic growth through acquisitions/mergers/strategic alliances.

20. Brand Revitalization

Recode, rebuild and regain brand attractiveness of Pos Indonesia's image, especially strategic partners.

21. Service Based Core Systems

Core System and Superapps Development.

22. Automatization and Modernization

Business process modernization with automatization technology and business operational infrastructure modernization.

23. Business Partner Integration

Integration of supporting systems and infrastructure modernization for Big Data Analytics.

24. Financial & Asset Management

Development of financial and asset systems that meet the needs of the parent and subsidiaries and are risk-based.

25. Budget Planning

Development of a work program-based Corporate budget planning system for parent, subsidiaries and affiliated Entities.

26. Audit and Control

Utilization of an appropriate audit system to conduct professional, efficient and effective preventive audits.

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

Skenario bisnis yang akan dilakukan dalam memenuhi target RKAP 2023 adalah sebagai berikut:

1. Skenario Bisnis Kurir

a. Pendapatan Bisnis Kurir tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.298 Miliar.
b. Total *Capex* yang menunjang Bisnis Kurir senilai Rp70,51 Miliar dengan rencana *cash out*:
   - Rp69,50 Miliar pada Triwulan I
   - Rp17,00 Miliar pada Triwulan II
   - Rp14,50 Miliar pada Triwulan III

2. Skenario Bisnis Logistik

a. Pendapatan Bisnis Logistik tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp674 Miliar
b. Total *Capex* yang menunjang Bisnis Logistik senilai Rp101 Miliar dengan rencana *cash out*:
   - Rp69,5 Miliar pada Triwulan I
   - Rp17 Miliar pada Triwulan II
   - Rp14,5 Miliar pada Triwulan III

3. Skenario Bisnis Jasa Keuangan

a. Pendapatan Bisnis Jasa Keuangan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.192 Miliar.
b. Total *Capex* yang menunjang Bisnis Jasa Keuangan senilai Rp206,4 Miliar dengan rencana *cash out*:
   - Rp181,33 Miliar pada Triwulan II
   - Rp21,07 Miliar pada Triwulan III
   - Rp4 Miliar pada Triwulan IV

32. MANAGEMENT'S PLAN *(Continued)*

The business scenario that will be carried out to meet the RKAP's target on 2023, are as follows:

1. Courier Business Scenario

a. Business revenue in 2023 is targeted at Rp2.298 Billion.
b. Total Capex to support Courier Business is Rp70.51 Billion with cash out plan:
   - *Rp69.50 Billion in the first quarter*
   - *Rp17.00 Billion in the second quarter*
   - *Rp14.50 Billion in the third quarter*

2. Logistics Business Scenario

a. Logistics Business revenue in 2023 is targeted at Rp674 Billion

b. Total Capex to support Logistics Business is Rp101 Billion with cash out plan:
   - *Rp69.5 Billion in the first quarter*
   - *Rp17 Billion in the second quarter*
   - *Rp14.5 Billion in the third quarter*

3. Financial Services Business Scenario

a. Financial Services Business Revenue in 2023 is targeted at Rp2,192 Billion.

b. Total CapEx supporting the Financial Services Business is Rp206.4 Billion with a cash out plan:
   - *Rp181.33 Billion in the second quarter*
   - *Rp21.07 Billion in the third quarter*
   - *Rp4 Billion in the fourth quarter*

32. PERENCANAAN MANAJEMEN (Lanjutan)

4. Skenario Bisnis Properti

a. Pendapatan Bisnis Properti tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp192 Milliar

b. Belanja modal yang menunjang Bisnis Jasa Keuangan senilai Rp152,73 Miliar dengan rencana kas keluar:
- Rp2 Miliar pada Triwulan II
- Rp90,73 Miliar pada Triwulan III
- Rp60 Miliar pada Triwulan IV

32. MANAGEMENT'S PLAN (Continued)

4. Property Business Scenario

a. Property Business revenue in 2023 is targeted at Rp192 Billion

b. Total Capital Expenditure supporting the Property Business is Rp152.73 Billion with a cash out plan:
- *Rp2 Billion in the second quarter*
- *Rp90.73 Billion in the third quarter*
- *Rp60 Billion in fourth quarter*

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

Informasi transaksi non kas yang signifikan yang tidak mempengaruhi aktivitas arus kas sebagai berikut:

33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

Significant non-cash transactions that do not affect the cash flows activities are as follows:

	2023	2022	
Penambahan Aset Hak Guna melalui Liabilitas Sewa	(21.614.624.254)	349.995.141	*Addition of Right-of-Use Assets from Lease Liabilities*
Pembayaran Bunga melalui Akru Bunga	(10.665.097.222)	(7.598.050.800)	*Interest Expenses from Interest Accrued*
Penambahan Aset Tetap dengan Mendebitkan (Mengkreditkan) Utang Usaha	30.183.414.172	(12.300.193.014)	*Additions of Property & Equipment Debited (Credited) Account Payables*
Pelepasan Aset Tetap melalui Penggantian (Ruislag)	1.458.913.692	--	*Disposal of Fixed Assets through Replacement (Ruislag)*
Penempatan Bank Garansi melalui *Non Cash Loan*	(20.604.000.000)	--	*Placement Bank Guarantee trought Non Cash Loan*

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan:

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities:

		Arus Kas Pendanaan/ *Financing Cash Flows*		Perubahan Non Kas/ *Non-Cash Changes*		
	2022	Penambahan/ *Addition*	Pembayaran/ *Payment*	Pergerakan Valuta Asing/ *Foreign Exchange Movement*	Lain-lain/ *Others*	2023
Utang Pembiayaan Konsumen/ *Customer Financing Payable*	44.480.045.870	--	(26.249.201.993)	--	4.698.122.888	22.928.966.765
Utang Bank Jangka Pendek/ *Short-Term Bank Loan*	770.000.000.000	10.024.000.000.000	(8.529.000.000.000)	--	20.604.000.000	2.285.604.000.000
Utang Bank Jangka Panjang/ *Long-Term Bank Loan*	87.500.000.000	--	(87.500.000.000)	--	--	--
Utang Obligasi/*Bonds Payable*	321.573.958.333	--	--	--	1.787.500.000	323.361.458.333
Pinjaman Jangka Menengah/ *Medium Term Notes*	492.650.000.000	--	--	--	--	492.650.000.000
Utang Bunga/*Interest Payable*	2.057.782.444	--	(251.090.088.514)	--	259.697.403.292	10.665.097.222

33. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

33. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (Continued)

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan: (Lanjutan)

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities: *(Continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2021	Arus Kas Pendanaan/ *Financing Cash Flows*		Perubahan Non Kas/ *Non-Cash Changes*		31 Desember/ *December 31,* 2022
		Penambahan/ *Addition*	Pembayaran/ *Payment*	Penambahan Aset Tetap/ *Additional in Fixed Assets*	Pergerakan Valuta Asing/ *Foreign Exchange Movement*	
Utang Pembiayaan Konsumen/ *Customer Financing Payable*	90.761.906.542	--	(46.281.860.672)	--	--	44.480.045.870
Utang Bank Jangka Pendek/ *Short-Term Bank Loan*	936.600.000.000	5.378.300.000.000	(5.544.900.000.000)	--	--	770.000.000.000
Utang Bank Jangka Panjang/ *Long-Term Bank Loan*	127.500.000.000	--	(40.000.000.000)	--	--	87.500.000.000
Utang Obligasi/*Bonds Payable*	--	492.650.000.000	--	--	--	492.650.000.000
Pinjaman Jangka Menengah/ *Medium Term Notes*	625.000.000.000	--	(300.000.000.000)	--	(3.426.041.667)	321.573.958.333

34. REKLASIFIKASI AKUN

34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

Certain accounts in the consolidated financial statements for 2022 have been reclassified to conform with the consolidated financial statements presentation as of December 31, 2023 as follows:

	2022			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Direklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Aset Lancar Lainnya:				*Other Current Assets:*
Lainnya	337.980.265.334	(52.624.400.257)	285.355.865.077	*Others*
Aset Tidak Lancar Lainnya	53.386.925.732	41.848.358.590	95.235.284.322	*Other Non-current Assets*
Obligasi	(500.000.000.000)	7.350.000.000	(492.650.000.000)	*Bonds*
Pinjaman Jangka Menengah	(325.000.000.000)	3.426.041.667	(321.573.958.333)	*Medium Term Notes*
Tambahan Modal Disetor	--	2.344.427.566	2.344.427.566	*Additional Paid-In Capital*
Komponen Ekuitas Lainnya	3.247.793.716.352	(2.344.427.566)	3.245.449.288.786	*Other Equity Component*

34. REKLASIFIKASI AKUN (Lanjutan) / *34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (Continued)*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2022 Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	*STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
PENDAPATAN BERSIH	**4.618.390.887.600**	**--**	**4.618.390.887.600**	***NET REVENUE***
BEBAN POKOK LAYANAN	**(3.279.756.648.955)**	**25.502.817.026**	**(3.254.253.831.929)**	***COST OF SERVICES***
LABA KOTOR	**1.338.634.238.645**		**1.364.137.055.671**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Pemasaran	(64.221.961.408)	(3.741.472.058)	(67.963.433.466)	*Marketing*
Umum dan Administrasi	(946.287.669.217)	39.305.757.446	(906.981.911.771)	*General and Administrative*
Pendapatan Lain-lain	726.574.741.351	1.758.106	726.576.499.457	*Other income*
Beban Lain-lain	(281.309.892.891)	(61.062.520.220)	(342.372.413.111)	*Other expenses*
LABA USAHA	**773.389.456.480**		**773.395.796.780**	***OPERATIONS PROFIT***
Pendapatan Keuangan	58.838.224.728		58.838.224.728	*Finance Income*
Beban Keuangan	(213.509.292.158)	(6.340.300)	(213.515.632.458)	*Finance Costs*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**618.718.389.050**	**--**	**618.718.389.050**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	18.327.923.659		18.327.923.659	*INCOME TAX (EXPENSE) BENEFITS*
LABA TAHUN BERJALAN	**637.046.312.709**		**637.046.312.709**	***PROFIT FOR THE YEAR***

LAPORAN ARUS KAS	2022 Dilaporkan Sebelumnya/ *As Previously Reported*	Direklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification*	*STATEMENT OF CASH FLOW*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5.229.515.488.021	--	5.229.515.488.021	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(2.522.907.649.365)	--	(2.522.907.649.365)	*Cash Paid to Employees*
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(2.180.073.362.272)	(189.476.182.270)	(2.369.549.544.542)	*Cash Paid to Supplier*
Pembayaran Biaya Pemasaran	(1.628.049.163)	--	(1.628.049.163)	*Payment of Marketing Cost*
Pembayaran Bunga Pinjaman	(185.966.010.202)	185.966.010.202	--	*Payment of Interest*
Pembayaran Pajak	(7.574.063.092)	--	(7.574.063.092)	*Payment of Tax*
Operasi Lainnya	(56.081.428.869)	56.081.428.869	--	*Other Operation*
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	**275.284.925.058**	**52.571.256.801**	**327.856.181.859**	***Net Cash Used in Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pencairan Pinjaman Bank Jangka Pendek	5.745.450.000.000	132.850.000.000	5.878.300.000.000	*Drawdown of Short-term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek	(5.844.900.000.000)	--	(5.844.900.000.000)	*Payment of Short-Term Bank Loans*
Pembayaran Bunga Pinjaman	--	(185.966.010.202)	(185.966.010.202)	*Payment of Interest*
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	(112.768.672.412)	--	(112.768.672.412)	*Payment of Consumer Financing Liability*
Layanan Jasa Keuangan	410.830.735.089	--	410.830.735.089	*Financial Services*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**198.612.062.677**	**(53.116.010.202)**	**145.496.052.475**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
Dampak dari Perubahan Kurs *Exchange Rates Fluctuation Effects* Terhadap Kas dan Setara Kas	--	544.753.401	544.753.401	*Exchange Rates Fluctuation Effects on Cash and Cash Equivalents*

35. INFORMASI SEGMEN / *35. SEGMENT INFORMATION*

Rincian informasi segmen adalah sebagai berikut: / *The detailed segment information is presented below:*

(dalam jutaan rupiah)

	2023													
	Regional 1 Medan	Regional 2 Jakarta	Regional 3 Bandung	Regional 4 Semarang	Regional 5 Surabaya	Regional 6 Makassar	Kantor Pusat/ Head Office	Jumlah Induk/ *Total Parent*	Pos Financial Indonesia	Pos Logistik Indonesia	Pos Properti Indonesia	Induk & Anak/ *Parent & Subsidiaries*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidated*
Pendapatan/ *Revenues*														
Pendapatan Surat dan Paket Pos/ *Revenue from Post Mail and Parcel*	205.118	541.391	158.321	301.876	438.343	248.824	--	1.893.873	--	--	--	1.893.873	--	1.893.873
Pendapatan Jasa Keuangan dan Ritel/ *Revenue from Financial Service and Retail*	265.108	170.771	153.869	165.372	232.210	250.922	--	1.238.252	23.325	--	--	1.261.577	(5.042)	1.256.535
Pendapatan Properti/ *Revenue from Property*	2.339	3.085	934	1.863	4.786	2.572	39.842	55.421	--	--	136.297	191.718	(40.174)	151.544
Pendapatan Logistik/ *Revenue from Logistic*	266.521	191.230	351.338	73.411	479.000	397.698	--	1.759.198	--	926.624	--	2.685.822	(509.785)	2.176.037
Pendapatan Teknologi Informasi/ *Revenue from Information Technology*	--	--	--	--	--	--	--	--	44.602	--	--	44.602	(44.474)	129
Jumlah Pendapatan/ *Total Revenue*	**739.086**	**906.477**	**664.462**	**542.522**	**1.154.339**	**900.017**	**39.842**	**4.946.745**	**67.927**	**926.624**	**136.297**	**6.077.592**	**(599.474)**	**5.478.118**
Pendapatan Lainnya/ *Other Revenue*	116.496	20.062	49.004	78.830	109.305	86.203	168.092	627.992	2.240	8.329	4	638.565	(9.749)	628.815
Jumlah Pendapatan Keuangan/ *Total Financial Revenue*	7.986	9.873	4.798	8.065	13.291	7.792	--	51.805	16	325	3.280	55.425	(11.865)	43.561
Jumlah/ *Total*	**863.568**	**936.412**	**718.264**	**629.417**	**1.276.935**	**994.012**	**207.934**	**5.626.542**	**70.183**	**935.277**	**139.580**	**6.771.582**	**(621.088)**	**6.150.494**
Beban Pegawai/ *Employee Expense*	(469.960)	(494.101)	(283.710)	(317.642)	(492.962)	(387.751)	--	(2.446.126)	(8.284)	(71.325)	(33.094)	(2.558.829)	--	(2.558.829)
Beban Operasi/ *Operating Expense*	(263.420)	(290.800)	(197.168)	(203.689)	(379.123)	(313.581)	--	(1.647.781)	(59.482)	(816.614)	(40.294)	(2.564.171)	591.526	(1.972.645)
Beban Administrasi/ Administration Expense	(16.633)	(3.896)	(5.991)	(4.134)	(9.729)	(7.942)	--	(48.325)	(30)	(639)	(912)	(49.906)	--	(49.906)
Beban Umum/ *General Expense*	(61.699)	(66.393)	(50.733)	(30.644)	(80.824)	(58.583)	--	(348.876)	(50.708)	(20.590)	(8.680)	(428.854)	258	(428.596)
Beban Penyusutan dan Amortisasi/ *Depreciation and Amortization Expenses*	(22.894)	(16.022)	(12.592)	(13.971)	(25.821)	(22.836)	--	(114.136)	(6.352)	(17.364)	(10.016)	(147.868)	7.481	(140.388)
Beban Lainnya/ Other expenses	(3.006)	(5.558)	(2.729)	(2.384)	(4.997)	(3.943)	--	(22.617)	(5.278)	(848)	(1.407)	(30.150)	--	(30.150)
Beban Keuangan/ *Finance Cost*	(43.687)	(50.915)	(45.216)	(10.577)	(65.878)	(37.441)	--	(253.714)	(844)	(5.923)	(11.428)	(271.909)	3.819	(268.089)
Jumlah Beban/ *Total Expense*	**(881.299)**	**(927.685)**	**(598.139)**	**(583.041)**	**(1.059.334)**	**(832.078)**	**--**	**(4.881.576)**	**(130.978)**	**(933.304)**	**(105.830)**	**(6.051.687)**	**603.083**	**(5.448.604)**
Laba Sebelum Pajak/ *Profit Before Tax*	**(17.731)**	**8.727**	**120.125**	**46.376**	**217.601**	**161.935**	**207.934**	**744.967**	**(60.795)**	**1.974**	**33.750**	**719.895**	**(18.005)**	**701.890**

35. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan) / *35. SEGMENT INFORMATION (Continued)*

(dalam jutaan rupiah)

	2022													
	Regional 1 Medan	Regional 2 Jakarta	Regional 3 Bandung	Regional 4 Semarang	Regional 5 Surabaya	Regional 6 Makassar	Kantor Pusat/ Head Office	Jumlah Induk/ *Total Parent*	Pos Financial Indonesia	Pos Logistik Indonesia	Pos Properti Indonesia	Induk & Anak/ *Parent & Subsidiaries*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidated*
Pendapatan/ *Revenues*														
Pendapatan Surat dan Paket Pos/ *Revenue from Post Mail and Parcel*	192.224	546.413	147.969	279.356	409.687	226.714	--	1.802.362	--	--	--	1.802.362	--	1.802.362
Pendapatan Jasa Keuangan dan Ritel/ *Revenue from Financial Service and Retail*	425.270	251.750	314.397	362.955	431.189	325.183	--	2.110.744	28.082	--	--	2.138.826	(3.719)	2.135.107
Pendapatan Properti/ *Revenue from Property*	2.212	4.106	1.167	2.363	4.630	2.154	--	16.631	--	--	117.345	133.976	(12.337)	121.639
Pendapatan Logistik/ *Revenue from Logistic*	16.532	26.770	14.445	13.000	16.632	11.234	0,0004	98.614	--	468.476	--	567.089	(75.291)	491.798
Pendapatan Teknologi Informasi/ *Revenue from Information Technology*	--	--	--	--	--	--	--	--	10.390	--	--	10.390		10.390
Jumlah Pendapatan/ *Total Revenue*	**636.238**	**829.039**	**477.978**	**657.674**	**862.138**	**565.285**	**0,0004**	**4.028.351**	**38.472**	**468.476**	**117.345**	**4.652.644**	**(91.348)**	**4.561.296**
Pendapatan Lainnya/ *Other Revenue*	191.534	44.659	77.884	121.475	171.529	164.065	0,0004	-- 771.146	2.047	10.403	83	783.679	(3.328)	780.351
Jumlah Pendapatan Keuangan/ *Total Financial Revenue*	9.453	14.039	5.408	11.318	11.782	7.940	--	59.941	16	281	1.921	62.159	--	62.159
Jumlah/ *Total*	**837.225**	**887.736**	**561.270**	**790.467**	**1.045.449**	**737.290**	**0,0009**	**4.859.438**	**40.535**	**479.160**	**119.348**	**5.498.481**	**(94.675)**	**5.403.806**
Beban Pegawai/ *Employee Expense*	(474.925)	(547.164)	(278.501)	(313.271)	(471.828)	(386.293)	--	(2.471.982)	(12.587)	(64.004)	(25.472)	(2.574.045)	--	(2.574.045)
Beban Operasi/ *Operating Expense*	(141.177)	(235.109)	(95.744)	(162.814)	(224.897)	(184.730)	--	(1.044.471)	(32.591)	(389.305)	(43.987)	(1.510.355)	65.192	(1.445.163)
Beban Administrasi/ *Administration Expense*	(13.530)	(3.353)	(4.210)	(4.842)	(8.853)	(7.150)	--	(41.938)	(40)	(797)	(481)	(43.255)	--	(43.255)
Beban Umum/ *General Expense*	(45.620)	(62.971)	(33.172)	(37.824)	(57.667)	(50.707)	--	(287.961)	(24.195)	(9.480)	(6.287)	(327.924)	--	(327.924)
Beban Penyusutan dan Amortisasi/ *Depreciation and Amortization Expenses*	(24.086)	(33.227)	(11.127)	(14.194)	(26.116)	(23.784)	--	(132.533)	(788)	(14.809)	(6.013)	(154.143)	--	(154.143)
Beban Lainnya/ Other expenses	(2.010)	(5.219)	(1.226)	(2.211)	(2.966)	(2.139)	--	(15.771)	(9)	(4.788)	(8.755)	(29.322)	--	(29.322)
Beban Keuangan/ *Finance Cost*	(21.770)	(77.088)	(10.464)	(6.652)	(52.734)	(32.686)	--	(201.393)	(303)	(9.496)	(43)	(211.236)	--	(211.236)
Jumlah Beban/ *Total Expense*	**(723.117)**	**(964.130)**	**(434.444)**	**(541.809)**	**(845.063)**	**(687.488)**	**--**	**(4.196.051)**	**(70.512)**	**(492.680)**	**(91.037)**	**(4.850.279)**	**65.192**	**(4.785.087)**
Laba Sebelum Pajak/ *Profit Before Tax*	**114.108**	**(76.394)**	**126.825**	**248.658**	**200.386**	**49.803**	**0,0009**	**663.387**	**(29.977)**	**(13.520)**	**28.312**	**648.202**	**(29.483)**	**618.718**

36. KEJADIAN SETELAH NERACA

Pada tanggal 2 Januari 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog untuk pendistribusian bantuan pangan beras pemerintah tahun 2024 dengan No: PJ-02/DP303/PG.04/01/2024 dan PKS001/DIRUT/0124.

Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Sosial terkait dengan program penyaluran bantuan sosial dengan rincian program kerja sebagai berikut:

1. Program penyaluran sembako tahun 2024 dengan perjanjian No 01/5.4/PKS/HK.01/01/2024 dan PKS012/DIR-4/0124 tanggal 19 Januari 2024.
2. Program Keluarga Harapan tahun 2024 dengan perjanjian PKS021/DIR-4/0124 dan 6/3.4/HK.01/1/2024 tanggal 26 Januari 2024.
3. Program Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2024 dengan perjanjian PKS015/DIR-4/0124 dan 82/4.4/PR.07.00/1/2024 tanggal 19 Januari 2024.
4. Program Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Tahun 2024 dengan perjanjian PKS016/DIR-4/0124 dan 124/4.3/HK.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024.
5. Program Penyaluran Bantuan Sosial Program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Negeri dalam Bentuk Uang Tahun 2024 dengan perjanjian PKS023/DIR-4/0124 dan 01/5.2/PKS-HIBAH/HK.01/1/2024 tanggal 29 Januari 2024.

36. SUBSEQUENT EVENTS

On January 2, 2024, the Company signed a cooperation agreement with Perum Bulog for the distribution of government rice food assistance in 2024 with No. PJ-02/DP303/PG.04/01/2024 and PKS001/DIRUT/0124.

The Company has signed a cooperation agreement with the Ministry of Social Affairs related to the social assistance distribution program with details of the work program as follows:

1. *Basic food distribution program in 2024 with agreement No. 01/5.4/PKS/HK.01/01/2024 and PKS012/DIR-4/0124 dated January 19, 2024.*
2. *Family Hope Program in 2024 with agreement PKS021/DIR-4/0124 and 6/3.4/HK.01/1/2024 dated January 26, 2024.*
3. *Food Assistance Program for Persons with Disabilities in 2024 with agreement PKS015/DIR-4/0124 and 82/4.4/PR.07.00/1/2024 dated January 19, 2024. January 19, 2024.*
4. *Food Assistance Distribution Program for Elderly Single Family in 2024 with agreement PKS016/DIR-4/0124 and 124/4.3/HK.01/1/2024 dated January 22, 2024.*
5. *Social Assistance Distribution Program for the Archipelago Economic Heroes Program sourced from Domestic Direct Grants in the Form of Money in 2024 with agreement PKS023/DIR-4/0124 and 01/5.2/PKS-HIBAH/HK.01/1/2024 dated January 29, 2024.*

36. KEJADIAN SETELAH NERACA

6. Program Penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu Tahun 2024 dengan perjanjian No PKS040/DIR-4/0224 dan 259/4.2/BS.00.01/2/2024 tanggal 12 Februari 2024.

36. SUBSEQUENT EVENTS

6. Program for the Distribution of Assistance for Social Rehabilitation of Orphans in 2024 with agreement No. PKS040/DIR-4/0224 and 259/4.2/BS.00.01/2/2024 dated February 12, 2024.

37. STANDAR AKUNTANSI DAN INTERPRETASI STANDAR YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian Grup yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

37. NEW ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATION OF STANDARD WHICH HAVE BEEN ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The Indonesian Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants (FASB-IIA) has issued new or amendment to the following Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Its Interpretation to Financial Accounting Standards (IFAS). The accounting standards will be effective or applicable on the Group's consolidated financial statements for the period beginning on or after January 1, 2024:

- *The amendments to SFAS 73 "Leases" about lease liability in a sale and leaseback;*
- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.*

37. STANDAR AKUNTANSI DAN INTERPRETASI STANDAR YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian Grup yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025:

- PSAK 74 “Kontak Asuransi”;
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - informasi komparatif.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen Grup masih mengevaluasi dampak potensial terhadap standar dan interpretasi akuntansi yang baru dan direvisi ini terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

37. NEW ACCOUNTING STANDARDS AND INTERPRETATION OF STANDARD WHICH HAVE BEEN ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The Indonesian Financial Accounting Standards Board – Indonesian Institute of Accountants (FASB-IIA) has issued new or amendment to the following Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Its Interpretation to Financial Accounting Standards (IFAS). The accounting standards will be effective or applicable on the Group’s consolidated financial statements for the period beginning on or after January 1, 2025:

- *SFAS 74 “Insurance Contracts”;*
- *The amendments to SFAS 74 “Insurance Contracts” about initial application of SFAS 74 and SFAS 71 - comparative information.*

As of authorization date of these consolidated financial statements, the Group’s management is still evaluating the potential impact on these new and revised accounting standards and interpretations on its consolidated financial statements.

38. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dewan Direksi bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan disetujui pada tanggal 26 Maret 2024.

38. MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements that have been completed and approved on March 26, 2024.